Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Jakad Publishing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DR. H. CECEP SURYANA, M.SI.

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.

Copyright@2021

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Abdul Rofiq

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112–119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
https://jakad.id/ jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-6955-40-6
viii + 176 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "**Komunikasi Kebijakan Pendidikan**". Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademik sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Penulis

Peringatan
Isra
Mi'raj
1442 H / 2021 M
"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah diberkahi sekelilingnya oleh Allah agar Kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"
(QS Al Isra:1)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I : DUA BADAN PELAYANAN PENDIDIKAN **1**
A. Hubungan Dua Badan Pelayanan Pendidikan..... 3
B. Kebijakan Pembangunan Pendidikan 4
C. Otonomi Daerah..... 7

BAB II : STRATEGI KOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN **13**
A. Landasan Teologis..... **15**
B. Landasan Filosofis 19
C. Teori-teori Kebijakan Pendidikan yang Melandasi 26
D. Teori-teori Komunikasi yang Mendukung..... 36
E. Strategi Komunikasi..... 40
F. Pendekatan Kajian Strategi Komunikasi..... 44
G. Elemen dan Efektivitas Strategi Komunikasi dalam Pendidikan..... 48
H. Konstruksi Pemikiran Tentang Pelayanan Pendidikan..... 54

BAB III : PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN..... **57**
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan 59
B. Strategi Komunikasi Pendidikan..... 62
C. Tinjauan Ilmu Komunikasi dan Upaya Perbaikan Perencanaan Pendidikan 79

D. Formulasi Perencanaan Strategi Komunikasi yang Dilakukan Dinas Pendidikan..... 90
E. Fungsi dan Tujuan Standar 93

BAB IV : FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI KOMUNIKASI..... 125
A. Faktor Pendukung..... 127
B. Faktor Penghambat 128
C. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Konteks Implementasi..... 130
D. Analisis Faktor Pendukung **..... 157**

BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 161
A. Kesimpulan..... 163
B. Implikasi..... 166
C. Rekomendasi..... 167

DAFTAR PUSTAKA..... 169
BIODATA PENULIS 175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Strategi Komunikasi Menurut Lasswell 46
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Tantang Pelayanan Pendidikan..... 54
Gambar 3.1 Kompleksitas Analisis Implementasi Strategi Komunikasi oleh *stakeholder* Pendidikan untuk mencapai Standar isi dan Standar Proses dari 8 SNP 101
Gambar 3.2 Ilustrasi Perencanaan Strategi Komunikasi yang dilakukan pada tingkat UPTD 107
Gambar 3.3 Implementasi Strategi Komunikasi Oleh UPTD menuju Sekolah dalam rangka implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan..... 117

DUA BADAN PELAYANAN PENDIDIKAN

BAB I

DUA BADAN PELAYANAN PENDIDIKAN

A. Hubungan Dua Badan Pelayanan Pendidikan

Sistem penyelenggaraan pendidikan baik yang berada di bawah naungan Kemendiknas maupun Kemenag pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian dalam praktiknya kedua belah pihak tetap membutuhkan perangkat sistem dan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengimplementasikan program kegiatannya. Terutama sekali dalam membangun strategi penyampaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan di setiap wilayah Kabupaten/Kota oleh masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah dinas pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai contoh, dewasa ini diasumsikan masih banyak SKPD Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota mengalami kendala ketika mereka harus menyampaikan berbagai kebijakan menyangkut implementasi program yang harus diatur oleh perundang-undangan. Kondisi ini sangat memerlukan suatu evaluasi terhadap sistem komunikasi yang dilaksanakan oleh semua komponen Dinas Pendidikan hingga Kepala sekolah dan guru. Sebagaimana ditegaskan dalam sisdiknas, khususnya dalam UU No 20 tahun 2003, bahwa Evaluasi Pendidikan adalah Rangkaian kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Dari isi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa dengan melalui pelaksanaan evaluasi, maka aspek ketercapaian mutu,

pengendalian dan penjaminan penyelenggaraan pendidikan dapat diwujudkan. Namun apakah semua pihak selama ini telah menunjukkan pemahaman yang utuh atas semua standar-standar penyelenggaraan pendidikan tersebut atau malah masih bingung bahkan keliru dalam menerjemahkan dan memaknainya sehingga implementasi program kebijakan pembangunan pendidikan ini tidak pernah menemukan bentuk dan target capaian yang memuaskan semua pihak.

B. Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Beberapa materi yang relevan dengan aspek pemahaman kebijakan pembangunan pendidikan di wilayah tertentu, misalnya yang dilakukan oleh Ade Suherman (2009) yang menyatakan bahwa:

> Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat. Masing-masing memiliki fungsi dan peran yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu dapat dikatakan maju mundurnya, tinggi rendahnya mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas partisipasi *stakeholder* dalam mendukung pendidikan di sekolah. Dengan demikian hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi mutu layanan pendidikan di SMA dapat di kategorikan rendah.

Dalam konteks strategi komunikasi yang harus dilakukan oleh para pejabat di lingkungan pendidikan mulai dari tingkatan Kementerian, kepala Dinas Provinsi, hingga kepala Dinas Pendidikan tingkat kab/kota semua pasti akan berhubungan dengan strategi

bagaimana mereka mampu mengolah pesan tentang semua isi dari undang-undang sisdiknas, kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang utuh serta bagaimana memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Dalam arti bahwa seorang harus mampu menunjukkan kekuatan intelektual, kekuatan personal, kekuatan sosial, kekuatan institusional sehingga mampu untuk berkompetitif dengan bidang pembangunan lainnya di luar bidang pembangunan pendidikan. Pribadi pemangku kepentingan yang berkualitas dan siap berkompetisi akan lebih mampu menerapkan strategi komunikasi hingga level ujung tombak sekalipun. Kondisi ini sangat diharapkan sekali oleh semua pihak, sebagaimana telah ditelaah oleh Carol C. Dwek (2006: 234-244) dalam pembahasan yang menjelaskan bahwa "Persaingan akan membuktikan siapa yang terhebat?, dalam *mindset* tetap bahwa Anda harus terus-menerus mampu membuktikan kompetensi Anda, mudah sekali untuk masuk dalam persaingan dengan pasangan Anda. Siapa yang lebih cerdas, lebih berbakat dan lebih disukai?".

Kondisi permasalahan yang terjadi di Kabupaten dalam konteks strategi komunikasi tentang berbagai kebijakan sangat penting untuk dikaji mengingat selama ini semua aspek yang berhubungan dengan kebijakan manajemen pendidikan masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa Raperda bidang Pendidikan tingkat Kabupaten di Jawa Barat masih perlu dirumuskan kembali sesuai dengan seluruh aspirasi dan target pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. (Tim Perumus Renstra Disdik Kabupaten di Jawa Barat, 2010). Dari sini dapat diketahui adanya sebuah kelemahan dari aspek akuntabilitas para pejabat yang perlu merumuskan strategi komunikasi yang tepat.

Dari telaah fenomena masalah Kabupaten di Jawa Barat tersebut maka jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Anderson (2005: 1-2) menulis secara gamblang tentang sistem akuntabilitas dalam bidang pendidikan tersebut. "*In the field of*

education there are three main types of accountability system: (a) compliance with regulation, (b) adherence to profesional norm, and (c) result driven." Hal pertama, akuntabilitas pendidikan yang ditandai pada adanya pemenuhan untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal kedua, akuntabilitas di bidang pendidikan yang didasarkan pada kepatuhan pada norma profesional dalam menjalankan program pendidikan, sedangkan akuntabilitas pendidikan yang ketiga bercirikan pada tuntutan hasil yang dicapai (*result driven*), dengan penekanan pada raihan hasil belajar siswa. *"Accountability systems are based on the excpextation that students can and will achieve the goals of schooling."* Lebih jauh, Anderson (2005: 1-2) mengemukakan lima komponen dalam sistem akuntabilitas pendidikan yaitu: adanya tujuan, penilaian, pembelajaran, sumber daya, dan sistem ganjaran ataupun sanksi. "*Accountability system in education should include five components: objectives, assessments, instructions, resources, and rewads or sanctions".*

Jika berbicara masalah akuntabilitas, maka akan berhubungan strategi komunikasi yang diterapkan oleh para pemangku kebijakan di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan salah satunya adalah akuntabilitas dalam manajemen kebijakan program penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh bahwa selama ini di semua kab/kota kajian manajemen program pendidikan atau lebih cenderung dikenal di antaranya dengan manajemen kurikulum telah lama ditegaskan dalam bentuk payung otonomi pendidikan yang berbasis otonomi daerah. Hal ini sangat penting guna memberikan kejelasan tentang bagaimana seharusnya transformasi kebijakan pembangunan pendidikan ini mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini Dinn Wahyudin (2009:35-356) menyatakan dalam hasil pembahasannya sebagai berikut:

Desain model manajemen kurikulum yang dapat dikembangkan di tingkat kabupaten dalam era otonomi daerah guna peningkatan akuntabilitas pengelola pendidikan, antara lain harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Memiliki formulasi desain model perencanaan manajemen kurikulum terbuka bagi peningkatan akuntabilitas pengelola pendidikan pada level sekolah baik dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dengan menekankan pada aspek pengembangan kapasitas yang didukung oleh komitmen semua pihak yang jelas dalam pengembangannya; (b) Memiliki formulasi desain model implementasi manajemen kurikulum dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola pendidikan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dengan menekankan pada aspek pengembangan kapasitas yang didukung oleh komitmen semua pihak yang jelas dalam pengembangannya; (c) Memiliki formulasi desain model evaluasi manajemen kurikulum yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola pendidikan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dengan menekankan pada aspek pengembangan kapasitas yang didukung oleh komitmen semua pihak yang jelas dalam pengembangannya.

C. Otonomi Daerah

Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5 dikemukakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 14 UU No 32 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi (a) Perencanaan

dan pengendalian pembangunan; (b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d) Penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) Penanganan bidang kesehatan; (f) Penyelenggaraan pendidikan; (g) Penanggulangan masalah sosial; (h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j) Pengendalian lingkungan hidup; (k) Pelayanan pertanahan; (l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) Pelayanan administrasi penanaman modal; (o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal yang senada, Salam (2004:89) menyatakan bahwa Otonomi Daerah dimaknakan sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Melalui otonomi daerah ini seharusnya strategi komunikasi yang diterapkan oleh para pejabat dan pemangku kepentingan dilingkungan Dinas Pendidikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan target sasaran komunikasi publik yang betul-betul transparan dan terjamin akuntabilitas kebenaran akan semua kebijakan-kebijakan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh semua *stakeholder*. Dalam hal ini pembahasan yang sangat mendukung mengenai komunikasi publik dalam mendukung kelancaran program kebijakan yaitu dilakukan oleh Asep Saefudin (2009) yang menyatakan bahwa Diplomasi Publik berfungsi untuk menjamin kelancaran transformasi kebijakan publik dari pemerintah dalam hal ini organisasi penyelenggaraan pemerintahan di semua departemen yang ditujukan agar masyarakat dapat memahami dan mengayomi pemerintahan

dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa. Dari temuan tersebut jika ditelaah maka terdapat fokus kajian yang melandasi pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merelevansikan antara strategi komunikasi tentang berbagai kebijakan manajemen pendidikan di tingkat kab/kota dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan.

Pada dasarnya menurut analisis penulis mengenai implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di wilayah sasaran pembahasan ini, diasumsikan memiliki kelemahan pada aspek penerapan strategi komunikasi yang dipilihnya. Kondisi ini menyebabkan banyak kendala-kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya capaian 8 Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada Standar Isi dan Standar Proses. Mengingat kedua standar ini sangat berkaitan. Dengan demikian permasalahan-permasalahan tersebut latar belakangnya mencakup:

1. Apa yang menjadi akar permasalahan dari kondisi saat ini tentang proses strategi komunikasi yang harus dilakukan Dinas Pendidikan di Kabupaten di Jawa Barat tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 Standar Nasional Pendidikan hingga sampai kepada UPTD dilihat dari "Analisis Internal maupun Eksternal".
2. Banyak aspek manajemen kebijakan pendidikan yang harus dikomunikasikan oleh UPTD di Kabupaten di Jawa Barat tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 Standar Nasional Pendidikan dalam rangka pencapaiannya oleh sekolah berdasarkan "Analisis Internal maupun Eksternal".
3. Ada sejumlah latar belakang masalah yang menyebabkan belum optimalnya proses implementasi strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan di Kabupaten di Jawa Barat tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 Standar Nasional Pendidikan hingga sampai kepada UPTD berdasarkan

analisis "ALE dari Grunig".

4. Proses implementasi strategi komunikasi yang dilakukan UPTD di Kabupaten di Jawa Barat tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 Standar Nasional Pendidikan hingga sampai sekarang belum diterima oleh sekolah.
5. Ada sejumlah proses evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan UPTD di Kabupaten di Jawa Barat tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 Standar Nasional Pendidikan hingga sampai kepada sekolah yang belum dianalisis berdasarkan "ALE dari Grunig".
6. Adanya proses evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 Standar Nasional Pendidikan hingga sampai kepada UPTD belum dianalisis dengan "ALE dari Grunig".
7. Pendekatan-pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh kepala dinas tingkat Kabupaten di Jawa Barat dalam mengimplementasikan semua kebijakan tentang Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan selama ini belum dianalisis berdasarkan "ALE dari Grunig".
8. Belum jelasnya model komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat dalam rangka pencapaian target Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan untuk semua jenjang pendidikan berdasarkan analisis "ALE dari Grunig".
9. Belum diketahuinya yang menjadi *Driving Force* pihak Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan *Strategi* Komunikasi yang mereka sebagai upaya capaian Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar Nasional Pendidikan selama ini terutama

jika dilihat dari nilai ibadahnya seperti apa berdasarkan analisis "ALE dari Grunig".

10. Masih *banyak* upaya yang harus dilakukan oleh mereka dalam rangka mengembangkan *Thinking Skill* dalam strategi komunikasi tentang implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan di lingkungan lembaganya mulai dari dinas Kabupaten hingga sekolah berdasarkan analisis "ALE dari Grunig".
11. Banyak *Stakeholder* dalam menerapkan sistem nilai dalam konteks *leadershipnya* di lingkungan Dinas Pendidikan belum mampu mengimplementasikan strategi komunikasi tentang Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan yang dianalisis berdasarkan "ALE dari Grunig".
12. Kompleksitas dari implementasi strategi komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidikan dalam rangka ketercapaian Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan belum dianalisis berdasarkan "ALE dari Grunig".

STRATEGI KOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Landasan Teologis

Disertasi ini disusun atas dasar landasan filosofis yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al Qur'an menjelaskan tentang komunikasi dapat ditemukan setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan (*qaulan*) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yaitu:

a. Qaulan Sadida (Perkataan yang Benar, Jujur)

QS. An Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraannya)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (qaulan sadida)".

b. Qaulan Baligha (tepat sasaran, komunikatif, *to the point*, mudah dimengerti)

QS. An Nisa ayat 63

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا ۢ بَلِيْغًا

"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha-perkataan yang berbekas pada jiwa mereka".

c. Qaulan Ma'rufa (perkataan yang baik)

QS. Al Ahzab ayat 32

يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya] dan ucapkanlah Qaulan Ma'rufa-perkataan yang baik."

d. Qaulan Karima (perkataan yang mulia)

QS. Al Isra' ayat 23

۞ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik".

Dari ayat tersebut jelas bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik atau mulia karena perkataan yang baik dan benar adalah suatu komunikasi yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bentuk komunikasi yang menyenangkan.

e. Qaulan Layyinan (perkataan yang lembut)

QS. Thaha ayat 43-44

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰىۚ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena benar-benar dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut".

Dari ayat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Qaulan Layina* berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Siapa pun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar. Rasulullah selalu bertutur kata dengan lemah lembut, hingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapa pun yang mendengarnya.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan, yang dimaksud *layina* ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar.

Ayat di atas adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir'aun. Dengan *Qaulan Layina*, hati komunikan (orang yang diajak berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita.

Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan tinggi. Allah melarang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, karena kekerasan akan mengakibatkan dakwah tidak akan berhasil malah ummat akan menjauh. Dalam berdoa pun Allah memerintahkan agar kita memohon dengan lemah lembut, *"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lemah lembut, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas," (Al A'raaf ayat 55)*

f. Qaulan Maysura (perkataan yang ringan)

QS. Al Isra' ayat 28

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۤءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا

"Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka Qaulan Maysura-ucapan yang mudah".

2. Hadis

Di dalam hadis Nabi juga ditemukan prinsip-prinsip etika komunikasi, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara berkomunikasi. Berikut hadis-hadis tersebut:

a. *qulil haqqa walau kana murran* (katakanlah apa yang benar walaupun pahit rasanya) (HR. Ahmad)

b. *falyakul khairan au liyasmut* (katakanlah bila benar kalau tidak bisa, diamlah) (HR. Bukhori dan Muslim)

c. *laa takul qabla tafakur* (jangan lah berbicara sebelum berpikir terlebih dahulu).

d. *Nabi* SAW menganjurkan berbicara yang baik-baik saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, *"Sebutkanlah apa-apa yang baik mengenai sahabatmu yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-hal yang kamu sukai terhadap sahabatmu itu sebagaimana sahabatmu menyampaikan kebaikan dirimu pada saat kamu tidak hadir".*

e. *Selanjutnya* Nabi SAW berpesan, *"Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang. yaitu mereka yang memutar balikan fakta dengan lidahnya seperti seekor sapi yang mengunyah-ngunyah rumput dengan lidahnya"*.(H.R. Muslim). Pesan Nabi SAW tersebut bermakna luas bahwa dalam berkomunikasi hendaklah sesuai dengan fakta yang dilihat, didengar, dan dialami (Ahmad Al Hasimiy,2005:20).

Prinsip-prinsip etika tersebut, sesungguhnya dapat dijadikan landasan bagi setiap muslim, ketika melakukan proses komunikasi, baik dalam pergaulan sehari maupun aktivitas-aktivitas lainnya (Folly Akbar, Blog di *download* Jumat 06 Februari 2015 jam 21.00 WIB).

B. Landasan Filosofis

Disertasi ini disusun atas dasar landasan filsafat tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki pikiran, di antaranya, Plato memandang hakikat manusia sebagai "suatu kesatuan pikiran, kehendak dan nafsu-nafsu." Aristoteles, memandangnya sebagai "makhluk rasional". Agustinus memandang manusia sebagai

"kesatuan jiwa dan badan, dinodai oleh dosa wanisan, dan dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan" (Lords,1996: 565). Makna filosofis manusia ini memiliki konsekuensi bagi pemahaman manajemen dan aliran manajemen yang diyakini dan dijalankannya. Ketiga filosof ini memandang manusia sebagai makhluk yang bermartabat yang memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika pemahaman filosofi manusia seperti ini, maka manajemen akan cenderung menempatkan manusia pada posisi yang bermartabat dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaannya.

Pandangan yang kontradiktif dan ketiga filosof di atas adalah yang disampaikan oleh Hsun Tzu, De La Meittrie, dan Holbach. Bagi Hsun Tsu, "manusia hakikatnya adalah jahat, karenanya memerlukan latihan disiplin yang kuat" Mettrie memandangnya sebagai "mesin atau mekanisme tak berjiwa". Sementara *Holbach* memandang manusia sebagai "makhluk yang harus dimotivasi oleh kepentingan diri" (Lorens, 1996: 565). Bila pandangan tentang manusia seperti ini, maka manajemen yang dianutnya dapat jadi adalah manajemen yang kurang atau tidak menghargai kedudukan manusia.

Di samping manajemen diilhami oleh pemikiran filosofis tentang manusia, manajemen juga dapat diinspirasikan oleh pemahaman tentang hakikat segala sesuatu yang berada di dunia ini (kosmos). Satori (2007: 145) berpandangan bahwa "hakikat segala sesuatu yang ter gelar di dunia ini perlu diatur. Pengaturan ini artinya untuk mengarah kepada usaha kelancaran, keteraturan, kedinamisan dan ketertiban suatu usaha". Ungkapan ini dapat dipahami bahwa apabila keteraturan tidak ada, dunia ini telah hancur. Masa sekarang penuh dengan kekompleksan problem. Masalah yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, budaya dan kenegaraan. Karena itu, mutlak diperlukan pengaturan dalam arti manajemen. Pendapat Satori di atas menguatkan pendapat Beard, seperti dikutip oleh Siagian (2008: 17) menyatakan bahwa:

> Tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan malahan kelangsungan hidup dan peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Ungkapan ini mengisyaratkan pentingnya manajemen dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Jika tidak ada manajemen, maka segala sesuatu akan kacau dan berantakan.

Manajemen tidak pernah beroperasi dalam suasana kekosongan. Proses manajemen dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal. Setiap masyarakat telah mempunyai norma-norma tertentu yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Norma-norma, keadaan, dan kondisi masyarakat itulah yang menentukan kepribadian masyarakat tersebut. Karena itu, menurut Siagian (2008:23-24), penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan sehari-hari akan selalu terkait dengan faktor-faktor ekologis: "falsafah negara, sistem politik yang dianut oleh negara, tingkat pembangunan ekonomi yang telah dicapai, tingkat pendidikan rakyat, bahasa, agama, letak geografis negara, dan struktur masyarakat".

Endin Nasrudin (2009:31-34) menjelaskan aliran filsafat yang mendasari kegiatan manajemen, apa pun manajemennya, antara lain:

1. **Positivisme Logis**

   Bagus (2000:194-202) menjelaskan bahwa "prinsip-prinsip realisme/materialisme dijadikan dasar bagi penyusunan paham positivisme yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang berfokus pada apa yang positif (nyata, dapat diukur, dan tidak tergantung pada subyek pengamat)"

Kalangan positivisme logis menganggap bahwa sains sudah mempunyai seluruh jawaban untuk segala sesuatu, atau paling tidak ia mempunyai point-point penting yang mewakili keseluruhan. Sebaliknya, agama dan filsafat sering kali mencakup dalam dirinya teori-teori yang salah dan mengada-ada. Kenyataannya tidak seorang pun mampu menciptakan atau menemukan sebentuk kebenaran baru dengan mendasarkan diri secara filosofis atau religius. Bagi kalangan positivis, segala sesuatu yang prinsip-prinsipnya tidak bisa diverifikasi adalah tak bermakna. Darinya, tidak ada yang bisa disebut benar kecuali ia telah diverifikasi secara empirik.

Positivisme logis adalah aliran yang lebih memfokuskan diri pada logika dan bahasa ilmiah. Prinsip *isomorfi* sebagai prinsip yang diyakini kaum positivisme logis adalah adanya hubungan mutlak antara bahasa dan dunia nyata. Bahasa adalah gambar dan kenyataan, lalu karena bahasa sehari-hari tidak bisa menggambarkan kenyataan secara benar dikembangkanlah bahasa logis dengan kecermatan matematis yang akurat. Implikasi penting dan filsafat ini adalah bahwa manajemen harus peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya.

2. Pragmatisme

Aliran filsafat ini menggunakan akar pemikirannya tentang manusia yang dilihat dari sudut pandang individualis, sebagaimana dijelaskan oleh Bagus (1996:877-899), bahwa asumsi dasar filsafat pragmatis adalah sebagai berikut:

a. Manusia tidak mungkin memperoleh pengetahuan yang absolut tentang realitas.
b. Alam semesta selalu berada dalam perubahan.
c. Dunia pemikiran merupakan sistem simbol, huruf, kata-kata dan formula matematis.

d. Metode ilmiah merupakan cara paling tepat untuk menguji pemikiran.
e. Aspek sosial kehidupan sangat lah penting bagi setiap individu

Bila pendapat di atas ditarik ke dalam pemahaman manajemen, maka adalah hal penting yang dapat diambil bagi aktivitas manajemen, yaitu manajemen perlu memperhatikan perubahan yang terjadi; manajemen harus bisa dimengerti secara logis; manajemen harus mengikuti prosedur-prosedur ilmiah; dan aspek sosial merupakan salah satu aspek pilar yang harus mendapatkan perhatian.

Kalangan pragmatis percaya bahwa setiap manusia memiliki cara, kemampuan, dan keunikan tersendiri dengan yang lainnya. Manusia adalah pembuat tujuan dan pencapai tujuan. Karenanya perilaku manusia tidak bias dilihat hanya sebagai respons terhadap rangsangan, namun kemampuan dalam berinteraksi di tengah perkembangan dunia dan alam semesta.

Pragmatisme memberikan dasar filosofis untuk administrasi demokratis yang sebenarnya. Setiap kalangan harus terlibat dalam pembuatan keputusan karena semuanya harus menanggung konsekuensi keputusan tersebut. Pembuatan keputusan tidak dipercayakan begitu saja pada kaum elit intelektual, pemilik kekayaan, para manajer, para profesional, atau para administrator namun melibatkan para guru, dan yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

Administrasi selalu peduli pada setiap upaya yang mengarah pada evolusi, koordinasi, dan pencapaian tujuan. Dalam kegiatan ini, kaidah, peraturan, batasan, dan hukum akan sangat berperan. Bagaimana seorang administrator menjalankan mekanisme seperti itu akan menjadi point paling penting dalam menentukan langkah-langkah operasional atau bahkan seluruh

rangkaian kegiatan.

Filsafat pragmatisme mengharapkan manajer untuk menguji dan menilai kepercayaannya seperti halnya sebuah hipotesis diuji. Kebenaran atau kesalahan moralitas mereka bisa ditemukan pada konsekuensi yang dihasilkannya. Pengalaman-pengalaman tertentu kemudian diterima dan ditolak berdasarkan evaluasi cerdas konsekuensi tersebut. Filsafat pragmatisme ini juga mendorong administrator/manajer untuk meneliti hakikat proses manajerial dan berangkat dari tindakan berikut segala aspeknya berdasarkan kecerdasan.

Selain tersebut di atas, pragmatisme juga menjadi dasar filosofis bagi partisipasi dalam peran kepemimpinan manajerial dalam membuat kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan. Masyarakat modern menuntut partisipasi seperti ini bila harus membuat sebuah keputusan yang cerdas. Pragmatisme, lewat penekanannya pada peran konteks sosial bagi individu dan gambarannya tentang realitas sebagai proses di mana individu berpartisipasi, meletakkan administrator dalam, mengutip ungkapan James, "di tengah-tengah sesuatu'. Selain itu, ada pesan tersirat dari pemikiran pragmatisme terhadap peran para pendidik dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan esensi demokrasi. Dalam hal ini pihak publik harus terlibat di dalamnya bila demokrasi ingin diterapkan. Menurut pragmatisme, bila publik diberi kesempatan mengetahui isu-isu dasar maka alternatif terbaik bisa dibuat dan hal ini sangat penting demi terciptanya masyarakat yang demokratis.

Prinsip-prinsip dasar filsafat pragmatisme mempunyai implikasi yang sangat besar bagi manajemen. Bagus (2000: 877) menjelaskan beberapa prinsip dasar pragmatisme yang memengaruhi manajemen.

a. Pragmatisme meyakini bahwa manusia memiliki potensi dalam membentuk nasibnya sendiri.

b. Manusia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri serta dunia yang ditempatinya.
c. Pragmatisme meyakini bahwa tidak ada kemutlakan, tidak ada realitas absolut, tidak ada figur otoriter, tidak ada kebenaran abadi tempat manusia mengembalikan persoalan-persoalan. Jawaban atas persoalan mesti dicari sendiri melalui pengalaman.

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa manajemen sangat dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme yang jika ditinjau dari sudut kepentingan dan tujuannya, tidak bisa terlepas dari pengalaman empirik dan menjunjung tinggi posisi manusia sebagai penentu keputusan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Lorens (1996: 877-899) menyebutkan tentang beberapa prinsip-prinsip dasar pragmatisme yang dapat menjadi dasar filosofis bagi manajemen demokratis.

a. Setiap pihak harus terlibat dalam pembuatan keputusan karena semuanya harus menanggung konsekuensi suatu keputusan
b. Manajemen selalu peduli pada setiap upaya yang mengarah pada evolusi, koordinasi, dan pencapaian tujuan.
c. Kaidah dan peraturan bukanlah alat yang dibuat untuk memberikan batasan, namun diolah untuk memberikan kebebasan.
d. Pragmatisme menolak gagasan bahwa pembatasan dan kebebasan adalah dua hal yang bertolak belakang.
e. Filsafat pragmatisme mengharapkan manajer untuk menguji dan menilai kepercayaannya seperti halnya sebuah hipotesis diuji.

f. Filsafat pragmatisme ini juga mendorong manajer untuk meneliti hakikat proses manajerial dan berangkat dan tindakan berikut segala aspeknya berdasarkan kecerdasan dan pengalaman untuk menentukan makna sebenarnya.

g. Pragmatisme juga menjadi dasar filosofis bagi partisipasi dalam peran kepemimpinan manajer dalam membuat kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar-dasar penting bagi manajemen. Dengan memberlakukan prinsip-prinsip secara tepat, akan membelikan pengaruh yang baik terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen.

C. Teori-teori Kebijakan Pendidikan yang Melandasi

1. Teori Kebijakan dalam Konteks Komunikasi

Kebijakan (*policy*) disebut juga dengan istilah seperti *politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.* Dengan adanya definisi yang disepakati di kalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah. Namun, untuk lebih memperjelasnya bagi semua orang yang akan berkaitan dengan kebijakan, maka alangkah baiknya definisi *policy* haruslah dipahamkan. Berikut adalah definisi kebijakan United Nations (1975): *Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 1990).* Di sisi lain. Anderson (2005 : *perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 1990).* Demikian juga menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt: *a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the*

part of both those who make it and those who abide by it (Jones, 1997).

Dalam konteks pembahasan ini kebijakan negara sangat penting untuk disertakan mengingat praktik otonomi pendidikan dalam kerangka *otonomi* daerah sangat erat dengan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Mengenai definisi kebijakan Negara; hal itu adalah sebuah konsep yang berlaku dalam sebuah negara *(nation)*, maka berikut ini adalah dua definisi tentang kebijakan negara. W.I Jenkins (1978):

> *a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve* (seperangkat keputusan-keputusan yang saling mengait satu sama lain; dibuat oleh para politisi atau kelompok politisi menyangkut pemilihan tujuan dan orientasi pencapaian tujuan tersebut dalam situasi khusus di mana keputusan itu berada, secara prinsipiil, berada dalam kekuasaan para politisi ini).

Sedangkan menurut Chief J.O Udouji (1981) kebijakan negara adalah:

> *an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of* related *problems that effect society at large* (sebuah rangkaian keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk sebagian masalah atau sekelompok masalah-masalah (yang saling berkaitan) di mana seluruh masalah itu mempengaruhi masyarakat banyak). Negara sebagai lembaga publik, artinya harus mampu melayani kepentingan atas layanan masyarakat, salah satunya melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan, maka beberapa

analisis yang hendak dilakukan di antaranya terhadap kajian tentang kekuatan dan peran serta dari unsur pemerintah dan swasta. Sebagaimana telah dikaji sebelumnya dalam UNDESD (1992) bahwa, *Numerous factors contributre to this version of civil servce weakness in developing countries. Firts, the need to provide employement for school dropouts has result in the over staffing of goverment organisation and SOEs, particularly in unskilled and semi-skilled grades*. Dari pendapat tersebut dapat dicerna bahwa masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap versi ini kelemahan layanan sipil di negara-negara berkembang. Menggoda, kebutuhan untuk menyediakan *employement* untuk putus sekolah memiliki hasil di atas staf organisasi pemerintah dan BUMN, khususnya di kelas terampil dan semi-terampil.

2. Teori Kebijakan Pendidikan

Definisi kebijakan pendidikan sebagaimana adanya dapat dijelaskan oleh para ahli kebijakan pendidikan di antaranya dinyatakan oleh Carter V. Good (1959) (dalam Imron, 2002:18) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.* Pengertiannya, bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan yang ditetapkan tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah i)

Prinsip Legalisme, ii) Prinsip Administrasi yang Demokratis, iii) Prinsip Netralitas, iv) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, dan v) Prinsip Desentralisasi. (*Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan,* 2000).

Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan pendapat parlemen. Setelah pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua, bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga, bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak diintervensi oleh kekuatan politik. Prinsip keempat, bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warga dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima, bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah daerah karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah otonomi daerah dan otonomi pendidikan.

3. Teori Kebijakan Pendidikan Indonesia

a. Kriteria Kebijakan Pendidikan Indonesia

Dalam perkembangannya bahwa Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu di antaranya:

1) Memiliki Tujuan Pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2) Memenuhi Aspek Legal-Formal

Kebijakan pendidikan akan diberlakukan, maka diperlukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku di suatu wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang diakui.

3) Memiliki Konsep Operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, harus mempunyai manfaat operasional agar dapat di implementasikan. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4) Dibuat oleh yang Berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur pembuat kebijakan pendidikan.

5) Dapat Dievaluasi

Kebijakan pendidikan hendaknya untuk selalu di evaluasi. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

6) Memiliki Sistematika

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatif dan diskriminatif. Hal ini harus diperhatikan agar pemberlakuannya tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan moneter; kebijakan politik; kebijakan bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya.

Dalam perspektif Halligan, J dan J Power. 1992 dalam buku *Political Management in the Nineties* dinyatakan bahwa :*...three principle dimensions of policy process in government, expanding on the first model. The three dimensions are:*

(i) ***Administrative**. Administrators maintain policy. They are primarily concerned that all regulations are complied with. They strive for impartiality, continuity, and procedural correctness. Administrators tend to be conservative, but are generally willing to follow changes in policy once agreed, as their function is to maintain policy. They strive to assure that any change does not upset stability.*

(ii) ***Management**. Managers launch activities within the frameworks given. Management focuses on implementing changes, and thus are primarily concerned with outputs than regulations and procedures.*

(iii) ***Political**. The political process within the executive is led by politicians, the elected head of government*

and ministers, who often rely on their senior officials for political guidance. This function is the steering of change. The political process initiates change, gains endorsement for change by attending to numerous interest for and against change.

Dalam konteks pembahasan ini maka dapat disimpulkan, bahwa para pembuat kebijakan itu adalah; 1) administrator; 2) manajer; 3) politisi yang berada pada posisi masing-masing sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan mereka dalam bidang yang mereka tanggungjawabi. Para administrator akan memberikan program-program yang dirancangnya dari konsep hingga praktis; manajer akan menjabarkan program-program itu dengan pengembangan yang teknis; dan para politisi akan merancang gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan signifikan dalam konteks jangka panjang yang mengatur program-program pada tingkatan struktur politik di daerah tempat program-program tersebut diselenggarakan.

b. Anatomi Kebijakan Pendidikan Indonesia

Pada dasarnya, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia 2004-2009 yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**;** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggara Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setiap kebijakan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan; baik di tingkat makro (nasional); tingkat messo (daerah); dan tingkat mikro (satuan pendidikan). Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-Republik Indonesia (RI) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Kemudian keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden; jajaran Kementerian; dan jajaran badan/lembaga kelengkapan eksekutif Negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia.

Pada tingkat makro, para pengambil keputusan masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI, Presiden RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI`. Segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh ketiga unsur lembaga ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat

daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil ketetapan *policy maker* nasional.

Jika ditelaah berdasarkan pendapat J. Grunig (2011: 15) yang menyatakan bahwa "*The Social or institutional environment consit of stakeholder publics that want to help determine the mission of an organization-such as goverments, communities, stockholder, employeees, and activist groups*". Pendapat tersebut menunjukkan jika dianalisis berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan sebagaimana dalam pembahasan ini maka dijelaskan bahwa Lingkungan sosial atau institusional dari publik pemangku kepentingan yang ingin membantu menentukan misi organisasi-seperti *goverments*, masyarakat, pemegang saham, *employeees*, dan kelompok aktivis. Artinya bahwa lembaga pendidikan setingkat dinas pendidikan kabupaten hendaknya memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dalam konteks kajian komunikasi secara strategi untuk kepentingan pemerintah, masyarakat dan kelembagaannya sendiri.

Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan jugalah untuk yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing. Berikut ini adalah ilustrasi berupa bagan tentang anatomi kebijakan pendidikan nasional berdasarkan kajian terhadap data Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009 dan aspek empirik yang tengah berlangsung saat ini di Indonesia dengan konsentrasi khusus untuk pengaturan pendidikan dasar dan menengah.

4. Standar Nasional Pendidikan

Untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan maka diharuskan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan PP RI No. 19 tahun 2005, yang mencakup 8 komponen yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian. Adapun uraian dari masing-masing standar ini mencakup:

a. Standar Isi mencakup Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

b. Standar Proses mencakup Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

c. Standar Kompetensi Lulusan, mencakup kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

d. Standar Pendidik dan Kependidikan mencakup, Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

e. Standar Sarana dan Prasarana mencakup, Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran,

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar Pengelolaan mencakup, Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
g. Standar pembiayaan mencakup, Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
h. Standar Penilaian mencakup, Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dari kedelapan standar nasional pendidikan di atas, tentunya akan menuntut beberapa upaya yang harus dilakukan Dinas Pendidikan, di antaranya strategi untuk mengkomunikasikannya hingga level bawah. Strategi ini sangat diperlukan guna memperoleh keberhasilan secara merata.

D. Teori-teori Komunikasi yang Mendukung

Ada beberapa teori komunikasi yang mendukung proses pembentukan strategi komunikasi, di antaranya dapat dideskripsikan sebagai berikut. Dalam situasi interaksi antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai, hasil studi Seft George Hunter (2001) memperlihatkan bahwa perilaku komunikasi yang ditampilkan oleh seorang pewawancara tidak sebatas menunjukkan keinginan untuk berkomunikasi, tetapi juga melibatkan perilaku yang menggambarkan kompetensi komunikasi dan gaya komunikasi sosial yang dimilikinya. Pengertian perilaku yang dimaksudkan di sini adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi (Miller:1974:3).

Dengan argumentasi ini, maka pendekatan psikologi, khususnya psikologi sosial, sebagai titik berdiri (*standpoin*t) teori untuk menjelaskan perilaku komunikasi pada pembahasan yang dilakukan penulis pada tahun 2008. Buku pertama tentang psikologi sosial, yakni *Social Psychology* tulisan E.A Ross mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu yang berusaha memahami dan menguraikan keseragaman dalam perasaan, kepercayaan atau kemauan-juga tindakan-yang diakibatkan oleh interaksi sosial (Dewey,1967). Dan dalam pandangan psikologi sosial, komunikasi adalah peristiwa sosial, yakni peristiwa yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A.Foss *et al* (2005:43-44), terdapat asumsi menyangkut perilaku individual dalam pandangan tradisi psikologi sosial. Adanya mekanisme umum yang ditemukan melalui riset yang hati-hati. Hal ini yang menyebabkan tradisi psikologi sosial ini sering disebut sebagai *"science of communication"*. Terdapat 2 (dua) pemikiran kunci (*key ideas*) yang memerintah atau mengatur perilaku individu. Lebih lanjut Little john dan Foss menerangkan bahwa tradisi psikologi sosial dapat dibagi atas tiga cabang utama yaitu tentang perilaku (*the behavioral*), tentang kognisi (*cognitive*) dan tentang hal-hal menyangkut biologis (*the biological*). Pendekatan behaviorisme berkonsentrasi pada hal yang terkait dengan bagaimana seseorang sesungguhnya melakukan strategi komunikasi dalam berbagai situasi komunikasi. Littlejohn dan Foss *et al* (62) menurunkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban teoritik. Misalnya: *"Siapakah saya sebagai seorang komunikator?", "Sumber daya-sumber daya apa saja yang memampukan saya berkomunikasi?", "Bagaimana saya berbeda dari komunikator lain?", "Bagaimana orang lain memandang perilaku saya?"* serta *"Bagaimana saya merubah perilaku saya dari satu situasi ke situasi yang lain?"*

Lebih lanjut bahwa kajian strategi komunikasi akan berhubungan dengan atribusi perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Kesalahan fundamental atribusi diartikan sebagai kesulitan utama dalam membuat atribusi atau penyebab perilaku secara akurat yang disebabkan kecenderungan seseorang menilai perilaku seseorang berdasarkan kategori atau jenis orang tersebut, bukan atas dasar situasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Grunig (2011:18) bahwa "*anyone who attend s type meeting of professional public relations society or reads professional publication seldom can avoid hearing complaint hat organization executives, journalists, and members of the general population fails to understand the public relations function anda trivialize its value for organisasztions and society*". Menurut pendapat Grunig di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang berkepentingan dengan keunggulan sebuah *public relations* secara Professional, maka seseorang yang melakukannya dapat menghindari, mendengar keluhan para eksekutif organisasi, wartawan, dan anggota masyarakat umum untuk menghindari kegagalan dalam memahami fungsi *public relations* sehingga tidak meremehkan nilainya untuk organisasi dan masyarakat. Artinya bahwa dalam konteks pembahasan ini maka diperlukan suatu strategi khusus dalam implementasi kebijakan capaian 8 standar nasional pendidikan ini secara optimal.

Devito (1997) mengemukakan beberapa prinsip atau asumsi dasar menyangkut atribusi. Pertama, konsensus atau kesamaan dengan orang lain (*concensus or similarity to others*). Bila hanya seseorang saja yang berseberangan dengan norma yang umum maka orang lain akan mengontribusi perilaku orang tersebut berdasarkan motivasi pribadinya. Sebaliknya, bila mayoritas berseberangan dengan norma orang, biasanya penyebab perilaku tersebut distribusi berdasarkan situasi (norma yang tidak relevan). Kedua, konsistensi atau kesamaan antar waktu (*consistency or similarity over time*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang

berperilaku konsisten dan berulang dengan cara yang sama, berarti perilaku tersebut distribusi oleh motivasi internal. Sebaliknya, bila perilaku itu tidak konsisten dan cenderung tidak berulang, perilaku tersebut distribusi berdasarkan situasi eksternal. Ketiga, perbedaan atau ada kesamaan dalam situasi berbeda (*distinctiveness, similarity in different situation*). Prinsip ini didasarkan pada reaksi yang sama dilakukan seseorang dalam situasi berbeda. Bila seseorang cenderung berperilaku sama dalam situasi yang berbeda, perilaku tersebut distribusi berdasarkan motivasi internal. Sebaliknya, bila orang berperilaku berbeda dalam situasi yang sama, maka perilaku itu distribusi berdasarkan faktor eksternal (situasional). Terakhir, kemampuan mengontrol (*controllability).* Kontrol yang dimaksud di sini meliputi motivasi internal dan situasi ketika perilaku itu muncul. Dalam konteks strategi komunikasi kebijakan pendidikan maka diperlukan adanya tolak ukur atau standar pengukuran dari semua kebijakan yang dilakukan oleh para *stakeholder*, untuk kepentingan akan parameter tolak ukur ini maka penulis mengadopsi dari pendapat Grunig dalam Linda Hon, 1999, yaitu sebagai berikut: (a) Trust (Dimensi: Integritas, Competance, Ketergantungan); (b) Kontrol Mutualitas; (c) Komitmen; (d) Kepuasan; (e) Komunal Hubungan; (f) Bursa Hubungan. Dalam konteks pembahasan ini maka tolak ukur ini akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap item-item dari 8 standar nasional pendidikan yang setelah berjalan di lingkungan pendidikan nonformal. Dari empat kajian strategi komunikasi menurut Grunig (2009) yang terdiri dari 4 kajian *yaitu (1) Strategic Communication Management (Scm); (2) Problem Statement; (3) Methodological Approach Dan (4) Theoretical Framework (Grunig, J.E. & Repper, F.C. (2002:30).* Dari keempat kajian penerapan teori strategi komunikasi menurut Grunig ini, penerapan pada fokus kajian studi yang penulis lakukan, mengambil kajian teori yang pertama yaitu tentang S*trategic Communication Management (SCM).*

Dari uraian Teori-teori kebijakan secara umum dan kebijakan pendidikan di Indonesia, maka dapat penulis analisis melalui sejumlah asumsi-asumsi yang selama ini akan menjadi sumber pemecahan permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan standar isi dan standar proses dari 8 SNP yang ada. Adapun asumsi tersebut mencakup:

1. Manajemen pendidikan dalam konteks implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan merupakan suatu sistem mendasar yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan capaian layanan pendidikan yang bermutu;
2. Fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian merupakan kebutuhan strategis dalam implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan;
3. Implementasi dari manajemen pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian akan membutuhkan strategi komunikasi yang terbuka dan transparan dalam kerangka implementasi Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan;
4. Strategi komunikasi merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang kepala dinas dalam mendukung keberhasilan Standar Isi dan Standar Proses dari 8 standar nasional pendidikan;
5. Pembangunan pendidikan pada tataran persekolahan membutuhkan sejumlah kebijakan strategis sebagai bentuk strategi komunikasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang terkait.

E. Strategi Komunikasi

Peran serta komunikasi dalam pembangunan bidang pendidikan sangat strategis, di mana komunikasi yang dilakukan akan menuntut

peran dan kredibilitas dari seorang pelaku pembangunan pendidikan yang dimaksud. Pada dasarnya strategi komunikasi yang dapat dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan atau capaian mutu pendidikan dapat diadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Laswell yang mencakup penajaman-penajaman kembali mengenai *who?* yaitu siapa yang akan berbicara, artinya langkah awal sebuah rumusan strategi pasti akan dimulai dengan kata Siapa yang Berbicara. Selanjutnya dari teori Lasswell ini yaitu *Says What?* artinya apa yang akan dibicarakan, dengan demikian dalam menyampaikan isi pesan dalam rangka pembangunan pendidikan yang mengacu kepada capaian 8 standar pendidikan maka hal itu akan berhubungan dengan Pesan atau "Apa" yang akan dikatakan oleh komunikator yang dalam hal ini adalah individu pelaku atau pemeran dalam pembangunan bidang pendidikan. Kajian teori Lasswel selanjutnya yaitu *In which Channel?* Artinya bahwa pesan yang akan dibicarakan atau disampaikan oleh pelaku pembangunan pendidikan tersebut harus efektif dan efisien penyampaiannya melalui media-media yang adaptif, sebagai misal melalui media presentasi, iklan, brosur ataupun siaran media elektronik dan media massa yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan kebijakan seorang pejabat Dinas Pendidikan. Telaah komponen selanjutnya dari teori Lasswell ini adalah *To Whom?* Kepada siapa artinya bahwa seorang pimpinan di lingkungan pendidikan harus memahami siapa yang akan diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan mengenai kebijakan pembangunan pendidikan berdasarkan 8 standar pendidikan yang dimaksud dalam pesannya tersebut. Kunci teori Laswell yang terakhir adalah *With waht Effect,* artinya apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya, ini merupakan target analisa dari seorang pimpinan tentang estimasi apa yang akan terjadi jika pesan tentang target capaian 8 standar pendidikan ini disampaikan kepada warga pendidikan dan bagaimana dampak atau reaksi yang akan ditimbulkan. Dengan demikian pimpinan

dapat mengantisipasi jika reaksi yang ditimbulkan negatif dan sebaliknya akan mampu memberikan mediasi atau rujukan lebih lanjut untuk kemajuan jika reaksi yang ditimbulkan bersifat positif.

Dari telaah teori di atas maka akan menjadi dasar dalam menemukan dan mengonstruksi suatu bentuk atau model strategi komunikasi yang adaptif dalam kerangka implementasi kebijakan 8 standar pembangunan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini strategi komunikasi secara teoritis dikemukakan oleh Onong Uchyana (1981: 84) bahwa:

> "strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi".

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa strategi komunikasi ini terlahir dari beberapa dimensi seorang komunikator untuk melakukan proses komunikasinya sehingga tepat sasaran. Sebagaimana dalam konteks pembahasan ini jika target sasarannya adalah ketercapaian pesan komunikasi yang berisi 8 standar pendidikan kepada warga pendidikan sebagai implementator maka strategi komunikasi yang dimaksud harus memiliki dimensi yang berhubungan dengan 8 standar pendidikan itu sendiri. Demikian juga jika dimensinya adalah ketercapaian pemaknaan atas pesan dalam komunikasi yang disampaikan maka target yang harus dipikirkan oleh komunikator yang dalam hal ini adalah pejabat di lingkungan dinas pendidikan maka mereka harus memaknai Dimensi kebijakannya sebagai salah satu bentuk pesan yang harus diperhatikan sehingga tepat sasaran.

Teori-teori lain mengenai strategi komunikasi ini dijelaskan juga oleh Mc Quail (1980), yaitu lebih ditekankan pada aspek peranan komunikator. Dalam strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting, itulah sebabnya strategi komunikasi harus luwes supaya komunikator sebagai pelaksana dapat segera mengadakan perubahan bila dalam pelaksanaan menemui hambatan. Salah satu upaya untuk melancarkan komunikasi yang lebih baik mempergunakan pendekatan A-A Procedure (*from Attention to Action Procedure*) dengan lima langkah yang disingkat AIDDA. A Attention (perhatian); I Interest (minat); D Desire (hasrat); D Decision (keputusan); A Action (kegiatan). Dengan demikian dimulainya komunikasi dapat dilakukan dengan membangkitkan perhatian akan menjadikan suksesnya komunikasi. Setelah perhatian muncul kemudian diikuti dengan upaya menumbuhkan minat yang merupakan tingkatan lebih tinggi dari perhatian. Minat merupakan titik pangkal untuk tumbuhnya hasrat. Seorang komunikator harus pandai membawa keinginan tersebut untuk menjadi suatu keputusan komunikan sesuai kegiatan yang diharapkan komunikator.

Menurut Paul McGhee (2012) menyatakan bahwa Strategi komunikasi dapat dipandang dari sudut psikologis efek, sebagai dijelaskan sebagai berikut:

> *No matter what kind of job you have, communication will always be an important aspect of your work, whether it's in meetings, phone conversations with clients or discussions between managers and other employees. Many professional organizations (e.g., the American Institute of Certified Public Accountants) now emphasize the development of good "people skills," and communication skills are generally at the top of the list. Unfortunately, good communication is often complicated by the fact that people are stressed out and overloaded with work. You*

have to earn attention and interest, both in your written and oral communications.

Pernyataan di atas menunjukkan bagaimana kekuatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya akan mampu memberikan dampak pengkondisian yang strategis dalam sebuah perusahaan melalui apresiasi terhadap upaya penciptaan keterampilan-keterampilan individu. Di mana individu yang dimaksud adalah orang yang mampu melakukan dan menunjukkan perilaku komunikasi secara efektif sehingga mampu terhindar dari kondisi stres dalam setiap pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan konteks pembahasan ini maka pekerjaan sebagai implementator atas kebijakan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan seperti kepala sekolah atau Kepala UPTD maka ia harus mampu menempatkan semua pesan komunikasi dari atasannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan tertentu menjadi "pendorong" atau Motif bagi dirinya sendiri selama mereka melaksanakan tugas sebagai *stakeholder* dalam dunia pendidikan.

F. Pendekatan Kajian Strategi Komunikasi

Dalam mengkaji masalah strategi komunikasi maka akan dihadapkan pada pendekatan aspek penting yaitu secara makro dan mikro. Di mana menurut Onong Uchjana Effendy (1981) bahwa:

> Strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu: Secara makro (*Planned multimedia strategy*) dan secara mikro (*single communication medium strategy*). Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu: Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Dengan demikian maka keduanya akan mampu menjembatani "cultural gap", misalnya suatu program yang berasal dari suatu produk kebudayaan lain yang dianggap baik

untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri sangat tergantung bagaimana strategi mengemas informasi itu dalam dikomunikasikannya. (1981: 67).

Sedangkan menurut Anwar Arifin dalam buku 'Strategi Komunikasi' menyatakan bahwa: Sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat. (1984:10)

Beberapa kajian teori dalam studi mengenai Strategi Komunikasi pada dasarnya tidak akan memiliki makna yang jelas jika tanpa objek atau sasaran target dari penerapan strategi komunikasi yang dimaksud. Tentu saja strategi harus didukung dengan teori. Strategi komunikasi pun harus didukung dengan teori yang merupakan pengetahuan mendasar yang sudah diuji kebenarannya. Teori merupakan suatu pernyataan atau suatu konklusi dari beberapa statement yang menghubungkan suatu statement yang satu dengan statement lainnya.

Dari sekian banyak teori komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, untuk strategi komunikasi yang memadai adalah teori dari seorang ilmuan politik dari Amerika Serikat yang bernama Harold D. Lasswell yang menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi atau cara untuk menggambarkan dengan tepat sebuah tindak komunikasi ialah menjawab pertanyaan "*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*? (siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek bagaimana)". Rumusan Formula Lasswell

tersebut dapat dilihat pada skema yang digambarkan oleh Denis Mc Quail dan Sven Windahl sebagai berikut:

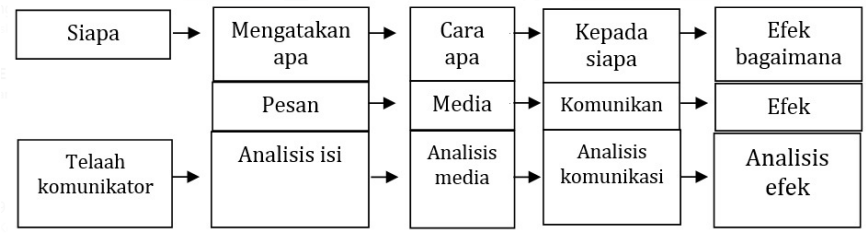

Gambar 2.1
Skema Strategi Komunikasi Menurut Lasswell

Telaah komunikator meliputi analisis hal-hal sebagai berikut:

Sejauh mana si komunikator mempunyai percaya diri (*self confident*). Dikarenakan dalam Komunikasi Interpersonal ciri/ karakteristiknya yang pertama dimulai dari diri sendiri maka komunikator harus percaya pada kemampuannya sendiri untuk melakukan relasi Komunikasi Interpersonal. Bahagia dari percaya diri pada komunikator adalah penguasaan materi/pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal dari isi pesan yang akan di-recieverkan (disampaikan).

Sejauh mana komunikator melakukan transaksional, saat bertemu dan berkenalan dengan komunikan maka komunikator sudah mempunyai persepsi mengenai identitas dan kepribadian komunikan. Komunikator harus tetap mengendalikan identitas dan kepribadian komunikan seperti semula. Memelihara relasi, yaitu memelihara hubungan dengan komunikan dengan mengatur jarak duduk atau dengan tetap memperhatikan pandangan pada wajah komunikan.

Formula sederhana ini telah digunakan dengan berbagai cara, terutama untuk mengatur dan mengorganisasikan dan membentuk struktur tentang proses komunikasi.

Formula Laswell menunjukkan kecenderungan-kecenderungan awal model-model komunikasi, yaitu menganggap bahwa komunikator pasti mempunyai "*receiver*" (penerima) dan karenanya komunikasi harus semata-mata dianggap sebagai proses persuasif. Juga selalu dianggap bahwa pesan-pesan itu pasti ada efeknya. Formula Lasswell tersebut mengandung banyak keterkaitan dengan teori-teori lain seperti diungkapkan oleh Melvin L. De Fleur yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy (1981:69) dalam buku Dimensi-dimensi Komunikasi', bahwa ada empat teori:

Individual Differences Theory, bahwa khalayak sebagai komunikan secara selektif psikologis memperhatikan suatu pesan komunikasi jika berkaitan dengan kepentingannya, sesuai sikap, kepercayaan, dan nilai-nilainya. ***Social Catagories Theory***, bahwa meskipun masyarakat modern sifatnya heterogen namun orang-orang yang mempunyai sifat yang sama akan memilih pesan komunikasi yang kira-kira sama dan akan memberikan tanggapan yang kira-kira sama pula. ***Social Relationship Theory***, bahwa walaupun pesan komunikasi hanya sampai pada seseorang tapi kalau seseorang tersebut sebagai pemuka pendapat (*opinion leader*), maka informasi isi pesan tersebut akan diteruskan kepada orang lainnya bahkan juga menginterpretasikannya. Berarti *opinion leader* tadi mempunyai pengaruh pribadi (*personal influence*) yang merupakan mekanisme penting dapat merubah pesan komunikasi).

Cultural Norms Theory, bahwa melalui penyajian yang selektif dan penekanan pada tema tertentu media massa menciptakan kesan-kesan pada khalayak bahwa norma-norma budaya yang sama mengenai topik-topik tertentu dibentuk dengan cara-cara khusus dengan batas-batas situasi perorangan, yaitu ada tiga:

1. *Reinforce Existing Patterns*, bahwa pesan komunikasi dapat memperkuat pola-pola yang sudah ada dan mengarahkan

orang-orang untuk percaya bahwa suatu bentuk sosial dipelihara oleh masyarakat.

2. *Create New Shared Convictions*, bahwa media massa dapat menciptakan keyakinan baru mengenai suatu topik yang dengan topik tersebut khalayak kurang berpengalaman sebelumnya.
3. Change Existing Norms, bahwa media massa dapat merubah norma-norma yang sudah ada dan karenanya dapat merubah tingkah laku orang-orang.

Selanjutnya strategi komunikasi harus juga meramalkan efek komunikasi yang diharapkan, yaitu dapat berupa: menyebarkan informasi melakukan persuasi melaksanakan instruksi. Dari efek yang diharapkan tersebut dapat ditetapkan bagaimana cara berkomunikasi (*how to communicate*), dapat dengan: komunikasi tatap muka (*face to face communication*), dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah laku (*behaviour change*) dari komunikan karena sifatnya lebih persuasif komunikasi bermedia (*mediated communication),* dipergunakan lebih banyak untuk komunikasi informatif dengan menjangkau lebih banyak komunikan tetapi sangat lemah dalam hal persuasif. Jika diaplikasikan oleh *stakeholder* di lingkungan dinas pendidikan maka upaya menyampaikan beberapa kebijakan tentang implementasi program standar pendidikan maka pendekatan persuasif diasumsikan akan lebih adaptif untuk kelancaran semua pihak yang akan melaksanakannya di lapangan.

G. Elemen dan Efektivitas Strategi Komunikasi dalam Pendidikan

Dalam strategi komunikasi elemen penting yang harus ada dan menjadi standar strategi ketercapaian proses komunikasi perlu didefinisikan lebih awal. Hal ini bisa dilakukan oleh para komunikator yang dalam hal ini adalah *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidi-

kan dalam rangka melakukan proses komunikasi kebijakan tentang 8 standar nasional pendidikan. Elemen-elemen Penting yang dimaksud dalam rangka membangun strategi komunikasi menurut Sukarni (2012:1) mencakup:

> *(a) Definisikan dan formulasi sasaran komunikasi dengan menerapkan sistem Formulasi SMART, yaitu Specific, Measurable, Appropriate, Realistic dan Temporal (dalam kurun waktu tertentu) digunakan dalam program kesadaran tentang implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.(b) Memilih Kelompok Target, dalam pemilihan kelompok target, terdapat dua kelompok target: 1) Primary target groups,2) Secondary target groups. (c) Membuat pesan kunci/key messages bagi kelompok target, dengan mempertimbangkan alasan dilaksanakannya program, tujuan perubahan tingkat pengetahuan kelompok target dan bagaimana cara melakukan pesan yang disampaikan.*

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa elemen dalam sebuah strategi komunikasi harus ada dan difokuskan kepada upaya mendukung ketercapaian target bahwa semua pesan harus sampai pada pihak komunikator. Elemen-elemen penting dalam kajian strategi komunikasi di lingkungan dinas pendidikan difokuskan pada upaya pembentukan kelompok-kelompok perantara tersampaikannya kebijakan mulai dari tingkat dinas pendidikan hingga tingkat sekolah.

Dalam perkembangannya elemen strategi komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Dave Fleet (2012) dalam websitenya menyatakan bahwa:

> *Strategy where are you going, and why? (a) Audiences who are the key audiences?; (b) Announcement given the strategy, are you making anannouncement? What are you announcing?; (c) Messages what are you saying about the announcement? (d) Tactics how will you implement your strategy, both before, during*

and after the main announcement (assuming you have one)? (e) Issues what problems may you have to overcome.

Dari pendapat dia atas jelas bahwa strategi komunikasi dapat dilaksanakan jika dalam perencanaannya pihak komunikator sudah mendefinisikan siapa yang akan menjadi audiennya, kemudian bagaimana bicara kepada audien tersebut sehingga bisa diterima dengan baik. Demikian juga pesan apa yang akan disampaikan kepada mereka, setelah itu taktik apa yang akan dilakukan oleh komunikator sehingga dapat terlaksananya strategi komunikasi yang dimaksud serta mengenali tentang prediksi apa yang akan terjadi dari efek komunikasi yang akan dilaksanakan sehingga semuanya akan mendukung hasil dari penerapan strategi komunikasi yang dimaksud.

Jika menelaah masalah capaian target dalam suatu implementasi strategi komunikasi maka pembahasan dapat mengkaji lebih mendasar tentang apa yang dikemukakan oleh Phil Jones (2008), yang menegaskan bahwa:

"Communicating Strategy is designed to help you communicate your strategy in a compelling and effective way, and dramatically improve implementation and the resulting outcomes. It provides a clear framework for building a communication plan as well as practical information, techniques, tools, tips and exercises that can be applied to explain and deliver a complete and coherent message."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi komunikasi akan menjadi penolong Anda sebagai komunikator untuk memperoleh jalan atau cara yang lebih efektif sehingga dalam implementasinya akan mampu menghasilkan target yang lebih baik. Lebih lanjut ditegaskan bahwa strategi komunikasi ini akan dan harus mampu dibangun dan membangun sebuah perencanaan komunikasi sebaik mungkin berdasarkan informasi, teknik, peralatan atau media, serta

cara-cara terpilih yang dapat dilatihkan terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan secara lebih baik dengan isi pesan yang utuh.

Dalam konteks pendidikan maka strategi komunikasi dapat dipandang sebagai sub sistem penting ketika sebuah pesan harus disampaikan oleh pemangku kepentingan kepada semua warga pendidikan. Sebagaimana dalam program kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan standar nasional pendidikan maka pemangku kepentingan yang akan menjadi komunikasi harus mampu menempatkan dirinya sebagai komunikator yang bijaksana. Dengan demikian melalui strategi komunikasi maka peran sentral dari sebuah program kegiatan tertentu di lingkungan pendidikan dapat dijadikan suatu yang sentral kedudukannya, terutama dalam manajemen pendidikan secara sistemik. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Phil Jones (2012) Malcolm Frabor dalam http://jimclemmer.com, bahwa

> *Communication strategies, systems, and practices do play a central role in high-performance. Information, understanding, and knowledge are the lifeblood of the organizational body. A thoughtful and comprehensive communication strategy is a vital component to any successful change and improvement. The education and communication strategy sets the tone and direction of improvement efforts.*

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa strategi komunikasi merupakan suatu sistem yang praktis dan merupakan suatu yang sentral dalam keberhasilan proses komunikasi. Dalam konteks kelembagaan atau organisasi maka strategi komunikasi merupakan tubuh organisasi yang merupakan inti kehidupan organisasi yang memilikinya dan merupakan komponen vital menuju keberhasilan dan kesuksesan. Terlebih dalam bidang pendidikan maka strategi komunikasi ini merupakan bagian penting yang menjadi alat penggerak langsung ke mana arah keberhasilan pendidikan bisa diarahkan.

Keterkaitan antara dunia pendidikan dengan ilmu komunikasi memang tidak dapat dipisahkan, karena dalam proses pendidikan maka di dalamnya terdapat aktivitas komunikasi yang diperankan oleh masing-masing pihak dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Mulai dari aspek kebaikan, program, target dan unsur yang menjadi tujuan dari proses komunikasi semuanya diperankan oleh para komunikator dan komunikan komunikasi pendidikan. Maka dengan adanya kajian strategi komunikasi dalam perkembangannya pendidikan akan menjadi aktor utama ketika berbagai bentuk dan model strategi komunikasi tumbuh dan berkembang. Dalam kajian relasi antara dunia pendidikan dan ilmu komunikasi ini, maka Jim Clemmer's (2012) menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

> *Education and communication strategies influence the energy levels for change and improvement. Strong communications keep everyone focussed on goals and priorities while providing feedback on progress and the course corrections needed. Effective communication strategies, systems, and practices have a huge and direct effect on organization learning and innovation.*

Berdasarkan kajian Jim Clemmers (2012) maka pendidikan dan strategi komunikasi akan mampu menjadi faktor pengaruh kuat untuk melakukan sebuah perubahan. Kekuatan dari komunikasi ini akan menuntut semua orang untuk fokus pada target capaian yang diinginkan serta akan lebih cepat bagaimana melakukan perbaikan-perbaikannya jika terjadi suatu kendala. Lebih lanjut bahwa melalui komunikasi yang efektif maka pihak organisasi akan lebih cepat untuk mampu melakukan perbaikan dan inovasi dengan segera.

Berbicara masalah sistem komunikasi dalam konteks pembahasan di bidang manajemen kebijakan pendidikan maka akan menjadi sebuah *trend* baru bagi para pemegang kebijakan itu sendiri terutama bagi para eksekutif bahkan legislatif, ketika

mereka harus melakukan terobosan-terobosan baru sehingga masyarakat pendidikan siap menerima semua kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah yang dalam hal ini dunia pendidikan. Beberapa kajian penting dari strategi komunikasi dalam studi ini diharapkan mampu menemukan formulasi baru tentang strategi komunikasi yang efektif dalam membantu keberhasilan program pencapaian mutu pendidikan khususnya dengan merujuk kepada 8 standar pendidikan. Kajian tentang komunikasi yang efektif tentunya akan menjadi kajian penting juga bagi para *stakeholder* di lingkungan pendidikan. Sebagaimana dalam hal komunikasi efektif ini dijelaskan juga oleh Jim Clemmers (2012), bahwa:

> *Effective communication strategies, systems, and practices: (a) Deliver clear and consistent messages to all parts of the organization; (b) Are simple, direct, and fast with a minimal number of filters and interpreters; (c) Inspire and energize; (d) Are user-friendly, human, and personal; (e) Move information, experiences, learning, ideas, direction, and feedback equally well in all directions -up, down, and across the organization; (f) Provide multiple channels; (g) Are only possible in an atmosphere of trust and openness.*

Dari pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor utama dalam Strategi Komunikasi yang efektif secara sistem dalam praktiknya akan mampu memberikan kejelasan dalam hal: (a) Menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten untuk semua bagian organisasi; (b) Apakah yang sederhana, langsung, dan cepat dengan jumlah minimal filter dan interpreter (c) Inspire dan energi; (d) Apakah *user-friendly*, manusia, dan pribadi; (e) Penempatan informasi, pengalaman, pembelajaran, gagasan, arah, dan umpan balik sama baiknya ke segala arah atas, bawah, dan di seluruh organisasi; (f) Menyediakan berbagai saluran (g) Apakah hanya mungkin dalam suasana kepercayaan dan keterbukaan. Dari kajian

di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara elemen strategi komunikasi dan dunia pendidikan hingga sekarang cukup dinamis perkembangannya.

H. Konstruksi Pemikiran Tentang Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan atas kajian tantang pelayanan pendidikan teori dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fokus kajian ini, selanjutnya penulis mencoba untuk mengonstruksikan suatu kerangka pemikiran tentang pelayanan pendidikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

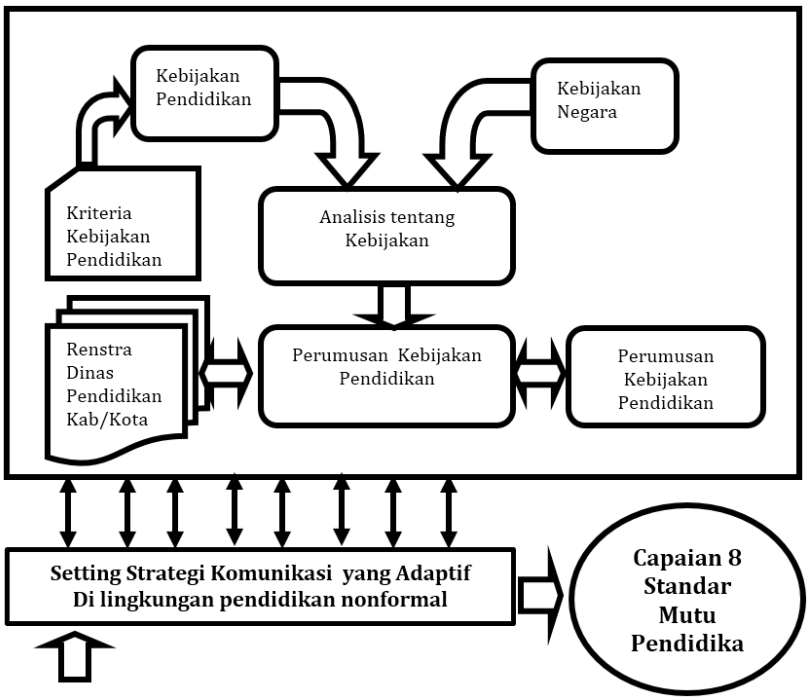

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Tentang Pelayanan Pendidikan

Dari kerangka pemikiran di atas maka diharapkan akan mampu melahirkan suatu model hipotetik yang merupakan cikal bakal dari model Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan, yang selanjutnya

akan digunakan uji revisi model melalui teknik dephi sehingga mampu menjadi model temuan pembahasan yang diharapkan.

Beberapa dukungan hasil dari studi pendahuluan mengenai beberapa studi yang berkenaan dengan bidang manajemen pendidikan maupun bidang komunikasi selanjutnya akan ditempatkan menjadi pisau analisis dalam proses validasi model strategi komunikasi kebijakan pendidikan yang diarahkan pada upaya pencapaian 8 standar pendidikan di wilayah kerja dinas pendidikan yang menjadi sasaran tempat pembahasan ini dilaksanakan.

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

BAB III

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan

1. Profil Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki Visi dan Misi yaitu *"Terwujudnya Masyarakat di Jawa Barat yang Cerdas dan Kompetetif Berbasis Agamis".* Visi Dinas pendidikan lebih menekankan pada aspek pengembangan sumber daya manusia yang transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi sumber daya manusianya kurang menuju masyarakat yang maju dan berkembang meng-aktualisasikan potensi sumber daya manusianya secara optimal. Selanjutnya untuk mewujudkan visi-visi tersebut maka Dinas Pendidikan ini memiliki Sejumlah Misi, yaitu sebagai berikut:

a. Memperluas akses bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan formal yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global serta mengacu kepada standar nasional pendidikan.

b. Melaksanakan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan.

c. Mewujudkan pemberdayaan kebudayaan yang mampu membangun aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan tetap menyelaraskan pada perkembangan sosial dan pengembangan teknologi budaya global sehingga bermanfaat untuk pembangunan dan karakter masyarakat.

d. Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda guna melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual serta memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan fasilitas keolahragaan

Kedudukan Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Dinas Pendidikan, yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pendidikan. Adapun Fungsi dari Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat, yaitu: (1) Merumuskan kebijakan dalam bidang pendidikan; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan; (3) Membina, melaksanakan tugas, dan mengevaluasi pendidikan;(4) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Program Kerja Dinas Pendidikan

Ada sejumlah program kegiatan yang diemban oleh Dinas Pendidikan, di antaranya:

a. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di

wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah dan masyarakat penyandang caca melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP satu atap.

b. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak *(software)* seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian, pengujian dan penyempurnaan sistem akreditasi;

d. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peran serta masyarakat;

e. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru;

f. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya

menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca *(literate society);*

g. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan;

h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

B. Strategi Komunikasi Pendidikan

1. Strategi Komunikasi Manajemen Kebijakan Pendidikan dalam Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan atas data hasil pembahasan mengenai proses komunikasi yang selama ini dilakukan oleh dinas pendidikan hingga sampai ke sekolah hanya dilakukan melalui jalur-jalur pendidikan secara formal baik itu dalam konteks layanan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi maupun dalam konteks informal untuk pembinaan layanan operasional pendidikan mulai dari tingkat Dinas Kabupaten, UPTD hingga ke level sekolah. Kondisi ini kadang membuat para ujung tombak layanan pendidikan di sekolah menjadi kurang seimbang dan kurang dapat memberikan keyakinan akan perubahan kompetensi yang diharapkan, mengingat proses komunikasi yang dilakukan kurang begitu intensif dan sesuai dengan kondisi nyata saat ini yang dimiliki oleh para guru yang kenyataannya kurang begitu sesuai.

Dalam konteks di atas menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dalam rangka memberikan suasana siap untuk proses "persuasif" atau ajakan kepada guru untuk mampu melakukan perubahan-perubahan dan mampu mengikuti tuntutan dan standarisasi kompetensi melalui jalur pendidikan formal baru pada level kebijakan saja dan informasi yang masih ringan-ringan saja, artinya komunikasi yang tidak intensif sebagaimana dinyatakan informan maka hasilnya tidak mampu memberikan perubahan atau ajakan yang mampu dan dapat diterima dengan cepat serta mendalam oleh para guru di lapangan.

Di sisi lain yang menjadi *driving force* dalam konteks strategi komunikasi yang selama ini masih diusahakan oleh dinas pendidikan kabupaten, tiada lain menggunakan pendekatan formal dalam bentuk penanaman sikap kepemimpinan yang ditanamkan oleh para pimpinan di lingkungan dinas sampai pada pengawas dan kepala sekolah. Walaupun demikian masih ada unsur atau pihak-pihak tertentu di level dewan pendidikan yang belum optimal dalam penyelenggaraan program ini. Dalam konteks pembahasan ini strategi komunikasi yang diharapkan mampu terwujud secara internal sekolah minimal maka diharapkan semua pihak yang terlibat mampu untuk melaksanakan tugas masing-masing secara optimal. Kondisi di lapangan seperti ini dapat penulis paparkan berdasarkan pendapat informasi kunci dari unsur Dinas Pendidikan.

Dari kondisi internal terlihat bahwa aspek *leadership* atau kepemimpinan di lingkungan pendidikan sebagaimana yang berkembang saat ini di lingkungan dinas pendidikan sangat memberikan dampak besar terhadap kondisi yang diharapkan yaitu para pemimpin mampu menanamkan kebaikan atas nilai-nilai kualitas yang distandarkan dalam upaya mencapai target standar yang dimaksud. Fakta tersebut terlihat dari ungkapan dalam bentuk "Ilustrasi" bahwa pemimpin yang cenderung

tidak memiliki kompetensi yang tepat maka akan menjadikan bidang garapan kerjanya tidak berhasil, demikian juga dengan profil kompetensi yang dimiliki tinggi namun ditempatkan tidak sesuai maka dampaknya juga tidak dapat dengan cepat mampu merubah kondisi yang diharapkan. Sebagaimana diungkapkan bahwa sekarang ini banyak pemimpin yang tidak proporsional atau menjadi pemimpin karena kedekatan saja dengan kolega atau pimpinan di atasnya, dengan demikian ketika terjadi tuntutan profesionalitas tinggi dan kompetensi yang diharapkan maka pemimpin tersebut tidak dapat mencapai apa yang diharapkan oleh semua pihak.

Selanjutnya, jika dilihat dari kondisi eksternal maka temuan dari lapangan dalam hal ini lingkungan Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa Strategi komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan di antaranya melalui berbagai upaya baik yang sifatnya prosedural maupun pragmatis atau mendadak sesuai dengan kebutuhan layanan yang harus segera dilakukan.

Kondisi saat ini tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan hingga sampai ke sekolah, cenderung dilakukan dengan melalui berbagai bentuk birokrasi yang diwujudkan melalui himbauan, surat undangan, surat panggilan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pihak dinas atau kementerian sekalipun kemudian sampai di provinsi, yang selanjutnya masuk ke tingkat kab/kota dan akhirnya ke UPTD hingga ke sekolah.

Kunci di atas menunjukkan bahwa kondisinya sampai sekarang bahwa peran dari komunikasi yang secara tidak langsung ditempatkan sebagai strategi dalam menyampaikan beberapa himbauan, perintah, rujukan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai pada level sekolah, minimal seperti apa yang dikemukakan di atas. Selanjutnya bagaimana ketika ada sebuah perundangan

menyangkut pendidikan seperti mengenai kebijakan kenaikan pangkat, perubahan kurikulum, dan sejenisnya maka transformasi informasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi komunikasi yang selama ini bisa dilakukan para *stakeholder* pemangku kepentingan, di antaranya dikemukakan oleh informan kunci yaitu sebagai berikut.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh para kepala sekolah dan guru di kelas ternyata lebih cenderung mengutamakan peran komunikator yang secara optimal berupaya menegaskan pesan-pesan pokok yang berhubungan dengan materi pelajaran. Di mana materi pokok ini merupakan salah satu dari indikator standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan standar *isi* dan *proses.* Ketika para kepala sekolah dan guru berupaya untuk memaksimalkan layanan pendidikan yang berhubungan dengan kedua standar tersebut maka strategi komunikasi yang dilakukan adalah strategi komunikasi yang sama-sama saling menguntungkan. Salah satu strategi komunikasi ini mengadopsi dari model komunikasi rasional. Melalui strategi ini maka peran sebagai guru mapel tertentu dapat diperankan oleh guru dengan mapel lainnya sehingga orientasi komunikasi yang ingin diwujudkan adalah komunikasi yang menguntungkan satu sama lain. Kondisi ini menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi standar kualitas layanan pendidikan yang bertujuan mewujudkan standar isi dan standar proses dalam 8 standar nasional pendidikan yang dilakukan pada level persekolahan.

Dilihat dari fenomena tentang standar kualitas layanan yang lainnya dari 8 standar nasional pendidikan yaitu standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, ternyata kondisi yang terjadi di lingkungan kerja Dinas Pendidikan sampai persekolahan menunjukkan bahwa kondisinya masih memerlukan pembinaan dari segi pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.

Bagaimanakah upaya pemenuhan tugas mengajar dengan kondisi jumlah dan kualitas tenaga pendidik saat ini. Solusinya untuk mengatasi itu, di antaranya tetap merujuk pada standar pemenuhan sebagaimana tercantum dalam Permendiknas. Jadi dengan adanya PERMEN bersama 5 menteri, secara otomatis akan didistribusikan oleh kepala sekolah.

Selanjutnya mengenai gambaran strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas UPTD pada tingkat sekolah dalam rangka capaian 8 standar nasional pendidikan, menurut informasi Kunci dari di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa *proses evaluasi dina strategi komunikasi, yang dilakukan dinas pendidikan dalam kerangka 8 standar pendidikan ini di SMA."* Dikatakan lebih lanjut bahwa Strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan UPTD yang selama ini dirasakan menurut Informan Kunci masih memerlukan evaluasi.

Dari pendapat informan di atas menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh UPTD selama ini juga di dalamnya termasuk dalam bentuk evaluasi, artinya ketika sebuah kebijakan atau anjuran dari pimpinan atau level provinsi, kabupaten/kota, UPTD bahkan hingga satuan pendidikan menunjukkan adanya suatu proses evaluasi. Artinya dengan melalui evaluasi tersebut maka strategi komunikasi yang selama ini diwujudkan dalam berbagai pembekalan, lokakarya, *workshop* akan bisa diukur untuk aspek keberhasilan perencanaan kegiatannya.

2. Manajemen Kebijakan Pendidikan yang Dikomunikasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

Kebijakan-kebijakan dinas pendidikan pada tingkat UPTD pada dasarnya sudah masuk kepada tataran teknis. jika dianalisis berdasarkan tupoksi dari tata urut kedinasan bahwa UPTD masih juga memegang peran sebagai pemangku kebijakan

untuk beberapa target capaian program kegiatan di tingkat dan wilayah binaan Kecamatan tertentu. Termasuk dalam kaitannya dengan sistem komunikasi dalam hal ini bahwa kepala UPTD di lingkungan dinas pendidikan merupakan corong penting dalam rangka menyampaikan aturan, kebijakan dan upaya mengkoordinasikan semua informasi yang bersumber dari tingkat provinsi adalah UPTD tingkat Kecamatan.

Jika ditelaah berdasarkan upaya capaian target dari 8 standar Nasional Pendidikan ini maka yang menjadi target dari aspek manajemen penyelenggaraan semua program pendidikan pada tingkat UPTD ini sudah barang tentu ditujukan pada upaya pencapaian 8 Sandar tersebut. Ada ciri khas dari aspek manajemen yang banyak diimplementasikan oleh pihak UPTD yaitu aspek "Pengontrolan" atau *controling* dan *Evaluating*, di mana kedua aspek ini sangat strategis mengingat semua kegiatan sudah pasti harus dikontrol sampai sejauh mana tercapai atau tidak, demikian juga dengan pemberian penilaiannya khusus apakah sudah sesuai atau belum. Dari kajian komunikasi kondisi empirik ini menunjukkan bahwa aspek strategi komunikasi dalam hal ini sangat penting guna menunjukkan bahwa semua kebijakan yang berkenaan dengan pengontrolan dan evaluasi ini akan menjadi fokus kajian bagi semua elemen khususnya di lingkungan pendidikan.

a. Analisis Internal Terhadap Kebijakan Dinas Pendidikan

Sejumlah kebijakan Dinas Pendidikan yang secara internal untuk kepentingan pelaksanaan program sekolah misalnya maka harus menerbitkan surat pemberian ijin. Semua kebijakan internal yang dikomunikasikan kepada seluruh pendidik akan dilakukan dengan segera. Mengingat kebijakan internal ini akan diadopsi oleh sejumlah pimpinan, staf. Demikian juga pada level pengawas, kepala dinas UPTD,

kepala Sekolah, sampai siswa untuk dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik.

b. Analisis Eksternal Terhadap Kebijakan Dinas Pendidikan

Beberapa aspek dalam manajemen kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam kerangka strategi komunikasi di antaranya mencakup manajemen kebijakan yang berhubungan dengan:

1) Studi kelayakan dan analisis program pendidikan secara keseluruhan
2) Aspek-aspek implementasi setiap program dinas pendidikan
3) Kebijakan rencana strategis dinas pendidikan yang mencakup komponen tujuan, materi, metode, SDM, sistem evaluasi dan tindak lanjut
4) Kebijakan dalam hal supervisi dan evaluasi semua program kerja
5) Kebijakan prestasi kerja di kalangan staf Dinas Pendidikan
6) Daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan , UPTD, dan sekolah;
7) Pembinaan staf dan pimpinan yang masih rutin dilaksanakan
8) Pengembangan rencana strategi untuk tahun ke tahun berdasarkan atas kebijakan pimpinan;
9) Aspek pembiayaan program berdasarkan renstra yang dimiliki Dinas Pendidikan;

Dari ke-9 bentuk-bentuk kebijakan yang telah dikomunikasikan kepada seluruh lembaga pendidikan yang berada di masyarakat. Demikian pula dengan kebijakan yang sifatnya mengikat di lingkungan kantor diharapkan mampu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Faktor atau issue kebijakan pembangunan pendidikan yang sedang

dikomunikasikan oleh dinas pendidikan hingga level sekolah merupakan suatu hal yang memang rutin, namun kondisinya perlu dinamis.

Implementasi akan dilakukan oleh para pengawas kepada Sekolah-sekolah binaannya kemudian dilaksanakan oleh Sekolah dalam bentuk Rencana Kerja Sekolah (RKS). Selama pelaksanaan program maka 8 standar nasional akan menjadi indikator atau acuan untuk aspek keberhasilan RKS tiap sekolah, hingga sampai pada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengawas yang hasilnya dilaporkan kepada dinas pendidikan. Dibalik proses ini sudah barang tentu masalah strategi akan dipengaruhi oleh masalah anggaran pendukung implementasi program yang harus sesuai dengan target dan daya dukung SDM dengan indikator terlaksana, ditunda, atau terlaksana dengan target maksimal. Dengan demikian sumber daya sekolah dan sumber daya SDM pengawas akan menentukan strategi komunikasi yang ada di dalamnya.

3. Implementasi Perencanaan dan Strategi Komunikasi Pendidikan

Berikut adalah pembahasan yang berhubungan dengan daya dorong dalam diri para *stakeholder* ketika akan mengimplementasikan strategi komunikasi dalam rangka keberhasilan program standar nasional pendidikan. Dari temuan menunjukkan bahwa dinas pendidikan itu berkonsentrasi pada pendidikan dasar sembilan tahun sehingga mungkin itu lebih banyak diperhatikan, karena untuk SMA dan SMK itu lebih banyak dari masyarakat, baik keuangan dan sebagainya. Dari aspek fasilitas yang ada dalam rangka mendukung standar isi dan standar proses untuk 8 standar itu hanya rekomendasi saja yang diberikan. Kondisi ini terjadi karena mungkin dinas

pendidikan juga dari pihak kabupaten telah memahaminya dan mengerti. Dukungan anggaran kebanyakan adalah dana bantuan dari provinsi dan pusat. Hanya saja untuk pihak SMA dan SMK, dinas pendidikan sudah menempatkan pengawas Pembina yang bertugas untuk memacu pelaksanaan 8 standar pendidikan itu.

Anggaran rutin dan dana penunjang pendidikan dari pihak dinas kabupaten selama ini tidak ada. Dana RKB, dan rehab untuk sekolah negeri adalah dana yang berasal dari pusat yang dititipkan ke PEMDA, Kalau untuk sekolah swasta langsung masuk ke rekening sekolahnya dalam bentuk Blokgrant Karena aturannya bahwa untuk negeri harus masuk uang PEMDA, tapi untuk swasta, itu adalah kebanyakannya BANSOS, dan BLOKGRANT, tapi kalau untuk negeri biasanya suka ditenderkan.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa proses penilaian yang dilakukan terhadap kinerja kepala sekolah oleh dinas pendidikan harapannya bisa dilakukan setiap tahun. Karena hal ini sangat penting dan bisa menjadi suatu awal yang baik untuk peningkatan kontrol kinerja dinas pendidikan dalam rangka menyukseskan implementasi dari standar proses dan standar isi dari keseluruhan implementasi 8 standar nasional pendidikan. Jika melihat jawaban dari para responden maka ada suatu sistem periodisasi. Periodisasi itu penting dan harus dilaksanakan, tetapi harapannya mampu menjadi salah satu dari kebutuhan *counter-attack* dari sumber daya yang kurang optimal di lapangan. Suatu kesalahan besar, kenapa Dinas Pendidikan tidak melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Karena di dalam undang-undang harus ada penilaian kinerja kepala sekolah, setiap tahun juga tidak pernah dinilai.

Bahwa strategi komunikasi memang sesuatu yang memerlukan kompabilitas tinggi dan penguasaan ilmu komunikasi dasar hingga yang lebih tinggi. Dalam konteks pembahasan ini

maka apa yang dirumuskan dalam 8 standar nasional pendidikan sudah barang tentu menuntut adanya kemampuan dari *stakeholder* dunia pendidikan yang mampu meramu berbagai hasil analisa kebijakan, program, isi, strategi, media pendekatan dan target capaian yang harus dicapai oleh tiap level.

Implementasi strategi komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program SNP khususnya standar isi cukup berjalan sesuai dengan dukungan dari faktor lain yang dimiliki oleh semua sekolah yang menjadi binaan Dinas Pendidikan. Sebagai kunci kejelasan dari isi mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan oleh dinas pendidikan bersama-sama dengan semua sumber daya yang dimiliki sekolah, maka semuanya sudah tertuang dalam Rencana Strategis dinas pendidikan yang kemudian diterjemahkan dan diimplementasikan dalam bentuk satuan kegiatan di sekolah-sekolah. Selanjutnya untuk memenuhi tuntutan standar proses, maka selama pelaksanaan program dinas pendidikan selalu mengkomunikasikan dengan efektif kepada semua pengawas dan sekolah binaannya secara rutin. Dari aspek proses ini ada semacam pembinaan dan fasilitasi secara rutin oleh pengawas kepada semua sekolah-sekolah yang sedang berusaha meningkatkan mutu layanannya. Bahwa kunci keberhasilan pencapaian antara standar isi dan proses akan tergantung kepada aspek dukungan anggaran dan dukungan nilai-nilai kebersamaan.

Selanjutnya mengenai keterlibatan dari Komite Sekolah dalam implementasi SNP di wilayah Dinas Pendidikan juga terlihat cukup aktif. Sebagaimana dijelaskan sebagaimana yang uraikan pada. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa program pembelajaran yang dikembangkan di sekolah sebagai wujud dari standar isi cukup jelas demikian juga dengan proses PBM yang dilaksanakan cukup memberikan pengalaman yang jelas bagi keberhasilan program dari 8 SNP yang selama ini

disosialisasikan dan diimplementasikan secara bersama-sama di semua sekolah.

Implementasi dari strategi komunikasi yang dibutuhkan ketika akan melakukan sosialisasi maupun pelaksanaan sejumlah program 8 SNP, khususnya untuk standar isi dan standar proses, maka untuk level persekolahan biasanya dilakukan melalui PKG. Setelah PKG ini terlaksana dengan lancar maka implementasi program ditingkat sekolah akan dapat diukur dari aspek realisasi proses pembelajaran, pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan sumber daya sekolah dalam rangka pencapaian standar isi dan standar proses.

Sebagai bentuk kongkret dari implementasi strategi komunikasi untuk standar isi, di antaranya dimulai dari inventarisi dari sejumlah program yang dikembangkan oleh tiap sekolah. Susunan program yang di inventarisi diambil dari Rencana Program Sekolah (RPS). Ada sejumlah program RPS yang dikembangkan oleh tiap kelompok kerja sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Dalam RPS tersebut ada kelompok program rutin untuk operasional layanan pembelajaran, ada program strategis yaitu program pilihan tiap sekolah yang diunggulkan, ada program strategis, yaitu program dari pihak sekolah yang berorientasi mendukung ketercapaian program operasional rutin, seperti pemberian beasiswa, kelas tambahan, bimbingan belajar oleh guru dan penyediaan buku pelajaran untuk siswa.

Selanjutnya untuk standar proses, implementasinya didukung oleh strategi komunikasi yang edukatif, di mana standar proses yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan di antaranya dilakukan bersama-sama dengan para pengawas. Para pengawas memberikan standar implementasi pembelajaran, pembinaan kurikulum dan program ekstrakurikuler kepada setiap sekolah. Bersama-sama dengan para guru, pengawas

mencoba menerjemahkan bagaimana pembelajaran bisa dilaksanakan dengan optimal, maka para guru mulai dengan melakukan analisis kebijakan kurikulum, menyusun RPP, dan melaksanakan PBM di kelas. Selama itu maka para pengawas akan melakukan supervisi dan pembinaan agar kualitas pembelajaran yang dikembangkan guru menjadi berkualitas. Jadi strategi komunikasi yang dilakukan adalah strategi mekanistik. Berdasarkan atas implementasi dari standar isi dan standar proses dalam bentuk kegiatan tersebut, peran strategi komunikasi akhirnya menjadi suatu kebutuhan bersama baik para pengawas sebagai perpanjangan dinas pendidikan maupun para guru yang menjadi wakil dari pihak sekolah.

Melihat kondisi seperti di atas ternyata level sekolah akan menjadi tempat final di mana implementasi strategi komunikasi dapat dikatakan berhasil atau gagal. Sebagaimana penulis analisa dari sejumlah pendapat stakeholder di atas menunjukkan bahwa komponen pembelajaran, strategi pembelajaran, sasaran pembelajaran di tiap sekolah akan menuntut strategi komunikasi yang berbeda satu sama lainnya.

4. Masalah dalam Implementasi Perencanaan dan Strategi Komunikasi Pendidikan

Permasalahan yang selama ini ditemukan selama program perencanaan implementasi dari manajemen pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal. Hal ini dilakukan khususnya dalam konteks strategi komunikasi dan kebijakan manajemen pendidikan di dinas pendidikan Evaluasi dalam suatu tahapan proses komunikasi yang dilakukan dalam sebuah institusi pendidikan sangat penting yang sangat dibutuhkan guna memperoleh informasi mengenai ketepatan sasaran dalam upaya memperlancar implementasi program

kerja. Sebagaimana yang banyak dilakukan di lingkungan dinas Pendidikan baik pusat maupun daerah bahkan sampai sekolah, ternyata proses komunikasi dengan menggunakan strategi komunikasi tertentu sangat banyak praktiknya dan ini telah memberikan dampak yang cukup strategis dalam implementasi program kebijakan menjadi program kegiatan di level operasional.

Berbicara level operasional dalam suatu rangkaian komunikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan merupakan suatu yang mendasar adanya. Akan tetapi proses implementasi program kegiatan yang dikomunikasikan oleh pimpinan hingga sampai pada pelaku operasional di sekolah keberhasilannya akan terlihat jika mereka dievaluasi. Adapun yang akan menjadi sasaran evaluasi dalam kajian proses komunikasi dengan strategi komunikasi tertentu yang diterapkan oleh pimpinan di tingkat UPTD akan ditentukan oleh evaluasi secara praktis yang akan dilakukan atau diberikan penilainya oleh pihak sekolah.

Demikian halnya dalam temuan pembahasan ini khususnya mengenai strategi komunikasi yang telah dilakukan pimpinan UPTD mengenai kebijakan dan implementasi program yang merujuk pada 8 standar nasional pendidikan ternyata tidak terlepas dari sasaran evaluasi. Dalam arti bahwa evaluasi yang ditujukan yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang telah melakukan dan mempraktikkan strategi komunikasi yang biasnya dilakukan oleh pimpinan di lingkungan UPTD hingga kepada pihak sekolah.

Dalam konteks hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pihak UPTD selalu mengontrol terhadap semua kebijakan atau instruksi dari pimpinan dan level pengawas ketika akan dan telah mengkomunikasikan semua kebijakannya kepada pihak sekolah. Indikator evaluasi dari strategi komunikasi yang

telah dilakukannya biasanya dengan cara memberikan form isian mengenai sejumlah ketercapaian sasaran yang mampu menghasilkan prestasi oleh level sekolah. Ketika prestasi atau capaian kegiatan mampu dicapai oleh level sekolah berdasarkan instruksi program dari UPTD hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dan pengawas dari UPTD adalah cukup berhasil.

Telaah mengenai evaluasi strategi komunikasi yang biasa dilakukan oleh UPTD di lingkungan binaan Dinas pendidikan menunjukkan bahwa di wilayah binaan masing-masing dinas pendidikan menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan cenderung menjadi suatu prosedur kebijakan pimpinan dan menjadi acuan kerja bagi pimpinan UPTD dan pimpinan sekolah. Pimpinan UPTD akan menggunakan semua acuan program kerja yang berasal dari tingkat kabupaten sebagai acuan terhadap indikator keberhasilan program yang diinstruksikannya. Adapun di level persekolahan maka evaluasi terhadap strategi komunikasi ditunjukkan dalam bentuk proses monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan tahapan program kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Sistem evaluasi yang berorientasi pada produk kegiatan semuanya ditujukan pada indikator 8 standar nasional pendidikan. Sebagai contoh untuk standar isi maka dalam RKS kepala sekolah berusaha untuk menyesuaikan program kegiatan banyak mendukung pada aspek capaian target materi yang dapat disampaikan kepada para guru dan siswa.

Dalam standar proses maka sistem evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi program kerja sekolah yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan ini di antaranya terlihat ketika pihak sekolah memberikan layanan terhadap para guru dan para muridnya. Ketika layanan diterima oleh sasaran baik dari kepala sekolah kepada guru, dan selanjutnya dari guru kepada

siswanya, serta perubahan-perubahan nampak pada diri guru dan siswa hal ini bisa dikatakan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan cukup efektif. Dengan demikian keberhasilan strategi komunikasi yang dilakukan dapat dibuktikan. Temuan ini tidak terlepas dari kemampuan pimpinannya dalam memberikan kesempatan kepada para pelaku komunikasi untuk melakukan refleksi atas semua tindakan yang diberikan kepada pihak sasaran.

Dalam konteks standar ketenagaan ini merupakan suatu yang sangat penting namun dapat saja sederhana secara analisis personal, di mana kompetensi pimpinan UPTD, pengawas sampai sekolah sebenarnya tidaklah rumit dan sulit namun cukup sederhana. Kajiannya dapat dirasakan ketika level pimpinan tersebut mampu duduk bersama, mendengarkan instruksi, melaksanakan, mengawas, dan melaporkan serta menyampaikan keberhasilan program kegiatan secara verbal. Demikian juga dalam konteks standar evaluasi, maka strategi komunikasi yang dinilai pada level UPTD sampai ke sekolah ini dapat dilihat berdasarkan sejumlah indikator-indikator yang digunakan oleh UPTD dalam memperoleh data dan informasi dari pengawas dan sekolah. Biasanya untuk standar ini mulai dianalisis dari analisis kebutuhan evaluasi, perumusan kisi-kisi instrumen evaluasi, penetapan objek sasaran evaluasi, dan mengembangkan instrumen evaluasi, serta melakukan uji coba revisi, dan akhirnya menerapkan instrumen dalam rangka penggalian data, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data, dilanjutkan dengan tabulasi data, analisis data, dan interpretasi data hingga diperoleh kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun evaluasi terhadap strategi komunikasi yang dilakukan untuk pihak UPTD hingga persekolahan yang ditujukan pada standar lulusan dari telaah 8 SNP ini di antaranya dapat

dilihat pada tahapan ketika mereka melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional dan pelaporan kegiatan oleh tiap sekolah. Demikian juga ketika pengawas memberikan pembinaan kepada para guru di sekolah sasaran binaannya maka proses evaluasi sebagai salah satu indikator dalam 8 SNP ini dilakukan dengan tujuan menilai strategi komunikasi yang dilakukan dalam rangka atau selama proses pembinaan, seperti bimtek, workshop, seminar, dan pendampingan yang biasa dilakukan oleh UPTD.

Dari Fenomena yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi ini merupakan suatu yang unit dan penting adanya proses evaluasi terhadap semua yang direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan ditindaklanjuti. Sehingga ketika program 8 standar nasional pendidikan terlihat dan terimplementasikan di tingkat mana pun, sebagaimana dalam hal ini hingga tingkat kelas maka indikator keberhasilan akan dapat dilihat pada diri siswa.

Fenomena yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan evaluasi implementasi, dan keberhasilan program 8 standar nasional pendidikan dilakukan melalui suatu badan inspeksi atau tim Monev (monitoring dan evaluasi) yang telah disiapkan sejak awal. Tim Monev ini kadang terdiri atas sumber daya yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, pengawas, dan juga guru, serta unsur UPTD itu sendiri.

Dalam konteks strategi komunikasi atau cara-cara pihak dinas pendidikan mengkomunikasikan sejumlah kebijakan-kebijakan berkenaan dengan implementasi dan target capaian 8 standar pendidikan ini maka secara kongkret dilakukan melalui penjadwalan yang sistematis. Dari sejumlah program yang merujuk pada upaya pencapaian target seluruh standar pendidikan pihak dinas melakukan perencanaan pemantauan dalam bentuk kaji tindak melalui tim Bina Program yang terdiri atas Kasi Dikdas, Kasi Dikmen dan Ketenagaan yang

bersama-sama dengan stafnya melakukan analisis kebutuhan atas target capaian setiap UPTD. Melalui UPTD inilah maka semua kebutuhan penilaian dan keberhasilan program layanan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada dirumuskan dan dijadikan indikator keberhasilan masing-masing standar melalui kinerja yang ditunjukkan oleh pihak UPTD.

Di lingkungan UPTD itu sendiri kondisinya menunjukkan kultur manajemen yang cukup terkontrol dan dinamis, mengingat UPTD merupakan satuan dinas pendidikan yang paling dekat dengan unsur dan level persekolahan. Dengan demikian dalam kerangka implementasi program 8 standar nasional pendidikan, pihak SDM di lingkungan UPTD yang terdiri atas Kepala UPTD, Pengawas yang rata-rata berjumlah 12-18 orang, serta staf yang rata-rata berjumlah 12 orang. Adapun tugas-tugas dari UPTD memberikan dan melakukan koordinasi mengenai sejumlah kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau pengawas. Dengan demikian strategi komunikasi yang dilakukan kepala UPTD memang kebanyakan dilakukan secara *face to face*.

Adapun tugas dari perangkat tim yang biasanya melakukan proses evaluasi atas semua kebijakan yang berhubungan dengan semua implementasi program dinas pendidikan tingkat kabupaten yang mendukung pencapaian 8 standar nasional pendidikan di antaranya dikemas dalam bentuk tim Bintek dan Monev. Kedua tim ini menjadi perangkat penting dan masih membudaya di lingkungan *stakeholder* dinas pendidikan kabupaten dan sekitarnya. Ketika mereka melakukan Bintek maka selama itu tim dari dinas pendidikan melakukan evaluasi atas keberhasilan pesan-pesan yang disampaikan kepada para pengawas, kepala sekolah. Maka proses evaluasi inilah yang menurut penulis dapat diadaptasikan sebagai bentuk evaluasi atas strategi komunikasi yang telah diterapkan oleh tim bintek

atas semua program dan implementasi kegiatan hingga mampu sampai dan dilaksanakan oleh pelaksana yang berada di bawahnya. Demikian juga ketika mereka melakukan monitoring dan evaluasi, maka kegiatan ini juga dilakukan sebagai langkah dalam mengevaluasi keberhasilan strategi komunikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun demikian ada sedikit permasalahan di mana petugas bintek dan money yang ditugaskan oleh pihak pimpinan mungkin saja tidak seluruhnya terlibat dalam kegiatan sosialisasi (komunikasi) kebijakan implementasi atas program 8 standar nasional pendidikan, melainkan personal yang baru lagi. Kondisi seperti ini kadang masih terus dianut oleh Dinas Pendidikan guna mengedepankan aspek objektivitas dalam melakukan pengawasan, dan evaluasi kepada para implementator kebijakan hingga level sekolah mengenai sejumlah program dinas pendidikan yang harus dilaksanakan dengan baik.

C. Tinjauan Ilmu Komunikasi dan Upaya Perbaikan Perencanaan Pendidikan

Jika dilihat dari tinjauan ilmu komunikasi khususnya strategi komunikasi sebagaimana yang ditelaah dalam pembahasan ini, maka fenomena yang ditemukan seperti di atas pada dasarnya tidak semuanya mesti dipaksakan sama atau berbeda. Dalam kajian strategi komunikasi aspek yang terpenting untuk dapat dilakukan dan ditinjau ulang atas dampak atau *effect* yang terjadi adalah perubahan perilaku, pengetahuan dan sikap pada diri *komunikan* atau *receiver* dari proses komunikasi yang diikutinya. Bentuk evaluasi atas strategi komunikasi yang telah dilakukan untuk level kebijakan yang berasal dari pimpinan dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan, maka bentuknya dilakukan melalui *Review* atas laporan yang berisi target capaian dari 8 standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh tingkat pengawas dan sekolah.

1. Evaluasi Tingkat Pengawas

   Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa evaluasi atas strategi komunikasi dilakukan pada saat para pengawas memberikan laporan dan melakukan presentasi atas semua capaian dari program binaannya yang diberikan kepada level sekolah. Bentuk dari bukti evaluasi hasil strategi komunikasi ini biasanya ditunjukkan melalui jumlah prosentase kebijakan program yang direncanakan dengan yang dilaksanakan dan berhasil memberikan manfaat bagi para implementator ditingkat persekolahan. Dengan demikian aspek perubahan perilaku berdasarkan kebijakan dan capaian target program kerja sekolah atas dasar kebijakan implementasi 8 standar nasional pendidikan menjadi pertimbangan penting bagi penulis dalam menentukan keberhasilan strategi komunikasi yang sudah dilaksanakan.

2. Evaluasi Tingkat Persekolahan

   Evaluasi atas implementasi strategi komunikasi jenjang berikutnya yaitu pada tataran persekolahan dilakukan oleh pengawas kepada tingkat sekolah, di mana dampak dari kebijakan kepala dinas dalam bentuk program kegiatan, kemudian oleh pengawas difasilitasi dan diberi pembinaan, arahan untuk aspek efisiensi anggaran, dan efektivitas capaian tujuan program kegiatan menjadi penting. Tingkat sekolah memiliki Rencana Kerja sekolah dan Rencana Anggaran Belanja Sekolah, dengan demikian daya serap anggaran berdasarkan implementasi program kegiatan sekolah merupakan sarana dalam proses evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak pimpinan dinas pendidikan melalui para pengawasnya. Dengan demikian evaluasi strategi komunikasi pada level ini sama dengan evaluasi keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan sejumlah program kegiatannya yang

telah direncanakan dalam RKS berdasarkan dukungan kebijakan dari para pengawas satuan pendidikan. Banyak ketidakjelasan implementasi atau kurangnya dukungan implementasi program kerja sekolah menjadi indikator kurang berhasilnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan melalui para pengawasnya.

3. Evaluasi Tingkat Kelas

Evaluasi atas strategi komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan pada dasarnya akan dapat dilihat juga dari level strategi komunikasi hingga tingkat kelas. Di lingkungan kelas yang telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dinas pendidikan melalui binaan pengawas dan kepala sekolahnya maka akan dapat dilihat dari berhasilnya sejumlah program kurikuler mata pelajaran atau pokok materi pelajaran yang tersampaikan oleh guru kepada siswanya. Banyak guru yang merasa bahwa capaian 8 standar nasional pendidikan ini merupakan tanggung jawabnya secara miniatur dilevel kelas, kenapa demikian karena di kelas semua standar nasional ini dapat dirasakan dalam bentuk pembelajaran yang dilaksanakannya dan memberikan dampak kepada keberhasilan siswa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Sebagai contoh menurut temuan selama di lapangan menunjukkan ada sejumlah guru yang menyatakan bahwa standar isi dapat dilihat dari materi yang mereka sampaikan kepada siswanya. Kemudian standar proses adalah pembelajaran yang mereka laksanakan di kelas, standar kualifikasi tenaga pendidik dapat ia rasakan oleh dirinya sendiri yang merasa bahwa ia adalah guru yang siap dan profesional, standar lulusan adalah indikator berhasil tidaknya siswa-siswa mereka dalam menembus ujian-ujian yang diberikan, standar keuangan dapat ia rasakan dari segi kesiapan daya dukung dan tingkat pengadaan sumber dan bahan belajar yang mereka

miliki, standar sarana dan prasarana dapat ia jelaskan dan rasakan ketika ia melaksanakan pembelajaran secara maksimal dan ideal karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

4. Evaluasi Tingkat Siswa

   Evaluasi strategi komunikasi kebijakan dinas pendidikan mengenai implementasi 8 standar nasional pendidikan pada dasarnya dapat penulis temuan pada level siswa. Siswa sebagai produk akhir dalam sebuah rangkaian penyelenggaraan pendidikan hendaknya menjadi sasaran yang harus banyak diperhitungkan, termasuk dalam kajian strategi komunikasi. Binaan kepala dinas pendidikan dalam bentuk strategi komunikasi tentang kebijakan implementasi 8 standar nasional pendidikan hingga sampai kepada pengawas, pengawas kepada kepala sekolah, dan sekolah kepada guru, maka ujungnya adalah guru kepada siswanya. Semuanya akan terlihat berhasil jika para siswa mampu mencapai prestasi yang menjadi salah satu standar yang harus dicapai dalam 8 standar nasional pendidikan yaitu standar lulusan. Dalam konteks ini maka keberhasilan strategi komunikasi yang dievaluasi melalui keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bahkan menjadi lulus dengan nilai yang baik merupakan indikator yang realistis dari sebuah keberhasilan atas strategi komunikasi yang telah dilakukan mulai dari pimpinan dinas pendidikan hingga gurunya.

Dari keempat level evaluasi atas keberhasilan strategi komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan menunjukkan suatu stratum atas tingkatan evaluasi yang dapat dijadikan standar evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program implementasi 8 standar nasional pendidikan. Stratum itu berdasarkan atas strata ditingkat evaluasi dinas pendidikan yang melibatkan pejabat bintek dan monev, stratum

evaluasi strategi komunikasi pada level pengawas, stratum evaluasi strategi komunikasi pada level, persekolahan, stratum pada level kelas, dan stratum evaluasi strategi komunikasi pada level siswa.

Berikut adalah proses evaluasi strategi komunikasi yang dilaksanakan pada level sekolah sebagai bentuk evaluasi yang mencerminkan evaluasi pada tingkat Dinas dan UPTD dalam rangka pencapaian target 8 standar nasional pendidikan.

Proses evaluasi dina strategi komunikasi, yang dilakukan dinas pendidikan dalam kerangka 8 standar pendidikan ini dilakukan mulai dari konsekuensi tugas dinas untuk 8 standar harus dilakukan secara maksimal. Karena pencapaian 8 standar itu merupakan satu upaya tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan sekolah untuk menuju ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau misalnya kita punya program, sekolah punya program, untuk 8 standar, mulai standar 1 sampai standar 8. Tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi, seperti apa yang diharapkan. Dengan arahan dari pengawas Pembina untuk mengadakan *workshop* walaupun kecil-kecilan, Karena pengawas Pembina kami berdayakan untuk memberikan support kepada guru, bagaimana dalam membuat perangkat pembelajaran, bagaimana guru di dalam membuat analisis konteks, juga secara kebetulan pada kurikulum pembelajaran mendapat tugas untuk *workshop*.

Dari hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem evaluasi di antaranya didasarkan atas keyakinan yang harus serius bagi semua pimpinan di lingkungan lembaga pendidikan. Selanjutnya bahwa perangkat evaluasi harus dirumuskan dan disiapkan serta dikembangkan sesuai dengan apa yang harus diukur, ketika pedoman evaluasi ada maka evaluasi dapat dilakukan dengan baik dan benar, namun jika evaluasi dimulai tanpa ada pedoman monitoring dan evaluasi maka proses evaluasi akan tidak jelas. Akhirnya jika dilihat dari konteks strategi komunikasi maka

aspek keberhasilan dalam bentuk efek atau perubahan dan capaian yang dilakukan tidak akan terkontrol.

Selanjutnya fenomena yang menjadi temuan mengenai proses evaluasi implementasi dari strategi komunikasi yang berdasarkan atas model *public relations* dari Grunig (2009), dapat dianalisis sebagai berikut:

> *Langkah selanjutnya untuk memperoleh data, apakah standar 1, standar 2, standar 3 dan standar 4, yang paling terasa yaitu bukan monitoring secara personal tapi secara global. Dan hasil akhir itu sudah langsung, dinas langsung tahu sendiri bagaimana keberadaan sekolah memperoleh nilai."*
>
> *Selanjutnya untuk memperoleh nilai hasil kegiatan. Dari standar kompetensi lulusan. Jadi "Model evaluasi yang dilakukan oleh Dinas meminta laporan dari sekolah dari SMA , atau mereka turun langsung ke sini, melihat proses pelaksanaan 8 standar.?" Dari pendapat tersebut maka keberhasilan dari proses evaluasi strategi komunikasi pada dasarnya sejajar dengan evaluasi dari implementasi standar isi dari program kurikulum dan pembelajaran serta standar proses yang dilaksanakan oleh para guru di setiap sekolah.*

Dari temuan di atas, jika dilihat dari kajian ilmu komunikasi maka menunjukkan bahwa pendekatan persuasif akan diperlukan oleh siapa saja yang akan melaksanakan program evaluasi strategi komunikasi dalam kerangka keberhasilan program 8 standar nasional pendidikan. Dari standar yang diunggulkan dalam pembahasan ini yaitu standar isi dan standar proses maka hasil evaluasinya dapat dilakukan dengan segera dan dapat dilihat dalam bentuk struktur isi kurikulum, struktur isi Rencana Pembelajaran, dan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru.

1. **Upaya Perbaikan ke depan Mengenai Perencanaan Pendidikan dan Strategi Komunikasi Pendidikan**

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengendalikan kebijakan manajemen pendidikan khususnya perencanaan yang bersinergis dengan strategi komunikasi yang dapat dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan, berdasarkan temuan data lapangan dapat didukung melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pendekatan Komunikasi Tingkat Dinas Kabupaten

Kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan pada tataran dinas pendidikan tingkat kabupaten sebagaimana yang penulis rasakan selama di lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya adalah orientasi penuntasan program dan pelaporan kegiatan tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini Dinas pendidikan. Ketika penulis melakukan sejumlah wawancara dengan *stakeholer* dari unsur kepala Dinas Pendidikan tingkat kabupaten mengenai pendekatan komunikasi ini mereka sepakat bahwa aspek target daripada upaya sosialisasi atau pemberitahuan yang disampaikan dalam bentuk surat-menyurat, pembekalan, monitoring dan evaluasi serta pendampingan merupakan strategi yang masih dipertahankan selama ini.

Pendekatan komunikasi yang berorientasi penuntasan program kerja dengan rangkaian strategi yang simultan dengan periode waktu yang disepakati merupakan andalan utama dalam rangka implementasi program kerja yang menopang keberhasilan 8 standar nasional pendidikan. Temuan yang hampir sama dalam praktiknya menunjukkan bahwa kepala Dinas Pendidikan banyak memanfaatkan media surat dan kegiatan bintek tingkat kabupaten kepada sejumlah perangkat dinas pendidikan ditingkat kecamatan maupun langsung ke level persekolahan. Pemanfaatan

media suara dan kegiatan ilmiah serta kegiatan administrasi ini hingga saat ini telah membantu keberhasilan kepala Dinas Pendidikan dalam memenuhi target tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang dirumuskan dalam rencana strategisnya selama ini.

Dari temuan di lapangan pendekatan-pendekatan tersebut merupakan proses perilaku yang memang kondisional. Menurut sejumlah responden yang diajak wawancara menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan lain yang lebih personal sifatnya atau lebih berorientasi pada kedekatan antar pihak implemenetator dengan pihak pemangku kebijakan di tingkat dinas pendidikan kabupaten sebagaimana yang ditemukan di kabupaten di Jawa Barat ternyata cukup banyak. Sebagai contohnya adalah pendekatan strategi komunikasi peningkatan karier pengawas, kepala sekolah dan guru. Dalam kajiannya di lapangan ditemukan bahwa pendekatan secara personal kepada para calon pejabat struktural seperti pada level dinas pendidikan banyak dilakukan ketika akan menghadapi implementasi program tahunan. Demikian pula dengan pendekatan yang sifatnya pembinaan dan *upgrading* terhadap pejabat baru, ternyata pendekatan ini sangat ampuh dan banyak diterapkan oleh dinas pendidikan, dimana para pengawas dan kepala sekolah dikumpulkan dalam sebuah kegiatan seminar yang menuntut mereka untuk mempresentasikan semua keunggulan masing-masing.

Pendekatan lainnya yaitu pendekatan ketika pemanggilan sekolah unggulan dan sekolah berprestasi dengan wawasan pendidikan lingkungan hidup misalnya, maka temuan ini akan menjadi dasar dalam diseminasi dan aplikasi dari pendekatan-pendekatan lebih lanjut yang dibutuhkan.

Berdasarkan sejumlah pendekatan yang dilakukan ternyata cukup melibatkan pihak-pihak *stakholder* yang terlibat langsung dalam implementasi program dinas dan program tingkat sekolah bahkan komite sekolah.

Sejumlah pendekatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan standar isi dan standar proses dari 8 SNP yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan hingga sampai dilakukan di tataran sekolah, di antaranya didukung oleh berbagai sumber kebijakan pemerintah, mulai dari UU, PP, Kepmen, Perda. Sebagai contoh dalam melibatkan Komite sekolah untuk kegiatan MBS yang dilaksanakan untuk mendukung implementasi standar proses, di mana melalui MBS, maka semua isi program (standar isi) dalam 8 SNP yang diinstruksikan oleh kepala dinas pendidikan kepada para kepala sekolah dapat dibantu pelaksanaannya oleh para Komite Sekolah. Dengan adanya MBS di wilayah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat, maka yang ditonjolkan adalah ciri khas dan karakter dari setiap sekolah selalu diselaraskan dengan ciri-ciri MBS. Sebagai contoh ada yang mengonsentrasikan program sekolahnya kepada aspek seni dan budaya. Yang disampaikan oleh Kepala Sekolah menunjukkan bahwa MBS dapat dijadikan tolak ukur bagi keberhasilan standar isi dan standar proses semua sekolah saat itu. Namun demikian semua ekstrakurikuler dalam kerangka MBS ditujukan untuk kelancaran dan keberhasilan dari semua mata pelajaran yang dibina oleh para guru. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dari hasil studi lapangan menunjukkan bahwa kekhasan seni budaya di Jawa Barat selalu dikenalkan dan diberikan kepada siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Tentunya hal ini membutuhkan inovasi-inovasi yang kuat dalam hal

pendekatan pembelajaran sebagai bentuk implementasi dari Standar proses yang diamanatkan oleh program 8 SNP yang dikembangkan oleh semua sekolah.

Implementasi standar isi yang berupa program unggulan sekolah dalam kerangka MBS sebagai contohnya seni budaya yang diajarkan oleh para guru, semuanya melibatkan peran serta Komite Sekolah. Akan tetapi dari segi dukungan anggaran, maka pihak sekolah masih memberdayakan anggaran sekolah dan dukungan dari para komite dalam pelaksananya.

b. Pembinaan oleh *Stakeholder* di Lingkungan Dinas Pendidikan

Sejumlah program kegiatan internal di lingkungan dinas pendidikan pada dasarnya dilakukan melalui rangkaian implementasi program kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis secara terkontrol dan di monitor berdasarkan program kerja semua bagian. Ada banyak jenis pembinaan yang dilakukan baik secara internal dari program Renstra Kabupaten setempat maupun program kerja yang merupakan kepanjangan dari program pusat sebagaimana yang selama ini telah berlangsung di antaranya cenderung kebanyakan hanya melaksanakan program kerja yang ada dari pusat seperti dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Menengah dan bahkan ada sejumlah program yang merupakan titipan dari program Dikmenti Tingkat Provinsi. Ketika ada Pembinaan para guru untuk meningkatkan kualitas program kegiatan sekolah yang tergolong ke dalam kelompok RSBI maka bentuk pembinaan yang dilakukan, cenderung banyak didanai oleh dana dari blokgrant. Contohnya dikemukakan oleh salah seorang Kabid Ketenagaan yang menyatakan bahwa *"Sebagai RSBI,*

SMA 1 tentu menerima blokgrant yang tetap. Blokgrant per tahun kan untuk pengembangan RSBI. Bukan hanya SMA 1, tetapi juga se Indonesia". Jika melihat arah pembinaan yang dilakukan maka kecenderungannya lebih bersifat *on service training* di mana para tenaga kependidikan maupun kependidikan diberikan sejumlah pembekalan mengenai berbagai hal yang memang menjadi tugas dan tantangan untuk semua pihak agar mampu diperbaiki untuk yang masih kurang dan ditingkatkan untuk yang sudah mencapai batas minimal.

Aspek pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan Kabupaten di Jawa Barat ternyata cukup impresif dan sistematis prosedur pelaksanaannya secara kongkret. Untuk Standar isi dari 8 SNP yang menjadi sasaran binaannya. Salah satunya adalah program workshop untuk para guru SMA, sebagaimana dilakukan oleh sejumlah SMA dengan isi program workshop berhubungan dengan TIK. Sebagai contoh di Jawa Barat semua SMA yang termasuk ke dalam kelompok RSBI, melakukan workshop secara terintegrasi. Dengan demikian sebagai bentuk strategi pencapaian Standar Proses dari 8 SNP yang disepakati untuk dilaksanakan, wujud nyatanya dilakukan dalam bentuk proses kegiatan workshop yang terintegrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh informan guru SMA. Demikian juga menurut Kepala Sekolah yang terlibat dalam integrasi program workshop ini menurut sebagian besar kepala sekolah cukup membantu efisiensi anggaran sekolah. (CLB-A20-29-07-2013), ternyata dengan program yang dilaksanakan secara bersama, maka baik standar isi maupun standar proses dari 8 SNP dapat dikontrol bersama-sama aspek ketercapaiannya.

c. Meningkatkan *Driving Force* Dinas Pendidikan Mengenai Perencanaan dan Strategi Komunikasi

Faktor pendorong utama dalam melakukan sesuatu adalah sangat penting, secara khusus dalam konteks pembahasan ini penulis kaji dari sejumlah informan mengenai aplikasinya dalam strategi komunikasi untuk kepentingan pencapaian 8 standar nasional pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan. Berikut adalah pendapat informan kunci selama riset di lapangan yang bersumber dari kepala sekolah SMA dan SMK.

Figur dengan kompetensi dalam kemampuan memilih strategi yang adaptif akan diperlukan dalam melaksanakan strategi komunikasi yang berbasiskan pada target capaian 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya dari temuan tersebut maka keberhasilan dari standar isi dan standar proses di antaranya akan tergantung pada upaya strategi apa yang cukup adaptif dan bisa dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, bahkan TU di semua jenjang sekolah yang ada di wilayah kabupaten di Jawa Barat

Dalam konteks *driving force* atau faktor pendorong yang diperhatikan dalam implementasi program standar isi dan standar proses dari 8 SNP di lingkungan Dinas Pendidikan, hingga sampai pada level sekolah menunjukkan bahwa di antaranya bersumber dari kebijakan dinas, kekuatan sekolah dalam hal ini program sekolah, dukungan anggaran, peran serta masyarakat melalui Komite, serta peran serta Pemda atau pemerintah setempat. Sebagaimana hasil studi lapangan yang menunjukkan bahwa dukungan dana selama ini di antaranya bersumber dari Pemda Kabupaten. Ketika dukungan anggaran sudah cukup, maka *driving force* dalam konteks langsung yang berhubungan dengan program sekolah untuk melaksanakan implementasi program standar

isi dan standar proses, di antaranya adalah pihak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang menyampaikan motivasinya kepada para guru dalam rangka mengimplementasikan program 8 SNP khususnya untuk standar isi dan standar proses, secara tidak langsung telah berperan sebagai *Driving Force* bagi para guru, TU dan termasuk siswanya juga.

Dalam konteks strategi komunikasi, maka dengan adanya *driving force* yang dilakukan oleh pihak Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat, maka tingkat keberhasilan dari 8 SNP yang diamanatkan akan ditentukan keberhasilannya oleh ketercapaian pesan dari Dinas Pendidikan oleh level sekolah. Ketika level sekolah menerima dengan jelas semua informasi yang diberikan oleh pengawas, demikian juga Kepala Sekolah maka strategi komunikasi yang diterapkan saat itu menjadi suatu bentuk sistem keberhasilan bersama yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Dinas, UPTD, Sekolah, dan akhirnya kepada para guru.

d. Mengembangkan *Thinking Skill* dalam Perencanaan Pendidikan dan Strategi Komunikasi

Aspek penting dalam strategi komunikasi adalah kemampuan untuk menganalisis kondisi, memilih pendekatan, menentukan model yang adaptif, menerapkan model persuasif yang diterima audiens, serta mengorganisasi pesan, memilih media komunikasi, serta melaksanakan proses komunikasi dengan memperhatikan psikologi komunikator yang kredibel, serta menentukan waktu secara efektif, sehingga ia mampu menjelaskan target dan tujuan dari komunikasi, selanjutnya bagaimana efek dalam bentuk perilaku mampu diwujudkan oleh audiens. Jika dikaitkan dengan pengembangan *Thinking Skill,* maka menurut pakar

psikologi kognitif yang di antaranya dikemukakan oleh Robert Gagne (1979) dalam Taxonomy Blooom, bahwa aspek kognitif ini adalah hal yang pertama dan utama, makanya dalam dunia pendidikan lebih diprioritaskan untuk mampu diaplikasikan oleh para komunikator setara dengan guru atau pendidik, atau nara sumber kepada peserta didik atau audiens yang diajak bicaranya. Aspek penting tersebut adalah: (a) Pengetahuan; (b) Pemahaman; (c) Penerapan; (d) menguraikan; (e) Menggabungkan; (f) Menilai; dan (g) mencipta. Pihak mana pun yang memiliki tupoksi untuk melaksanakan proses komunikasi yang ditujukan dengan maksud pembinaan, instruksi, penugasan, pemberian kewenangan serta penyampaian sejumlah kebijakan, maka ia wajib memiliki kemampuan berpikir yang tajam, kompleks, tinggi *(Advance thinking organizer)*, sebagaimana juga dikemukakan oleh David Ausubel (1987), bahwa tingkat kemampuan berpikir yang paling tinggi adalah kemampuan berpikir dalam menemukan langkah implementasi problem solving untuk memecahkan masalah yang lebih luas.

Dari temuan pembahasan yang berkenaan dengan aspek keterampilan berpikir ini, di antaranya dikemukakan oleh informan kunci dari salah satu Sekolah yang telah melaksanakan program dari standar isi dan standar proses dari 8 standar nasional pendidikan.

Berdasarkan pendapat informan tersebut maka terlihat kemampuan berpikir para *stakeholder* di lingkungan dinas pendidikan, UPTD dan Sekolah akan memerlukan strategi komunikasi bagaimana caranya mereka mampu mendelegasikan. Dalam konteks strategi komunikasi hal ini berhubungan dengan penanaman psikologi komunikan (Jalalludin Rahkmat, 1999:89), fenomena ini sangat membutuhkan pendekatan berpikir bagaimana seorang

komunikator mampu memahami kondisi mentalitas komunikan atau audiens yang diajak bicara atau yang menjadi sasaran komunikasinya. Dengan demikian kemampuan berpikir secara efektif akan dibutuhkan apakah komunikator atau *stakeholder* dinas pendidikan hingga sekolah mampu menganalisis kondisi audiensinya atau tidak, memilih materi yang tepat untuk mereka atau tidak, seta menganalisis perubahan perilaku apa yang akan terjadi. Demikian halnya ketika dikaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan maka untuk standar mutu atau lulusan akan menjadi target penting jika kemampuan berpikir para *stakeholder* pendidikan lebih efektif dan cerdas dalam menganalisis semua kondisi, kepentingan, demi tercapainya target keberhasilan semua program yang direncanakan pada semua level.

Ketika masuk pada tataran sekolah atau kelas maka kemampuan berpikir seorang akan ditentukan oleh kemampuan dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa, organisasi materi pelajaran, organisasi waktu implementasi kurikuler. Berikut adalah hasil pembahasan mengenai strategi berpikir yang adaptif untuk mengimplementasikan program sekolah dalam rangka mencapai keberhasilan program dari standar isi dan standar proses dari 8 standar nasional pendidikan.

Keterampilan berpikir dalam menghadapi tugas implementasi 8 standar nasional pendidikan yang langsung berhubungan dengan strategi komunikasi akan terlihat ketika seorang pendidik mampu untuk mengenal karakter dan kondisi yang dialami oleh siswanya. Latar belakang siswa dari berbagai macam pekerjaan orang tua dan data pribadi siswa hendaknya mampu dikenali dan dijadikan input dalam merumuskan strategi komunikasi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pendapat informan kunci mengenai hal ini.

Dari temuan di lapangan khususnya dari pendapat para kepa-la sekolah SMA dan Komite Sekolahnya, berkenangan dengan penanaman *Thinking Skill* dalam mendukung implementasi standar isi dan standar proses dari 8 SNP menunjukkan bahwa salah satu pendorongnya adalah motivasi yang diberikan dewan pendidikan dan komite sekolah kepada setiap kepala sekolah. Melalui proses dorongan inilah maka akan muncul rasa percaya dan kepercayaan diri pada setiap kepala sekolah, sehingga ia menjadi mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya agar dapat melaksanakan semua program dari standar isi dan standar proses yang diamanatkan oleh Dinas Pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendapat Grunig dalam konteks strategi komunikasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* di antaranya akan bertumpu kepada peran *stakeholder* menjadi sumber penyelesaian masalah ataupun tugas-tugas yang dibutuhkan dalam membantu para guru untuk melaksanakannya dengan optimal.

Apa yang dikatakan oleh Semua Kepala Sekolah yang menjadi informan pembahasan dalam rangka Penanaman *Thinking skill* ini juga dirasakan oleh Komite Sekolah pada jenjang SMA yang menyatakan bahwa mereka cukup memberikan pendapat yang mampu membantu kemampuan berpikir para kepala sekolah menjadi lebih strategis, ketika mereka harus melaksanakan program sekolah. Sebagai contoh untuk melaksanakan program standar isi maka komite cukup memberikan pendapat perbandingan atau isi dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan dianut oleh semua level dan jenjang pendidikan. Sebagai contoh mengenai MBS yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah maka para komite datang dan mencoba untuk memberikan dukungan dalam bentuk

gambaran-gambaran apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah.

Dari proses penanaman yang dilakukan baik mulai dari Komite Kepada Kepala Sekolah maupun dari Kepala Sekolah kepada para guru, maka dari itu menunjukkan suatu perkembangan yang pesat pada cara pandang mereka dalam melaksanakan program standar isi dan standar proses, di mana mereka mampu melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan berupa program-program pengembangan yang terus dilakukan sehingga mampu menghasilkan program-program inovasi pendukung program kurikuler yang mampu menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan RPS (Rencana Program Sekolah). Sebagai contoh para guru yang telah memiliki *Thinking Skill*, mereka mampu menciptakan lagu-lagu sendiri, membuat alat-alat seni baru, dan juga irama-atau nada-nada baru sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan menarik perhatian siswa. Temuan tersebut dalam konteks *Teaching skill,* maka para guru mampu untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang terbarukan sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang cukup optimal untuk mencapai keberhasilan dari standar proses yang menjadi target para guru.

e. Menerapkan Sistem Nilai oleh Para *Stakeholder* dalam Konteks *Leadershipnya*

Sistem nilai yang dianut oleh semua level manajemen di lingkungan Dinas Pendidikan sampai dengan level manajemen sekolah pada dasarnya tidak terlepas dari kode etik, serta tata nilai pendidikan, hingga tata nilai-nilai profesionalisme pendidikan dan pembelajaran yang dimiliki oleh para pendidik dan tenaga kependidikan. *Stakeholder*

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan sistem nilai sudah pasti disesuaikan dengan tupoksi dan kewenangan tiap pimpinan. Mulai dari *Leadership* Kepala Dinas akan mengacu kepada nilai-nilai profesional sebagai pimpinan dinas pendidikan yang harus membina para staf dan kepala bagian serta pra seksi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan. Demikian juga untuk level Kepala Dinas UPTD maka sistem nilai adalah merujuk pada sistem nilai berdasarkan level tupoksi dan profesionalisme masing-masing pimpinan Kepala Unit Pelaksana, kepada para staf dan pengawas yang dimilikinya.

Hingga sampai kepada level sekolah maka penerapan sistem nilai dilakukan mulai dari tingkat Kepala Sekolah kepada wakil bidang kurikulum dan kesiswaan hingga kepada para guru, staf tata usaha dan tenaga kependidikan lainnya yang berada pada level sekolah. Demikian juga guru sebagai pimpinan di kelas maka ia akan mengacu tata nilai terhadap nilai-nilai profesional sebagai pendidik yang harus memberikan pembinaan kepada para siswanya.

Temuan pembahasan ini dikaitkan dengan aspek *leardership* maka setiap tingkatan harus memiliki dan menyadari aspek kepemimpinan, artinya sebagai pemimpin maka ia harus memberikan contoh dan teladan dalam melaksanakan tiap amanat dan tupoksi yang diembannya. Dalam konteks komunikasi maka sistem komunikasi yang harus dipegang adalah komunikasi yang sifatnya mutualistik, artinya strategi komunikasi yang dilakukan harus menunjukkan hasil yang sama-sama menguntungkan baik bagi komunikator (pejabat/pemimpin dinas pendidikan dan sekolah) juga pihak komunikan yaitu pihak (guru, siswa) ataupun yang menjadi sasaran dalam proses pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Dalam mendukung temuan

pembahasan ini penulis paparkan suatu hasil wawancara dengan informan kunci di tingkat sekolah yaitu dari *stakeholder* sekolah dengan para *stakeholder* dari luar sekolah yang berkepentingan dalam implementasi standar isi dan standar proses dari 8 standar pendidikan dengan lebih menekankan pada penerapan sistem nilai.

Nilai-nilai yang tertanam pada semua pihak mulai dari pihak UPTD, Kepala Sekolah, guru bahkan siswa berjalan dengan mengikuti perkembangan dan implementasi program standar isi dan standar proses yang dilaksanakan di semua sekolah yang ada di Kabupaten. Sebagai contoh para guru yang kreatif untuk mampu menanamkan nilai-nilai dalam bentuk kemampuan berpikir dan menerapkannya dalam membahas isi mata pelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Melalui kondisi seperti ini maka program pembelajaran yang dilaksanakan baik isi maupun proses pembelajarannya sudah dapat ditentukan menjadi indikator dari keberhasilan standar isi dan proses. Semua itu mereka (guru) peroleh dari semua program pembinaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah yang mereka rasakan selama ini.

Dalam konteks sistem nilai maka pembentukan karakter nilai yang harus ada pada diri komunikator dalam hal ini adalah kepala dinas pendidikan, UPTD, pengawas dan kepala sekolah bahkan guru hendaknya mampu mewujudkan karakter yang berlandaskan akan nilai-nilai. Sebagai contoh nilai kredibilitas dari sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah, maka nilai-nilai keunggulan dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan harus ada yang mengoordinir implementasinya. Demikian juga pembudayaan sistem nilai yang dipelihara dengan baik secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua

masyarakat pendidikan khususnya di sekolah hal ini sangat penting sebagai perwujudan nyata dari strategi komunikasi yang mengetengahkan keunggulan dari sistem nilai yang seharusnya dimiliki dalam dunia pendidikan.

Mengenai nilai-nilai yang diharapkan mampu tertanam pada semua level pendidikan di wilayah binaan Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa ada suatu nilai tertinggi dari hanya sekedar melaksanakan program sekolah dengan payungnya 8 SNP, akan tetapi nilai luhur yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan, di antaranya adalah keberhasilan dan pencapaian pembangunan pendidikan di semua level, jenjang maupun jenis pendidikan bisa terselenggara dengan efektif dan efisien sehingga tujuannya tercapai. (CLB-A24-0808-2013).

Sistem nilai yang diberlakukan di lingkungan pendidikan juga diterapkan dalam bentuk sistem supervisi dan penilaian kinerja para kepala sekolah, demikian yang terjadi di lingkungan UPTD. Melalui penilaian kinerja ini maka program kerja dalam 8 SNP khususnya untuk standar isi dan standar proses dapat diukur dari kinerja para kepala sekolah. Dengan demikian sistem nilai dalam konteks alat ukur maupun sistem nilai dalam konteks makna dan hasil dari program 8 SNP khususnya standar isi dan standar proses, apakah sudah memberikan dampak positif atau belum terhadap keberhasilan kegiatan tingkat sekolah, maka keduanya dapat dinilai secara bersamaan.

Lebih lanjut dari hasil catatan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang memayungi sistem nilai dalam konteks kepemimpinan yang selama ini diterapkan dapat dilihat dari program-program yang digurulirkan oleh UPTD melalui para pengawasnya. Sejumlah program yang diimplementasikan dipayungi oleh kebijakan dan renstra

serta pedoman yang sudah dirumuskan pada tingkat UPTD yang sebelumnya memperoleh masukan dari program sekolah. Jika ditinjau dari aspek kepemimpinan (*leardership*), maka aspek manajemen penilaian atas kinerja Kepala Sekolah yang dirumuskan dalam program supervisi oleh para pengawas UPTD selama ini telah menjadi fokus utama dalam rangka implementasi strategi komunikasi yang lebih efektif dan memiliki kekuatan formal.

f. Menganalisis Kompleksitas dari Implementasi Perencanaan Pendidikan dan Strategi Komunikasi

Implementasi strategi komunikasi yang terlihat dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan khususnya oleh *stakeholder* dalam mewujudkan ketercapaian 8 standar nasional pendidikan di lingkungan kerjanya ternyata cenderung banyak variasi pendekatan. Sebagaimana dalam strategi komunikasi bahwa ada asumsi ternyata tidak ada satu strategi pun yang paling tepat, artinya bahwa jika seorang komunikator akan melaksanakan strategi komunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan termasuk pesan untuk memperkuat dan mengajak para *stakeholder* kepada audiensinya seperti para UPTD, pengawas, dan staf bahkan sampai level sekolah maka akan banyak membutuhkan strategi dan pendekatan yang adaptif. Artinya apa pun pesan yang ingin disampaikan sebagaimana tentang upaya mencapai target 8 standar nasional pendidikan, khususnya untuk standar isi dan standar proses, maka para *stakeholder* pendidikan harus mempersiapkan sejumlah pendekatan seperti dalam bentuk ajakan dan pengalaman yang disampaikan kembali kepada komunikan atau audiensi yang menjadi sasaran pembinaannya.

Dari hasil studi lapangan melalui wawancara terhadap sejumlah informan kunci menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan implementasi strategi komunikasi secara maksimal ternyata membutuhkan apa yang disebut dengan pendekatan yang berbasis pada koordinasi dan kewenangan.

Meminta saran kepada Dinas, koordinasi dengan Dinas, dan kalau ada apa-apa selalu memperhatikan Juklak dan Juknis. Jadi tidak melangkah sendiri, apalagi dalam pencapai standar isi dan standar proses dari 8 SNP. Selama ini pihak Dinas sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pengawas. Dengan inovasi ini didayagunakan dan terus berlangsung di sekolah. Sehingga tiap sekolah ada pengawas Pembina, barangkali pengawas Pembina itu tugas dan fungsinya untuk menjadi pendamping dalam melaksanakan 8 standar di sekolah khususnya standar isi dan standar proses. Manakala Pembina sudah mendapatkan data itu selanjutnya disampaikan atau ditampung oleh koordinator pengawas, kemudian untuk disampaikan ke dinas pendidikan kabupaten.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa sebagai salah satu *stakeholder* Dinas Pendidikan yang telah berpengalaman dalam melaksanakan sejumlah program kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan jabatannya ternyata harus melakukan sejumlah pendekatan kepada seluruh audiennya di mana pun dan dalam konteks apa pun yang berhubungan dengan upaya ketercapaian 8 standar nasional pendidikan. Proses strategi komunikasi yang tersirat dalam peran *stakeholder* di atas akan berawal dari analisis pihak-pihak yang harus dan akan diajak untuk melakukan koordinasi tentang program 8 standar nasional, kemudian ia melakukan analisis terhadap juklak dan juknis

yang berlaku. Setelah itu dipahaminya maka ia harus melakukan koordinasi dengan pihak pengawas melalui proses persuasif ia lakukan dan memberikan kepercayaan kepada para pengawas dengan cara menitipkan sejumlah pesan yang harus diimplementasikan oleh pengawas dalam bentuk pembinaan. Artinya ketika pengawas melakukan pembinaan maka di situlah strategi komunikasi yang dilakukan dengan berbasis pada kompleksitas pendekatan yang dibutuhkan dapat terlaksana. Secara diagramatik berikut adalah model analisa kompleksitas dari strategi komunikasi yang dilakukan *stakeholder* pendidikan dalam rangka implementasi ketercapaian program 8 standar nasional pendidikan.

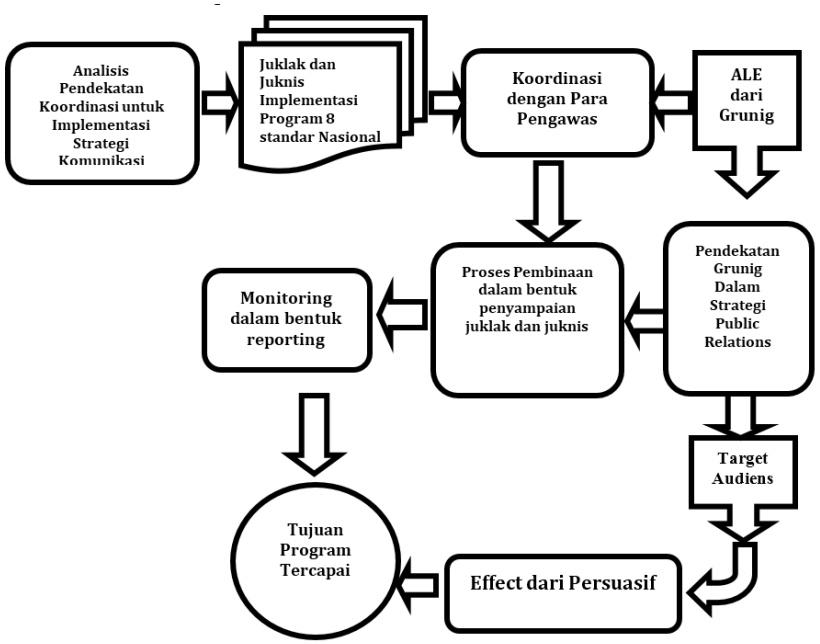

Gambar 3.1

Kompleksitas Analisis Implementasi Strategi Komunikasi oleh *stakeholder* Pendidikan untuk mencapai standar isi dan standar proses dari 8 SNP

Jika dianalisis dari model di atas maka dapat dilihat bahwa pendekatan persuasif sebagaimana dijelaskan oleh Litle John (1999:78) menunjukkan bahwa kekuatan mengajak dari seorang komunikator yang dalam hal ini adalah para *stakeholder* dalam upaya mengimplementasikan program kegiatannya akan berhasil jika memperhatikan kondisi audiens juga *effect* yang ingin ditanamkan dan tumbuh pada diri audiens yang menjadi sasaran pembinaan program implementasi pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Fenomena ini dilakukan oleh para *stakeholde* pendidikan.

Menurut Korwas dari Kabupaten menunjukkan bahwa proses implementasi dari strategi pembinaan yang mirip dengan strategi pembinaan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh para pimpinan di lingkungan dinas pendidikan. Melalui pendekatan yang sifatnya mengajak, membina, menugaskan dan memberikan petunjuk merupakan upaya yang akan efektif dalam menyampaikan pesan semua yang diinginkan. Sebagai contoh ketika akan mensosialisasikan juklak dan juknis yang berhubungan dengan implementasi program tiap sekolah maka kebutuhan mengajak akan lebih diperlukan dari pada pemberian tugas atau penunjukan. Kondisi ini memerlukan perubahan pendekatan, di antaranya dapat dilakukan dengan strategi komunikasi oleh pihak pimpinan. Sebagaimana yang dikonstruksi pada model di atas menunjukkan bahwa strategi komunikasi ternyata tidaklah sederhana dalam pelaksanaannya, dan membutuhkan pemahaman yang utuh dari para *stakeholder* di lingkungan dinas pendidikan, UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah hingga para guru.

Kompleksitas implementasi dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* juga membutuhkan dukungan dan peran serta dari masyarakat pendidikan atau pihak dewan pendidikan yang ternyata sangat mempengaruhi kekuatan

audiens untuk dapat mengikuti arahan dan binaan dari para *stakeholder* pendidikan. Berikut adalah salah satu hasil dari wawancara mendalam terhadap informan kunci yang mewakili pihak komite sekolah yang diwakili oleh Ketua Komite sekolah salah satu dari SMA yang ada di wilayah Kabupaten di Jawa Barat.

Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa peran dari komite sekolah terhadap ketercapaian standar isi dan standar proses dari 8 SNP yang dilaksanakan di level SMA sebagai contoh SMA yang penulis kunjungi menunjukkan adanya partisipasi aktif dari para komite dan unsur Kepala Sekolah dan dewan guru. Selanjutnya dari pendapat catatan lapangan tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas strategi komunikasi yang dapat dilakukan di lingkungan Pendidikan mulai dari dinas hingga sekolah yang dinilai dan dinyatakan oleh unsur komite sekolah ternyata akan terfokus kepada tugas dan program, kepercayaan dari pihak terkait, serta aspek keberhasilan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Fenomena ini memungkinkan kompleksitas implementasi strategi komunikasi dapat ditata dengan sistematis oleh komite dengan cara menganalisis mana program prioritas dan mana program rutinitas, program unggulan dan program pembinaan untuk staf. Semua ini akan dikemas ke dalam bentuk kebijakan yang mampu dilaksanakan secara bersama-sama.

Selanjutnya dalam konteks komunikasi yang sangat mempengaruhi sejumlah implementasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah akan menjadi suatu tantangan tersendiri. Bahwa inovasi dilakukan sejak tahapan penanaman nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu membangun sikap dan moral yang baik. Dengan kondisi kepribadian yang terbentuk seperti ini maka semua level ketika di ajak untuk mampu mewujudkan apa yang diamanatkan dalam undang-undang pendidikan

semuanya dapat dioptimalkan secara bersama-sama. Semua *stakeholder* yang terlibat di dalamnya akan dapat terbangun mental inovasi secara psikologis sehingga standar isi dan standar proses akan mampu ditempatkan sebagai sumber motivasi untuk dapat dijadikan target pembangunan pendidikan secara refleks namun terukur dan objektif. Sebagai contoh dari temuan lapangan bahwa semua kegiatan selalu dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku. Di mana sebelumnya bahwa para *stakeholder* pelaksana maupun pimpinan di level sekolah, pengawas, UPTD dan Dinas Pendidikan semuanya telah sepakat bahwa kompleksitas tugas selama melaksanakan 8 SNP ditempatkan sebagai sumber inovasi berpikir, inovasi target capaian pembangunan pendidikan secara utuh, dan sebagai sarana untuk mewadahi semua kemampuan inovasi yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian strategi komunikasi yang dipimpin mulai dari tingkatan dinas kabupaten telah menjadi strategi komunikasi pada level pelaksana dalam hal ini guru.

Dalam menjawab kompleksitas strategi komunikasi yang secara umum dilaksanakan oleh *stakeholder* dinas pendidikan sampai ke tingkat sekolah, dapat penulis rumuskan berdasarkan temuan di atas, bahwa semua pihak atau semua *stakeholder* pada dasarnya berhak untuk mampu memahami, melaksanakan dan mengembangkan semua target standar isi dan standar proses yang dilaksanakan melalui strategi komunikasi yang tegas. Dari suasana seperti ini maka hasil yang diperoleh di antaranya selama ini telah tumbuh budaya menghadapi berbagai permasalahan serta mampu memberikan budaya yang dinamis kepada para guru dalam mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. Sebagaimana dijelaskan pada yang dilakukan sebagai berikut. Guru-guru pun sering mengadakan semacam Diklat, kalau ada apa-apa yang harus segera di laksanakan,

penyampaian materi kepada teman-teman guru. Dengan segera untuk menyampaikannya. Karena kalau tidak begitu, pertama tertinggal, kedua, dituntut untuk memberikan laporan secara tertulis.

D. Formulasi Perencanaan Strategi Komunikasi yang Dilakukan Dinas Pendidikan

Perencanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam konteks implementasi 8 standar nasional pendidikan, ternyata dilakukan sangat variatif, yaitu mulai dari merencanakan analisis kebutuhan melaksanakan komunikasi dengan para pimpinan di lingkungan dinas pendidikan. Setelah melakukan pendekatan-pendekatan melalui kegiatan Rapat Pimpinan yang membahas mengenai sejumlah program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bagian bidang Kurikulum, Bidang Ketenagaan, Bidang Sarana dan Prasarana, serta bidang Humas dan Bidang lainnya, maka dirumuskan juklak dan juknis bagaimana program 8 standar nasional pendidikan ini bisa mulai digulirkan.

Secara fungsional bahwa perencanaan strategi komunikasi pada dasarnya melekat pada sejumlah perencanaan program kegiatan yang ada dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Pendidikan. Namun dalam kajian lebih spesifik bahwa perencanaan-perencanaan ini selanjutnya dipetakan ke dalam sejumlah program tiap bagian yang ada di lingkungan dan struktur organisasi dinas pendidikan. Dengan demikian pemetaan perencanaan strategi komunikasi pun mulai dari yang makro yaitu mulai dari level manajemen Kepala Dinas Pendidikan, Kelompok Jabatan Fungsional bersama sekretaris yang dibantu oleh para Kasubag yaitu bagian Umum, Perencanaan Program dan Kasubag Keuangan, selanjutnya perencanaan program dilakukan menuju yang menengah yaitu kepada para Kepala Bidang mulai dari Bidang Dikdas, Menengah, Kabid Mutendik dan Kabid

PNFI. Dari perencanaan tingkat menegah ini strategi komunikasi dilakukan secara operasional oleh para Kasi.

Bahwa tahapan perencanaan dalam rangka penerapan strategi komunikasi di lingkungan dinas pendidikan yang menentukan adalah para pimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan. Adapun implementasinya yang sudah mulai akan dilakukan oleh para kasi kepada para Kepala UPTD. Ditingkat UPTD inilah maka sejumlah program pembangunan pendidikan yang tergabung dalam 8 standar ini dilaksanakan oleh para Pengawas dan Kepala Sekolah secara merata sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pada level Makro sejumlah program pendidikan yang dikomunikasikan masih berupa satuan program dan dukungan anggaran tiap satuan program pendidikan. Sedangkan pada tataran Meso satuan program pendidikan yang sudah didanai atau didampingi oleh satuan anggaran sudah dirumuskan menjadi paket program kegiatan oleh para Kabid, yang selanjutnya untuk meneruskan satuan kegiatan yang didukung oleh satuan anggaran yang disetujui oleh para Kabid disampaikan kepada semua Kepala Seksi. Pada saat Kepala Seksi sudah menerima paket-paket program kegiatan, maka mereka akan mengundang semua kepala UPTD dari tiap kecamatan.

Sebagai perangkat manajemen operasional yang akan melaksanakan program kerja Dinas Pendidikan melalui UPTD ini maka tingkatan selanjutnya perencanaan strategi komunikasi ini akan dilanjutkan oleh semua Pengawas di tiap wilayah binaan UPTD. Berikut adalah tingkatan perencanaan operasional dari strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pengawas dan Kepala Sekolah hingga keterlibatan para guru di satuan-satuan pendidikan.

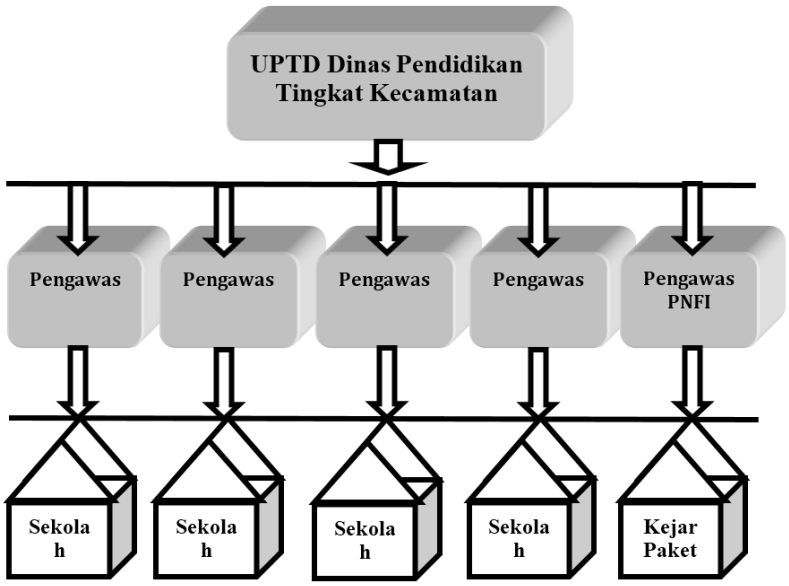

Gambar 3.2

Ilustrasi Perencanaan Strategi Komunikasi yang dilakukan pada tingkat UPTD

Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan strategi komunikasi yang siap dilakukan diharapkan mampu menyentuh level sekolah dengan berbagai jenjang, jenis dan bentuk satuannya. Dalam konteks ini maka strategi komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan atas satuan program kegiatan dan program kerja yang sudah ditetapkan untuk bisa diterima dan sampai di sekolah, sehingga pada unsur pelaksana seperti para guru akan dengan mudah melaksanakannya setiap saat.

Bagan di atas menunjukkan betapa pentingnya sebuah strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh tiap level sehingga semua kebijakan-kebijakan berkenaan dengan 8 standar nasional pendidikan, baik itu standar-standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi; Standar Proses; Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan Pendidikan; dan Standar Penilaian Pendidikan. Berikut adalah uraian yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan

strategi komunikasi mengenai bahan tentang program yang tergabung dalam 8 standar nasional pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan

E. Fungsi dan Tujuan Standar

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata

pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Standar Isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat

keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (d) Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/ madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh

masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. *source: BSNP - Standar Nasional Pendidikan*

Bahwa ujung tombak pelaksanaan tiap standar nasional ini di antaranya adalah para pengawas dan para kepala sekolah serta para guru. Di mana para pengawas diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pembina yang sekaligus mengontrol pelaksanaan semua bidang yang dilakukan oleh para kepala sekolah dan guru. Adapun para guru dapat dikatakan sebagai implementator semua tahapan perencanaan strategi komunikasi yang langsung berhadapan dengan para siswa di kelas maupun di luar kelas, di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal dan kejar paket.

Bentuk dokumen perencanaan untuk tiap level manajemen yang disesuaikan dengan tingkatan strategi komunikasi, di antaranya adalah dokumen Renstra untuk perencanaan strategi komunikasi tingkat kabupaten, dan Rincian Program Kepala Bidang untuk tingkat Kepala Bidang, serta Rincian program Kepala Seksi untuk tingkat Seksi tiap jenjang pendidikan, dokumen Rencana Kerja UPTD untuk tingkat UPTD di wilayah Kecamatan, serta Program kerja pengawas untuk tingkat pengawas. Di tingkat sekolah adalah Rencana Kerja Sekolah untuk tingkat Sekolah, dan Rencana Pembelajaran untuk tingkat Guru. Dengan demikian strategi komunikasi yang akan dilaksanakan untuk tiap level manajemen dalam rangka menopang keberhasilan program kerja 8 standar nasional pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

1. Implementasi Strategi Komunikasi Manajemen Kebijakan Pendidikan oleh UPTD

Jika melihat struktur organisasi yang diperoleh dari data Dinas Pendidikan, maka ada sejumlah tupoksi yang semuanya

wajib dilaksanakan dan dikendalikan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian implementasi strategi komunikasi pada dasarnya telah melekat pada setiap tupoksi untuk masing-masing level manajerial, sampai kepada level sekolah dan guru.

Bagian dari implementasi strategi komunikasi yang akan menjadi bahan untuk dapat diukur berhasil tidaknya, adalah jadwal program implementasi. Untuk level Dinas Pendidikan ada yang disebut dengan alat monitoring untuk pelaksanaan program kerja semua bidang dan seksi. Untuk tingkat UPTD mereka punya jadwal Pembinaan ke tiap sekolah oleh semua pengawasnya. Dan untuk tiap sekolah mereka punya jadwal pelaksanaan semua satuan program kegiatan sekolah.

Strategi yang dilakukan mengacu kepada prinsip *Top Down*, di mana prinsip ini menunjukkan kelaziman suatu proses komunikasi, mengingat komunikasi yang dilakukan pada fase awal akan dilakukan oleh Kepala Dinas atau level manajerial mana yang kedudukannya lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala dinas maupun Kepala UPTD akan memegang peran penting pada tataran makro dan tataran operasional. Bahkan Kepala Sekolah dan guru menjadi ujung tombak implementasi strategi komunikasi di tingkat satuan pendidikan.

Selama pelaksanaan strategi komunikasi ini ada pihak mitra dinas pendidikan dan sekolah yang selalu memberikan dukungan kuat terhadap keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan bahkan dengan masyarakat sekalipun. Untuk level Dinas Pendidikan mitra tersebut adalah Dewan Pendidikan, mitra ini merupakan penyeimbang dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* ditingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat sekolah mitra tersebut adalah Komite Sekolah, mitra ini adalah kepanjangan atas semua kebijakan sekolah dalam melaksanakan rencana

kerja sekolahnya yang selalu siap untuk dikendalikan dan diukur secara bersama mengenai keberhasilannya.

Dengan demikian implementasi strategi komunikasi untuk tiap UPTD pada dasarnya selalu dilaksanakan oleh para pengawas, bentuk implementasinya kebanyakan bersifat Pembinaan, dan peningkatan kapasitas untuk para guru di tingkat sekolah. Pembinaan dan supervisi oleh para pengawas merupakan implementasi program komunikasi yang berisi sejumlah materi peningkatan kompetensi bagi para guru di tiap sekolah binaannya.

Jaminan suatu implementasi untuk standar nasional tertentu dari 8 standar yang ada maka selama ini di wilayah binaan UPTD masing-masing kendalanya adalah standar sarana dan prasarana.

Dari data tersebut terlihat bahwa kebutuhan strategi komunikasi untuk menyampaikan sejumlah informasi berkenaan dengan stan dar sarana prasarana sangat penting agar pihak sekolah yang selama ini banyak memerlukan bantuan dan kejelasan informasi tentang sarana dan prasarana ini tidak terus-menerus penasaran bahkan mengalami degradasi kepercayaan terhadap UPTD dan bahkan dinas pendidikan. Fenomena ini banyak ditemui pada level sekolah di mana informasi mengenai bantuan atau program bantuan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana ini tidak jelas, bahkan keputusannya pun tidak pernah cepat dapat diterima oleh pihak sekolah.

Dengan demikian strategi komunikasi merupakan suatu instrumen melekat yang ada pada tiap jenjang pendidikan dan faktor yang mempengaruhi untuk bisa lancar tidaknya informasi mengenai pesan yang berkenaan dengan semua program kegiatan di tingkat UPTD akan tergantung bagaimana strategi komunikasi yang diperankan oleh para pengawasnya. Dalam konteks implementasi 8 standar nasional pendidikan identik

dengan aspek penyampaian sejumlah kebijakan secara jelas oleh pengawas dan memperoleh kejelasan serta kelanjutan implementasi program kegiatan oleh para kepala sekolah dan guru di tingkat sekolah. Dari kondisi ini maka keberhasilan akan ditentukan sampai tidaknya informasi tentang kebijakan tersebut kepada pihak sekolah.

Pada level sekolah implementasi strategi komunikasi dapat ditemukan pada diri para guru yang melaksanakan sejumlah program kerja sekolah yang ditujukan guna mencapai visi dan misi serta program kerja tingkat UPTD. Ketika program kerja level sekolah dapat dilaksanakan dengan tuntas maka keberhasilan program kerja oleh para guru secara otomatis menunjukkan keberhasilan implementasi strategi komunikasi oleh pihak-pihak terkait baik Kepala Sekolah maupun Pengawas. Selama implementasi strategi komunikasi juga ada istilah supervisi yang dilaksanakan oleh para pengawas kepada sekolah yang pada dasarnya ditujukan kepada para guru, maka implementasi supervisi ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari implementasi strategi komunikasi oleh para pengawas.

Pada tataran guru dari temuan data di wilayah dinas pendidikan dapat ditemukan tentang sejumlah pembelajaran di kelas, maka semua bentuk dan model komunikasi tentunya dilaksanakan oleh para guru. Dalam proses pembelajaran ini maka berlangsung komunikasi pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan bagaimana strategi komunikasi ini dilaksanakan dengan baik oleh level guru. Pada level ini semua program kerja pendidikan pada tataran sekolah sangat menentukan keberhasilan ditingkat manajemen di atasnya, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian program kerja guru yang dilaksanakan dalam bentuk penyampaian pesan pembelajaran kepada para siswa dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan strategi komunikasi. Jika dianalisis

lebih jauh lagi maka ada sejumlah kompetensi yang dibutuhkan dalam implementasi strategi komunikasi oleh guru yaitu kompetensi guru itu sendiri. Jika kompetensi guru belum mampu melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai pendidikan, maka tidak menutup kemungkinan pesan tidak bisa tersampaikan kepada para siswa, dengan demikian strategi komunikasi dalam hal ini tidak berhasil. Jadi dalam implementasi strategi komunikasi banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya.

Indikator lain dari implementasi strategi komunikasi ini adalah aktivitas siswa yang dinamis, jika UPTD melakukan pembinaan dengan baik kepada para guru oleh perangkat pengawas yang dimilikinya, maka ketika kondisi belajar siswa dinamis dan menghasilkan target sesuai standar nasional pendidikan, misalnya standar proses, dan standar lulusan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi strategi komunikasi sudah dikatakan berhasil. Indikator lainnya dari kualifikasi guru sebagai salah satu indikator standar nasional pendidikan yaitu standar kualifikasi tenaga pendidik akan menjadi penentu bagaimana strategi komunikasi dalam bentuk kegiatan apa pun harus menopang keberhasilan kegiatan guru dalam melaksanakan program sekolah dengan strategi komunikasi yang efektif.

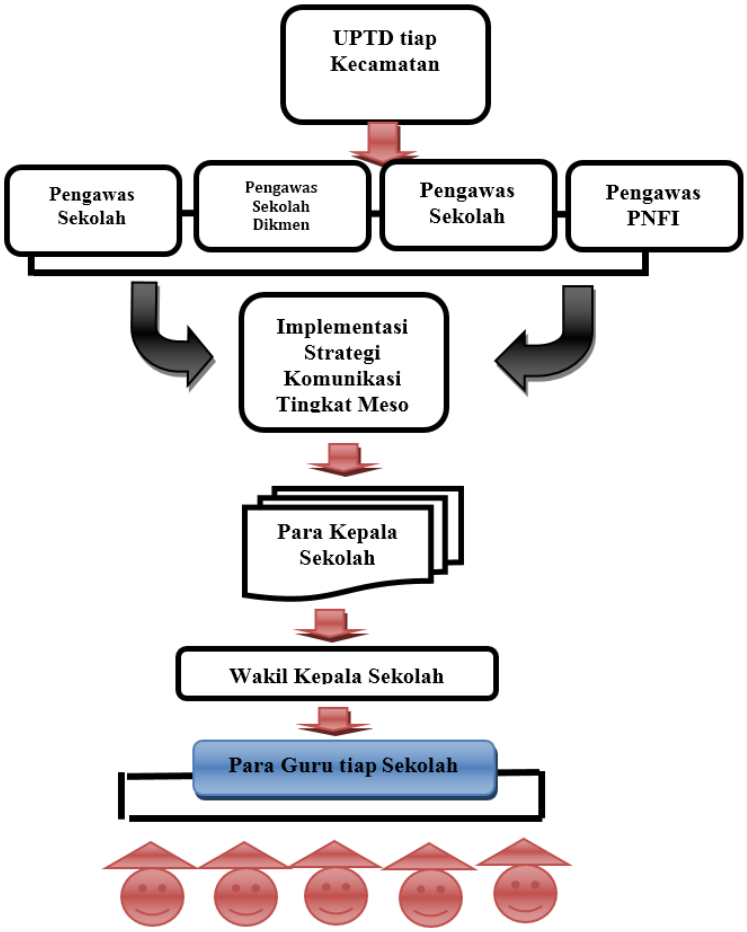

Gambar 3.3
Implementasi Strategi Komunikasi Oleh UPTD menuju Sekolah dalam rangka implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan

Dari bagan di atas maka ada pihak-pihak penting yang dapat menjadi jaminan utama mengenai keberhasilan implementasi dari strategi komunikasi yang mengadopsi dari salah satu teori Grunig (2002) yang mengaplikasikan fungsi strategi komunikasi dalam konteks manajemen, yaitu *Communication management is defined as the management of communication Steyn & De Beer: Conceptualising strategic communication management (SCM)*

in the context of governance and stakeholder inclusiveness. between an organisation (institution) and its internal and external stakeholders, and other societal interest groups, and is performed at the functional level of an organization. Berdasarkan hasil analisis penulis maka teori ini difungsikan pada proses implementasi fungsi dari UPTD yang mengkomunikasi program standar nasional pendidikan ke tingkat sekolah (guru).

2. **Proses pengendalian Strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan**

Kegiatan pengendalian selama pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, UPTD merupakan kegiatan bersama yang dilakukan secara rutin. Pengendalian yang dilakukan dinas pendidikan biasanya dilakukan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan bersama dengan pihak pengawas, di mana beberapa instrumen tentang pengisian sejumlah data kegiatan yang dilakukan oleh UPTD diisi oleh pengawas, kemudian dilaporkan kepada tiap Seksi di tingkat Dinas Pendidikan. Pada tahapan ini maka strategi komunikasi akan tergantung kepada apa yang dilakukan oleh pengawas ketika menerima informasi tentang form isian yang harus diisi, kemudian kapan ia harus mengirimkannya kembali. Sejumlah form isian biasanya merujuk kepada semua kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh semua sekolah yang dibina oleh UPTD.

Proses implementasi strategi komunikasi yang kemudian dikendalikan keberhasilannya selama ini telah memberikan kesinergisan antar semua seksi, dan mereka telah mampu memetakan masing-masing item dari 8 standar nasional pendidikan secara terintegrasi. Informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan berkenaan dengan hasil monitoring sejumlah

program kerja di tingkat sekolah dapat diterima dalam waktu dan jadwal yang tepat.

Pada dasarnya ada sejumlah standar dan proses pengendalian implementasi strategi komunikasi yang secara terintegrasi dengan implementasi program kegiatan di level UPTD dan persekolahan, salah satunya adalah sistem pengendalian dalam bentuk kegiatan sinkronisasi sejumlah program kerja antara UPTD yang satu dengan UPTD lainnya terhadap program kerja pokok yang dimiliki oleh semua seksi di tingkat kabupaten. Melalui rapat-rapat pimpinan dan rapat dinas, maka proses pengendalian dilakukan secara rutin oleh pihak Kasi dengan cara memanggil kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan selalu diwajibkan membawa sejumlah laporan capaian proses pembinaan, pengendalian yang dilakukan oleh para pengawas, serta capaian program kegiatan dari sekolah binaan UPTD masing-masing.

Sistem pengendalian demikian selama ini telah menjadi masukan bagi para perumus renstra di lingkungan dinas pendidikan, mengingat dalam renstra pendidikan terdapat target capaian serta laporan berkala yang harus diketahui oleh semua kepala seksi apakah programnya sudah tersampaikan dan terlaksana oleh UPTD dan sekolah. Namun demikian jika dilihat dari prinsip desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan, maka level sekolah kadang menjadi suatu bahan pemikiran para pengawas dan kepala seksi di dinas pendidikan ketika sekolah tersebut memiliki program unggulan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, atau sebaliknya ketika sekolah memiliki program kerja tetapi tidak dapat terlaksana karena tidak adanya dukungan pembiayaan dari dinas pendidikan.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh UPTD dan pengawas belum berhasil, indikator dinyatakan belum berhasil, di antaranya dapat

direlevansikan dengan data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa ketika program di tingkat sekolah tidak terlaksana maka salah satunya yang banyak dikontrol adalah kesiapan dukungan anggaran untuk kegiatan program tersebut. Kenapa demikian, jawabannya bahwa jika tertuju pada faktor lain sekolah tidak terlalu banyak kendalanya, sebagai contoh jika tertuju kepada tenaga SDM seperti kesiapan sekolah atau guru maka kondisinya tidak terlalu banyak kendala. Untuk melengkapi proses pengendalian ini maka Dinas Pendidikan telah melengkapi sistem pengendalian secara digital bahkan sudah *online*, sebagai contoh mereka memiliki alamat-alamat *website* berkenaan dengan layanan semua seksi di kantor Dinas Pendidikan, sistem pendataan *online*, *Blog* tiap staf di tiap seksi bahkan ada sejumlah UPTD yang sudah dengan aktif mengelola sistem pengendalian elektronik terhadap sekolah-sekolah yang dibinanya.

Pengendalian yang dilakukan ditingkat sekolah sudah pasti dilakukan dalam bentuk pelaporan oleh tiap menanggungjawab kegiatan, serta proses pemantauan dan pengendalian secara langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada semua guru. Program sekolah seperti RPS yang dilaksanakan atas dasar dukungan dari anggaran yang sudah direncanakan dalam bentuk Rencana Keuangan dan Anggaran sekolah, serta dukungan suplemen dari dana BOS selama ini telah menjadi kekuatan utama dalam proses pengendalian yang dilakukan sebagai salah satu bentuk proses pengendalian dari strategi komunikasi yang dilakukan pada semua level.

Pada tataran individu, khususnya bagi siapa saja yang telah melaksanakan program pembelajaran di level sekolah maka ia wajib memberikan laporan dalam bentuk tertulis melalui lembar monitoring. Hal ini penting ketika standar proses diberlakukan dan akan dikendalikan pelaksanaannya.

Untuk standar lainnya seperti standar proses maka seorang guru wajib mengisi daftar absen mengajar dan mengabsen siswanya. Sedang untuk menghasilkan lulusan yang baik maka sistem pengendalian dilakukan *tryout* evaluasi terhadap siswa. Adapun standar tenaga pendidik dan kependidikan, maka proses pengendalian dilakukan dengan melalui proses *updating* dan *upgrading* atau peningkatan kualifikasi tenaga pengawas, Kepala Sekolah dan Guru sehingga semua program pendidikan yang diimplementasikan dapat dengan lancar terlaksana berkat strategi komunikasi yang tepat juga.

3. Upaya Perbaikan ke depan Melalui Proses Evaluasi Strategi Komunikasi

Untuk kajian aspek evaluasi terhadap strategi komunikasi yang dilakukan UPTD mengenai implementasi program 8 standar nasional pendidikan sangat penting dan telah dilaksanakan dengan baik khususnya oleh Dinas Pendidikan, UPTD dan level sekolah. Namun demikian aspek evaluasi ini tidak berhubungan dengan target capaian indikator *outcome* yang dengan cepat bisa dilihat akan tetapi keberhasilannya hanya diukur dari aspek penyampaian informasi, kebijakan, dan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Fenomena pendukung yang diperoleh dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa *outcome* yang diinginkan pada setiap implementasi 8 standar nasional tidak serta-merta dapat dengan cepat diketahui.

Di sisi lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tingkat Kabag di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dilihat progresnya dengan cara mengukur sejumlah program yang disampaikan kepada para kasi, dan para kasi menyampaikannya kepada para kepala UPTD dengan lancar, dari Kepala UPTD diteruskan kepada para Pengawas dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada

semua sekolah. Proses evaluasi yang dilakukan dapat dengan mudah semua program, kebijakan dan jadwal pelaksanaan sudah dapat terlihat dengan baik. Proses evaluasi terhadap keberhasilan semua strategi komunikasi yang dilakukan selama ini dilaksanakan sesuai dengan target program kerja yang dilaksanakan dan melibatkan pihak Dewan Pendidikan sebagaimana yang telah dilakukan pada tahapan pengendalian. Untuk tingkat sekolah penilaian dilakukan dengan mitra Komite Sekolah sebagaimana yang dilaksanakan pada tahap pengendalian. Dari kedua mitra ini maka proses evaluasi sudah dapat dikatakan objektif. Berikut adalah salah satu kutipan dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dalam menggali data empirik terhadap proses evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* Dinas Pendidikan berkenaan dengan 8 standar nasional pendidikan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh penulis tersebut bahwa hasil dari penilaian keberhasilan 8 SNP ini menunjukkan bahwa prosesnya terjadi dimulai dari level sekolah. Aspek evaluasi sangat penting dan secara struktur keorganisasian telah menghasilkan kesinergisan antar lini dan antar organisasi yang berwenang untuk melakukan evaluasi program secara melekat di dalamnya ada bentuk dan dampak dari implementasi strategi komunikasi yang dilaksanakan. Sebagai contoh di tiap sekolah selalu dihadiri oleh Korwas, guna memantau tentang sejauh mana program layanan pembelajaran dilaksanakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ketika program pembelajaran sebagai salah satu implementasi standar proses dan isi dari 8 standar nasional pendidikan ini ternyata mampu mengantarkan kepada keberhasilan siswa dalam menempuh ujian nasional. Berikut adalah duplikasi pemberitaan mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat dalam mengantarkan semua Kabid, Kasi, UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru di

tiap satuan pendidikan hingga mereka mampu menghasilkan lulusan yang lolos UN cukup banyak jumlahnya.

Program evaluasi dari strategi komunikasi yang dilaksanakan untuk semua level manajemen di lingkungan Dinas Pendidikan sampai dengan persekolahan di wilayah binaan Kabupaten di Jawa Barat tempat pembahasan ini dilakukan ternyata hasilnya cukup baik.

Selain apa yang dilakukan di atas juga dilakukan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat yang selama ini segera diantisipasi solusinya maupun pengembangannya.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI KOMUNIKASI

BAB IV

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI KOMUNIKASI

Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dalam rangka implementasi 8 standar nasional, ternyata cukup variatif. Menurut hemat penulis bahwa faktor pendukung dan penghambat ini cenderung lebih banyak yang sifatnya *Human Error* dan disusul oleh dukungan infrastruktur dan sistem koordinasi yang masih sangat formal. Untuk memberikan hasil interpretasi yang cukup maka berikut ini penulis uraikan sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan 8 standar nasional pendidikan.

A. Faktor Pendukung

1. Kesiapan jumlah SDM di lingkungan dinas pendidikan cukup memenuhi tuntutan implementasi 8 standar nasional pendidikan sehingga strategi komunikasi dapat dengan lancar dilaksanakan
2. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh semua Kabid, dan Kasi, serta tenaga fungsional yang ada sangat mendukung pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, sehingga proses komunikasi dapat dengan mudah dilaksanakan
3. Dukungan perangkat manajerial serta SOTK yang dimiliki Dinas Pendidikan cukup mendukung
4. Filosofis dan struktur organisasi kedinasan cukup memberikan kejelasan siapa melakukan apa berkenaan dengan proses komunikasi yang harus dilaksanakan.

5. Jadwal implementasi program yang sudah siap dirumuskan menjadi tolak ukur kapan dan oleh siapa proses mengkomunikasikan kebijakan implementasi program 8 standar nasional dilakukan
6. Dokumen renstra Dinas Pendidikan yang cukup lengkap dan memberikan arah tujuan yang jelas, dengan demikian strategi mengkomunikasikannya cukup mudah dilakukan selama ini
7. Pengetahuan dan kompetensi semua penanggung jawab kegiatan telah memenuhi standar rujukan selama ini
8. Kualifikasi SDM yang dimiliki cukup memberikan kemudahan dalam menyampaikan isi dari pesan-pesan pokok untuk semua program 8 standar nasional pendidikan sampai ke level UPTD;
9. Media elektronik dan media cetak bahkan media digital *online* berupa *website* yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat cukup representatif dalam melaksanakan strategi komunikasi tentang 8 standar nasional pendidikan, mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan report secara digital.

Keberadaan juklak dan juknis mengenai implementasi 8 standar nasional pendidikan sudah lengkap dan telah dipelajari dengan baik oleh semua Kabid, Kasi, tenaga fungsional, UPTD, dan bahkan oleh para guru.

B. Faktor Penghambat

Dari hasil pembahasan, ternyata bukan hanya ditemukan faktor pendukung bagaimana strategi komunikasi untuk mengkomunikasikan 8 standar nasional pendidikan ini bisa dilaksanakan di wilayah binaan Dinas Pendidikan, namun demikian ditemukan pula faktor penghambat keberhasilannya. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri atas:

1. Dukungan kesadaran akan konsistensi dalam melaksanakan program 8 standar nasional pendidikan ini yang belum merata, sehingga strategi komunikasi yang dilakukan cukup bervariasi ketika sudah di lapangan;
2. Tingkat penerimaan terhadap perubahan-perubahan dalam melaksanakan program 8 standar nasional yang masih berbeda-beda antara wilayah binaan di setiap UPTD;
3. Overlap dalam melaksanakan tupoksi sehingga kurang optimal, hal ini mengakibatkan strategi komunikasi tidak efektif;
4. Masalah kepercayaan dalam penganggaran dan proses penyerapan anggaran yang kadang menimbulkan ketidaknyamanan dari *stakeholder* pengelola keuangan, yang berakibat pada kesungkanan dalam proses komunikasi antara pimpinan dan bawahan;
5. Jadwal pencarian anggaran dengan jadwal bergulirnya program yang merujuk kepada ketercapaian 8 standar nasional pendidikan selama ini sering tidak berbarengan, hal ini mengakibatkan proses komunikasi menuntut untuk terus diulang-ulang lagi, terutama kepada para pemegang kuasa anggaran dan para pelaksana di tingkat sekolah;
6. Sistem pelaporan yang selama ini sudah mulai menggunakan sistem *online* cukup merepotkan proses pembiasaan dan menuntut strategi komunikasi khusus dalam mensosialisasikannya yang berujung pada upaya pembekalan (*workshop*)
7. Sering banyaknya rotasi yang dilakukan sehingga pesan yang awalnya sampai dengan baik dan utuh serta diterima oleh staf yang pertama, malahan menjadi mentah lagi ketika staf sudah digantikan dengan yang baru
8. Dukungan transportasi yang masih terbatas ketika seorang pengawas harus melakukan pembinaan dengan target 4

sekolah perhari masih belum optimal, hal ini menyulitkan komunikasi yang kompleks mengenai instruksi , kebijakan dan bahan yang berhubungan dengan implementasi 8 standar nasional pendidikan;

9. Masih ada *stakeholder* level sekolah yang belum memaknai seutuhnya tentang 8 standar nasional pendidikan ini.
10. Media-media elektronik dan dukungan infrastruktur untuk mengi-rimkan pesan dengan bobot yang besar masih sulit terealisasikan;
11. Kekuatan akses internet untuk wilayah tertentu masih menjadi kendala dalam melakukan strategi komunikasi secara *online*.

C. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Konteks Implementasi

Pembahasan inti yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen dalam konteks implementasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sampai dengan tingkat persekolahan dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan.

1. Formulasi Perencanaan Pendidikan dan Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi
c. Standar Proses
d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
e. Standar Sarana dan Prasarana
f. Standar Pengelolaan
g. Standar Pembiayaan Pendidikan

h. Standar Penilaian Pendidikan (*Sumber Dokumen Rencana Strategi Pembangunan Nasional Pendidikan, Pendidikan Nasional 20012).*

Dari sumber naskah pembangunan pendidikan di Indonesia ini maka para *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidikan akan membutuhkan bagaimana proses perencanaan untuk kepentingan implementasi program yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna.

2. Fungsi dan Tujuan Standar

Pembangunan pendidikan melalui 8 Standar Nasional Pendidikan akan membutuhkan strategi komunikasi dari seorang pimpinan kepada bawahannya dalam rangka implementasi program secara lebih baik. Proses penyampaian pesan dari atasan kepada bawahan inilah maka sangat banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan strategi komunikasi yang dilaksanakan. Jika melihat kondisi eksisting jaman sekarang menunjukkan bahwa sejumlah pejabat di lingkungan pendidikan sebagaimana penulis jelaskan telah banyak faktor-faktor yang selalu menjadi media atau peralatan tertentu yang mempengaruhi keberhasilan pesan untuk dapat disampaikan kepada audiens. Sebagai contoh ketika kepala Dinas menyampaikan informasi tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam implementasi 8 standar nasional pendidikan, maka ada sejumlah media yang harus dipikirkan oleh para pimpinan terutama kepala dinas kabupaten, UPTD, Pengawas dan Kepala sekolah kepada masing-masing bawahannya agar pesan utuh diterima dengan baik. Salah satu media yang paling berhubungan dekat dengan strategi komunikasi pimpinan adalah media Dokumentasi atau dalam bentuk lembaran surat undangan, pemberitahuan, instruksi, dan spanduk tiap program kegiatan yang dibuat oleh masing-masing tim dalam

rangka mendukung implementasi program kerja. Namun di sisi lain media yang sebenarnya banyak digunakan sebagai penerapan strategi komunikasi pimpinan dinas pendidikan selama ini adalah media diskusi, forum rapat, undangan kerja sama untuk melaksanakan semua keputusan bersama dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan sampai ke level persekolahan bahkan level siswa.

Sebagai contoh perencanaan untuk melaksanakan strategi komunikasi tentang pencapaian standar kompetensi lulusan (standar pertama), maka pimpinan selalu melaksanakan proses komunikasinya dengan menggunakan media dokumentasi dan presentasi. Kedua media ini cukup efektif, di mana media dokumentasi selalu digunakan untuk mengajak (persuasif) kepada bawahannya agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik berkenaan dengan bagaimana cara membantu para lulusan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai menengah atas agar memperoleh hasil yang baik dari segi nilai kognitif, afektif, psikomotor dan performance-nya. Demikian juga dengan media presentasi, media ini selalu digunakan oleh pimpinan dinas pendidikan secara efektif ketika mereka memberikan penjelasan dan penyampaian informasi secara langsung dalam bentuk rapat atau pertemuan dengan bawahannya. Sebagai contoh bagaimana kondisi profil dan kondisi yang diharapkan untuk dapat dicapai disajikan dalam bentuk grafik, atau ilustrasi yang menarik bagi komunikasi selama mereka menyaksikan presentasi pimpinan dalam setiap rapat.

Dari kedua contoh media yang direncanakan dan digunakan dalam rangka melakukan strategi komunikasi bermedia maka hasilnya selama ini cukup berhasil. Sehingga fenomena yang ditemukan menunjukkan bahwa sejumlah dokumentasi mengenai program pembangunan pendidikan sudah banyak

didokumentasikan dalam bentuk digital. Demikian juga dengan media presentasi semakin banyak digunakan dalam rangka memperluas sasaran komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang ke seluruh wilayah binaan program pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Dalam konteks perencanaan strategi komunikasi maka Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejumlah perencanaan komunikasi yang dilakukan untuk bidang ini adalah dengan menggunakan data-data lulusan sebelumnya yang didokumentasikan oleh para komunikan pimpinan dinas pendidikan yang kemudian dalam proses komunikasi disampaikan dengan sesama kepada audiens dalam hal ini adalah pemegang dan penanggung jawab program kegiatan di tingkat bawahnya.

4. Standar Isi

Dalam konteks strategi komunikasi maka ada beberapa temuan dan konstruksi perencanaan strategi komunikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mengingat standar isi tersebut memuat kerangka

dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan maka media yang digunakan untuk mendukung strategi komunikasi ini adalah media dokumentasi dan media-media grafis yang berisi pesan pendidikan dan kebijakan serta pembelajaran yang harus disampaikan secara rutin oleh pimpinan kepada bawahan. Lebih lanjut analisis terhadap fenomena Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ada hasil analisis yang menunjukkan bahwa standar isi ini adalah cukup strategis kedudukannya sebagai komponen isi yang sekaligus komponen pesan penting dalam konteks keberhasilan strategi komunikasi yang dilakukan pimpinan. Dengan demikian standar isi diharapkan mampu memiliki kekuatan psikologi secara komunikasinya, sebagaimana dijelaskan oleh Jalalludin Rakhmat (1999:12) yang menunjukkan bahwa pesan yang dikemas dengan baik dan menarik untuk dilihat dan didengarkan oleh komunikan akan mampu mempengaruhi perubahan ide dan perspektif secara cepat dalam suatu proses komunikasi yang terjadi.

5. Standar Proses

Standar proses dalam konteks perencanaan strategi komunikasi biasanya berhubungan dengan bagaimana kualitas penyampaian dan efektif tidaknya dilihat dari proses penyampaian sejumlah materi pelajaran atau pesan dan media komunikasi yang banyak digunakan oleh pimpinan kepada bawahan. Selanjutnya pada level implementasi program untuk standar ini maka analisis yang paling penting adalah bagaimana sejumlah pendekatan, model komunikasi yang diterapkan mampu mendukung kecepatan penyampaian pesan komunikasi

baik dalam bentuk kebijakan, peraturan, instruksi, undangan, yang berasal dari pimpinan sampai kepada bawahan.

Adapun dalam level persekolahan maka analisis proses dalam standar nasional pendidikan ini berhubungan dengan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap program pendidikan yang mampu diserap dan ditunjukkan dalam bentuk perubahan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dari para siswa yang mengikuti proses komunikasi pembelajaran selama itu. Dalam hal ini Supriadie dan Darmawan (2013:34) menjelaskan bahwa proses komunikasi pembelajaran pada dasarnya akan dipengaruhi keberhasilannya oleh metode dan cara penyampaian materi oleh guru kepada siswanya.

6. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Penulis berpendapat bahwa standar tenaga Pendidik dalam hal ini mulai dari guru, instruktur, fasilitator semuanya harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai dan sesuai keilmuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU guru dan dosen (2012) yang ditegaskan bahwa standar tenaga pendidikan ini harus sesuai dengan tuntutan standar-standar berikut: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (d) Kompetensi sosial.

Sebagaimana hasil pembahasan yang menjelaskan bahwa Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Kelompok-kelompok ini memerlukan *update* pengetahuan dan keterampilan sehingga proses komunikasi yang dilakukan memungkinkan terus meningkat dan semakin efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh Karom (2014:138) menunjukkan bahwa ada sejumlah kompetensi penting dari hasil analisis kompetensi pedagogi yang dimiliki oleh para tenaga pendidikan

yang harus diperhatikan, di antaranya mencakup kompetensi dalam menyiapkan pembelajaran, melaksanakan, menilai dan memberikan remedial dan pengembangan pembelajaran. Jika melihat analisis mengenai kompetensi pendidik maka dewasa ini standar keilmuan semakin terus ditingkatkan oleh dinas pendidikan bahwa setiap tenaga pendidik harus menyesuaikan tingkatan kualifikasi pendidikan formalnya dari tahun ke tahun.

Selanjutnya bahwa standar Tenaga kependidikan yang meliputi analisis terhadap tugas-tugas khusus maupun tugas tambahan ataupun tugas yang melekat pada diri tenaga kependidikan seperti kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan, hendaknya menjadi perhatian penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidiknya, di mana tenaga kependidikan adalah *supporting* dan pendukung yang kuat dalam keberhasilan proses komunikasi pembelajaran yang biasa diakukan oleh para tenaga pendidik untuk semua jenjang dan bentuk penyelenggaraan pendidikan dewasa ini.

7. Analisis Standar Sarana dan Prasarana

Standar analisis sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian kualitas pembangunan pendidikan, Dalam undang-undang sarana pendidikan ini sesuai dengan permen Pendidikan Nasional no. 24 tahun 2007. Demikian

juga dengan standar sarana prasarana untuk jenjang SMK yaitu telah diatur pada permen No. 40 tahun 2008. Komponen penting dari standar sarana ini mencakup: kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,

tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (SNP, 2003: hal 5). Standar ini diharapkan mampu menjadi sarana pendukung dalam mendukung kejelasan untuk bagian standar sarana ini kepada para implementator kebijakan. Sebagaimana dari hasil observasi lapangan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

> *Bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.*

Dari pembahasan tersebut maka standar sarana ini akan menjadi standar yang utuh yang tidak mungkin terpenuhi tanpa suatu ketetapan aturan implementasi yang akan didukung oleh sejumlah strategi komunikasi yang mampu membantu mewujudkannya.

8. Standar Pengelolaan

Dari hasil pembahasan dan interpretasi hasil pembahasan menunjukkan bahwa Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh pemerintah provinsi. Dari tiga bagian ini maka untuk mengimplementasikannya perlu suatu perencanaan strategi komunikasi cukup komprehensif yaitu mencakup semua bagian penting yang dapat membantu transformasi informasi mengenai standar ini sehingga para audiens dan para implementator mampu menerjemahkannya dalam bentuk program kegiatan yang terukur. Demikian juga dengan standar pengelolaan pendidikan untuk level pemerintah daerah, maka peran dinas pendidikan kabupaten sangat penting, pengelolaan harus dilakukan berdasarkan rencana strategi yang telah dirumuskan bersama. Ada pun pengelolaan oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi, pada dasarnya lebih cenderung mengarah kepada pengelolaan dan pembinaan serta supervisi yang dibutuhkan oleh level pengelolaan di bawahnya.

Dalam implementasisi bahwa standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Standar Pembiayaan Pendidikan

Dalam konteks standar pembiayaan ini, maka kajian standar biaya satuan pendidikan merupakan hal terpenting yang diperoleh selama pembahasan dilaksanakan di lapangan. Temuan dan interpretasi data mengenai antara pembiayaan ini sangat penting mengingat semua kegiatan pendidikan, terlebih

dalam konteks layanan publik dalam bidang pendidikan, maka standar ini merupakan standar pokok dalam sebuah layanan pendidikan. Berikut adalah hasil pembahasan dan interpretasi data mengenai standar pembiayaan yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan sejumlah formula pemetaan anggaran penyelenggaraan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Dari bahasan tersebut yang menjadi permasalahan yang belum berhenti sampai sekarang adalah masalah alokasi untuk bidang kesejahteraan staf, pegawai, manajerial, pimpinan, staf, karyawan, dan termasuk para guru yang melaksanakan tugas pokoknya melebihi tuntutan standar nasional pendidikan.

10. Standar Penilaian Pendidikan

Berbicara standar pembahasan dalam hal ini akan terfokus kepada sejumlah sasaran penilaian, walaupun dalam konteks

kajian ini hanya terfokus kepada implementasi kebijakan namun ketika dilakukan proses penilaian maka yang akan banyak terlibat adalah standar keuangan dan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki oleh organisasi penyelenggaraan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Berikut adalah hasil pembahasan dan interpretasi data mengenai temuan yang berhubungan dengan standar penilaian.

> *Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. source: BSNP - Standar Nasional Pendidikan*

Ujung tombak pelaksanaan tiap standar nasional ini di antaranya adalah para pengawas dan para kepala sekolah serta para guru. Di mana para pengawas diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pembina yang sekaligus mengontrol pelaksanaan semua bidang yang dilakukan oleh para kepala sekolah dan guru. Adapun para guru dapat dikatakan sebagai implementator semua tahapan perencanaan strategi komunikasi yang langsung berhadapan dengan para siswa di kelas maupun di luar kelas, di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal dan kejar paket.

Bentuk dokumen perencanaan untuk tiap level manajemen yang disesuaikan dengan tingkatan strategi komunikasi, di antaranya adalah dokumen Renstra untuk perencanaan strategi komunikasi tingkat kabupaten, dan Rincian Program Kepala Bidang untuk tingkat Kepala Bidang, serta Rincian program Kepala Seksi untuk tingkat Seksi tetap jenjang pendidikan, dokumen Rencana Kerja UPTD untuk tingkat UPTD di wilayah Kecamatan, serta Program kerja pengawas untuk tingkat pengawas. Di tingkat sekolah adalah Rencana Kerja Sekolah untuk tingkat Sekolah, dan Rencana Pembelajaran untuk tingkat Guru. Dengan demikian strategi komunikasi yang akan dilaksanakan untuk tiap level manajemen dalam rangka menopang keberhasilan program kerja 8 standar nasional pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari temuan ini menunjukkan bahwa aspek penilaian ini akan memberikan *input* bagi para perencanaan dan pimpinan periode selanjutnya. Di mana kemampuan manajerial seperti apa pun maka tidak akan terlepas dari kegiatan penilaian terhadap implementasi program yang dilaksanakannya.

11. Implementasi Perencanaan dan Strategi Komunikasi Manajemen Kebijakan Pendidikan

Dari hasil pembahasan dan interpretasi data yang telah dilakukan maka berikut adalah pembahasan mengenai pelaksanaan strategi komunikasi manajemen kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak UPTD berkenaan dengan implementasi 8 standar nasional pendidikan sehingga pencapaiannya mampu dilakukan oleh level sekolah berdasarkan analisis internal maupun eksternal. Sebagaimana telah dilakukan selama pembahasan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi komunikasi yang diperuntukkan guna menyampaikan semua kebijakan-kebijakan dinas pendidikan dalam hal ini adalah

UPTD menunjukkan cukup dinamis. Artinya bahwa pelaksanaan strategi komunikasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari UPTD masing-masing.

Faktor-faktor internal biasanya berhubungan dengan individu komunikator tingkat UPTD yang mampu menguasai pesan yang berhubungan dengan semua kebijakan yang perlu disampaikan kepada komunikan atau pihak sekolah melalui para pengawasnya. Dengan aspek penting secara internal dalam hal ini adalah kredibilitas komunikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi strategi komunikasi yang dimaksud. Sebagaimana dijelaskan oleh Theodore Newcomb (1953) dalam Deddy Mulyana (2001:142), dalam model ini terdapat suatu sikap yang simetri, yaitu dari A menyampaikan informasi terhadap yang lainnya, yaitu B, mengenai sesuatu atau X. Model tersebut mengasumsikan bahwa orientasi A terhadap B dan terhadap X saling bergantung, dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 orientasi. Dengan demikian jika dikaitkan dengan tugas UPTD sebagai (A) yang memiliki persepsi khusus terhadap kebijakan implementasi 8 standar nasional pendidikan, menyampaikan pesannya kepada pihak Kepala sekolah sebagai (B) yang harus menyikapi sama mengenai kebijakan implementasi 8 standar nasional pendidikan tersebut, maka selanjutnya antara A dan B harus memiliki keterkaitan saling mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut hingga dapat terimplementasikan dengan baik pada level sekolah.

Jika hal ini dikaitkan dengan analisis internal lainnya bagaimana kebijakan-kebijakan implementasi 8 standar nasional pendidikan ini mampu direalisasikan dan diterapkan secara strategis oleh UPTD sampai kepada level sekolah maka berikut adalah hasil pembahasan dan interpretasi yang cukup mendukung dalam pembahasan bagian ini yaitu bahwa:

Jika dianalisis dengan faktor internal organisasi UPTD, mengenai aspek jadwal pembinaan yang harus dilakukan, maka untuk analisis dari segi strategi komunikasi yang dapat dilakukan, penulis kaji bahwa hal tersebut akan berhubungan dengan upaya pihak UPTD dan pengawas untuk melaksanakan proses promosi atau *advertising* dalam konteks penyampaian sejumlah kebijakan-kebijakan implementasi 8 standar nasional pendidikan yang dikemas menjadi pesan-pesan menarik untuk dapat dipahami dan mengerti oleh level sekolah. Dalam hal ini Kotler (2000:578) menjelaskan bahwa *advertising* adalah segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran, dari pendapat tersebut ada dua kata penting yang sangat mendukung faktor internal UPTD dalam menyampaikan kebijakan 8 standar nasional pendidikan kepada level sekolah, yaitu kata penyajian non-personal dan promosi ide.

Dalam konteks isi kebijakan 8 standar nasional pendidikan yang terdiri atas sejumlah indikator, maka untuk dapat terimplementasikannya sangat memerlukan sejumlah kompetensi dari pihak komunikator dalam hal ini level UPTD dan level persekolah. Kedua pihak ini setidaknya mampu memahami apa makna dari kebijakan-kebijakan yang harus menjadi sebuah tindakan-tindakan oleh siapa yang akan merealisasikan kebijakan-kebijakan 8 standar nasional pendidikan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Wahab (1997: 39) bahwa:

> *Proses implementasi kebijakan merupakan upaya melihat kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan implementasinya di lapangan. Implementasinya kebijakan merupakan proses yang krusial dalam kebijakan publik, karena bukan hanya berkaitan dengan hal-hal mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur*

turin lewat jalur birokrasi , melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh kebijaksanaan

Dengan demikian jika melihat pendapat di atas maka analisis data yang diperoleh selama pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengenai 8 standar nasional pendidikan merupakan suatu hal penting yang harus dijabarkan dengan pesan-pesan yang lebih ringan dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh komunikator dalam hal ini UPTD dan kepala sekolah kepada para guru sehingga sejumlah kebijakan-kebijakan tersebut mampu memberikan kejelasan dan mencapai tujuan program dari 8 standar nasional pendidikan tersebut secara utuh oleh para ujung tombak pembangunan pendidikan ini.

Strategi komunikasi yang dilakukan dengan menerapkan analisis kebijakan publik dalam hal ini kebijakan-kebijakan layanan publik dalam bidang pendidikan sangat penting dipahami oleh para *stakeholder* pendidikan mengingat faktor-faktor internal dalam implementasi kebijakan terletak pada diri para pemegang kebijakan itu sendiri. Dalam konteks strategi komunikasi ini maka pemegang kebijakan tersebut di antaranya adalah komunikator, maka UPTD dan Pengawas serta Kepala Sekolah sebagai jenjang keorganisasian dalam lembaga pendidikan merupakan kelompok-kelompok internal yang akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan 8 standar nasional pendidikan. Dalam hal ini Donald Van Mater dan Van Horn (1975: 463) menguraikan implemenasi kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Dengan

memandang bahwa kebijakan 8 standar nasional pendidikan ini merupakan kebijakan layanan publik dalam bidang pendidikan maka UPTD, pengawas dan kepala sekolah merupakan pihak-pihak pemerintah yang sangat penting kedudukannya dalam proses implementasi program yang ada dalam 8 standar nasional pendidikan sehingga mampu terwujud.

Secara eksternal kajian terhadap pelaksanaan strategi komunikasi dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan, di antaranya berhubungan dengan komunitas pendidikan sesuai media perantara bagaimana isi dari kebijakan 8 standar nasional pendidikan ini dapat dipahami. Beberapa fenomena yang diperoleh selama studi di lapangan menunjukkan adanya proses pengolahan pesan yang berbeda di antara komunitas manajemen pada level Dinas Pendidikan hingga level para guru atau implementator kebijakan yang dimaksud. Dengan demikian faktor eksternal dalam hal ini lebih dapat dikelompokkan ke dalam kultur budaya atau kondisi kebiasaan dari masing-masing level manajemen yang berbeda-beda dalam menyikapi sejumlah kebijakan yang harus dilaksanakan. Dalam konteks perbedaan persepsi yang terjadi dalam hal ini wajar-wajarnya saja terjadi mengingat faktor persepsi dan pemahaman yang mungkin tidak dapat disamakan dalam jangka waktu yang bersamaan, mengingat hal ini memerlukan analisis strategi komunikasi yang tepat dan sesuai dengan sejumlah langkah-langkah pemahaman semua pihak terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program 8 standar nasional pendidikan yang dimulai secara *top down manajerial*. Sebagaimana dinyatakan oleh George C. Edwar III (1980:1) yang menyatakan bahwa" *without effective implementation the decision of policy makers will not be carriout sucessfully.* Lebih lanjut dijelaskan George C. Edwar III (1980:10) bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, keempat faktor tersebut yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber-sumber daya; (3) sikap; dan (4) birokratik.

Dalam konteks implementasi kebijakan 8 standar nasional pendidikan melalui strategi komunikasi yang adaptif, sebagaimana penulis rujuk dari pendapat Edward II (1980) di atas maka dapat dinyatakan bahwa komunikasi di sini dapat diartikan sebagai upaya untuk ditempatkan sebagai alat penyampaian dan proses penyampaian informasi oleh komunikator berjenjang mulai dari Dinas pendidikan kabupaten di Jawa Barat kepada Kepala UPTD, kemudian dilakukan kepada kepala Sekolah yang berada pada level ke-3 dari sistem implementasi kebijakan program 8 standar nasional pendidikan ini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diilustrasikan suatu model sebagai berikut:

Faktor eksternal dalam hal ini komunitas sumber daya yang dimiliki dinas pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang dimaksud. Demikian juga dengan kondisi struktur organisasi yang dimiliki dinas pendidikan tingkat UPTD dan sekolah tentunya tidak sama. Ada sejumlah SDM yang bertugas memang sebagai pemegang kebijakan dan pembina atau supervisor untuk tingkat UPTD yang sudah pati akan berbeda dengan level manajemen dan struktur organisasi di tingkat persekolahan. Keberadaan struktur birokrasi pada tingkat UPTD merupakan salah satu faktor utama dalam konteks pengaruh eksternal dalam implementasi kebijakan 8 standar nasional pendidikan.

Struktur organisasi di tingkat UPTD yang lebih banyak tugasnya tertumpu kepada para pengawas sebagai perangkat eksternal dalam konteks strategi komunikasi, di mana para pengawas ini memiliki tugas untuk melakukan transformasi informasi mengenai sejumlah kebijakan dari UPTD menuju

level sekolah binaannya. Selanjutnya faktor eksternal adalah disposisi, yaitu sejumlah kebijakan tertulis dan tindakan yang teraktualisasikan dari UPTD melalui Pengawasnya kepada Level sekolah dan selanjutnya disposisi tersebut diterima oleh Kepala sekolah yang selanjutnya dilanjutkan dan atau dilaksanakan secara bersama-sama dengan para guru untuk mempraktikkan sejumlah kompetensi dalam 8 standar nasional pendidikan.

12. Pengendalian dan Upaya Perbaikan ke depan Tentang Strategi Komunikasi

Dari temuan pembahasan dan interpretasi data yang telah dilakukan khususnya berkenaan dengan proses pengendalian terhadap implementasi strategi komunikasi yang dilakukan di lingkungan Dinas pendidikan hingga level UPTD pada dasarnya jika dianalisis melalui pendekatan ALE dari Grunig, maka dapat dirumuskan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh B Steyn, E de Beer,(2013: 29) yaitu sebagai berikut.

> *Provides an organisation/institution with a societal (outside-in) perspective by feeding intelligence with regards to strategic stakeholders2 (their expectations, concerns, values, and norms), societal issues, and the publics3 (interest/ advocacy groups) that emerge around the issues into the organisation's strategy development processes-thereby assisting an organisation to adapt its trategies/goals/policies/ behaviour to its societal and stakeholder environment;*

Secara umum jika melihat pendapat di atas maka proses pengendalian penerpaan strategi komunikasi dalam sebuah manajemen organisasi yang dalam hal ini organisasi pendidikan, maka ada tiga faktor penting yang akan menjadi indikator keberhasilannya yaitu aspek harapan dan kenyataan yang dihadapi oleh *stakholder*, fokus pada upaya pencapaian bersama, memahami semua nilai-nilai dari program dan kebijakan yang

dimaksudkan dalam 8 standar nasional pendidikan, serta bagaimana norma-norma yang mengatur semua aktivitas strategi komunikasi yang dilakukan dari pimpinan sampai staf.

Kegiatan pengendalian selama pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, UPTD merupakan kegiatan bersama yang dilakukan secara rutin. Pengendalian yang dilakukan dinas pendidikan biasanya dilakukan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan bersama dengan pihak pengawas, di mana beberapa instrumen tentang pengisian sejumlah data kegiatan yang dilakukan oleh UPTD diisi oleh pengawas, kemudian dilaporkan kepada tiap Seksi di tingkat Dinas Pendidikan. Pada tahapan ini maka strategi komunikasi akan tergantung kepada apa yang dilakukan oleh pengawas ketika menerima informasi tentang form isian yang harus di isi, kemudian kapan ia mengirimkannya kembali. Sejumlah form isian biasanya merujuk kepada semua kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh semua sekolah yang dibina oleh UPTD.

Proses implementasi strategi komunikasi yang kemudian dikendalikan keberhasilannya selama ini telah memberikan kesinergisan antar semua seksi, dan mereka telah mampu memetakan masing-masing item dari 8 standar nasional pendidikan secara terintegrasi. Sebagai contoh dari temuan di kabupaten di Jawa Barat menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan berkenaan dengan hasil monitoring sejumlah program kerja di tingkat sekolah dapat diterima dalam waktu dan jadwal yang tepat.

Pada dasarnya ada sejumlah standar dan proses pengendalian implementasi strategi komunikasi yang secara terintegrasi dengan implementasi program kegiatan di level UPTD dan persekolahan, salah satunya adalah sistem pengendalian dalam bentuk kegiatan sinkronisasi sejumlah

program kerja antara UPTD yang satu dengan UPTD lainnya terhadap program kerja pokok yang dimiliki oleh semua seksi di tingkat kabupaten. Melalui rapat-rapat pimpinan dan rapat dinas, maka proses pengendalian dilakukan secara rutin oleh pihak Kasi dengan cara memanggil kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan selalu diwajibkan membawa sejumlah laporan capaian proses pembinaan, pengendalian yang dilakukan oleh para pengawas, serta capaian program kegiatan dari sekolah binaan UPTD masing-masing.

Sistem pengendalian demikian selama ini telah menjadi masukan bagi para perumus renstra di lingkungan dinas pendidikan, mengingat dalam renstra pendidikan terdapat target capaian serta laporan berkala yang harus diketahui oleh semua kepala seksi apakah programnya sudah tersampaikan dan terlaksana oleh UPTD dan sekolah. Namun demikian jika di lihat dari prinsip desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan, maka level sekolah kadang menjadi suatu bahan pemikiran para pengawas dan kepala seksi di dinas pendidikan ketika sekolah tersebut memiliki program unggulan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, atau sebaliknya ketika sekolah memiliki program kerja tetapi tidak dapat terlaksana karena tidak adanya dukungan pembiayaan dari dinas pendidikan.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh UPTD dan pengawas belum berhasil, indikator dinyatakan belum berhasil, di antaranya dapat direlevansikan dengan data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa ketika program di tingkat sekolah tidak terlaksana maka salah satunya yang banyak dikontrol adalah kesiapan dukungan anggaran untuk kegiatan program tersebut. Kenapa demikian, jawabannya bahwa jika tertuju pada faktor lain sekolah tidak terlalu banyak kendalanya, sebagai contoh jika tertuju kepada tenaga SDM seperti kesiapan sekolah atau guru maka

kondisinya tidak terlalu banyak kendala. Untuk melengkapi proses pengendalian ini maka Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat telah melengkapi sistem pengendalian secara digital bahkan sudah *online*, sebagai contoh mereka memiliki alamat-alamat *website* berkenaan dengan layanan semua seksi di kantor Dinas Pendidikan, sistem pendataan *online*, *Blog* tiap staf di tiap seksi bahkan ada sejumlah UPTD yang sudah dengan aktif mengelola sistem pengendalian elektronik terhadap sekolah-sekolah yang dibinanya. Fenomena di atas menunjukkan bahwa ini kantor keberhasilan atas implementasi strategi komunikasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam melakukan proses pengendalian terhadap apa yang menjadi target keberhasilan implementasi program dari institusi lembaga publik dalam bidang pendidikan. Sebagaimana penulis adaptasi dan elaborasi berdasarkan indikator pengendalian fungsi organisasi layanan publik yang dijelaskan oleh Dwiyanti (2000), dalam Ariany, Ria dan Ekha Putera (2001: 35) menunjukkan bahwa:

> *Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi pelayanan publik, yaitu: (1) Produktivitas, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan; (2) Kualitas Layanan, Kepuasan masyarakat pendidikan terhadap program implementasi 8 standar nasional pendidikan seperti apa; (3) Responsivitas, yaitu kemampuan dinas pendidikan dalam melayani masyarakat pendidikan dari tingkat Dinas Pendidikan sampai dengan level sekolah; (4) Responsibilitas, apakah dinas dan sekolah mampu melaksanakan tugasnya dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan sesuai dengan prinsip dan teposku lembaga mereka masing-masing atau tidak; (5) Akuntabilitas, yaitu seberapa besar Dinas*

Pendidikan dan Level sekolah konsisten dalam melaksanakan misi sejumlah program 8 standar nasional pendidikan dan konsisten dalam melayani semau masyarakat pendidikan.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa proses pengendalian atau pengontrolan terhadap perilaku komunikasi yang merupakan bentuk dari implementasi strategi komunikasi dari para *stakeholder* di lingkungan dinas pendidikan hingga persekolahan, diharapkan semuanya dapat dikendalikan dengan baik, dan kenyataannya memang demikian. Hal ini didukung oleh temuan-temuan selama di lapangan dan interpretasi data yang telah dilakukan. Dengan demikian ada fenomena bahwa faktor perilaku komunikasi secara individu dari pihak *stakeholder* Dinas Pendidikan dan Persekolahan. Dalam konteks ini menurut Papali, et. al, (2004) menyatakan bahwa *self regulation* yang kuat atau positif, akan menghantarkan individu mampu untuk menahan dorongan-dorongan dan mengendalikan tingkah lakunya pada saat tidak ada kontrol dari lingkungan. (Sofyandi, Agus, K dan Rosiana, Dewi, 2013: 83)

Pengendalian yang dilakukan ditingkat sekolah sudah pasti dilakukan dalam bentuk pelaporan oleh tiap penanggung jawab kegiatan, serta proses pemantauan dan pengendalian secara langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada semua guru. Program sekolah seperti RPS yang dilaksanakan atas dasar dukungan dari anggaran yang sudah direncanakan dalam bentuk Rencana Keuangan dan Anggaran sekolah, serta dukungan suplemen dari dana BOS selama ini telah menjadi kekuatan utama dalam proses pengendalian yang dilakukan sebagai salah satu bentuk proses pengendalian dari strategi komunikasi yang dilakukan pada semua level.

Pada tataran individu, khususnya bagi siapa saja yang telah melaksanakan program pembelajaran di level sekolah

maka ia wajib memberikan laporan dalam bentuk tertulis melalui lembar monitoring. Hal ini penting ketika standar proses diberlakukan dan akan dikendalikan pelaksanaannya. Untuk standar lainnya seperti standar proses maka seorang guru wajib mengisi daftar absen mengajar dan mengabsen siswanya. Sedang untuk menghasilkan lulusan yang baik maka sistem pengendalian dilakukan *tryout* evaluasi terhadap siswa. Adapun standar tenaga pendidik dan kependidikan, maka proses pengendalian dilakukan dengan melalui proses *updating* dan *upgrading* atau peningkatan kualifikasi tenaga pengawas, Kepala Sekolah dan Guru sehingga semua program pendidikan yang diimplementasikan dapat dengan lancar terlaksana berkat strategi komunikasi yang tepat juga.

13. Proses Evaluasi Strategi Komunikasi yang Dilakukan UPTD di Kabupaten

Dari temuan penelitian dan interpretasi data maka proses evaluasi pada dasarnya selalu melekat pada aspek manajemen yang dilakukan mulai dari UPTD sampai dengan level persekolahan. Proses evaluasi yang sangat dibutuhkan dalam mengukur keberhasilan strategi komunikasi dalam konteks manajemen di UPTD dan persekolahan di antaranya adalah aspek pengukuran dampak atau efek dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* dan pimpinan yang ada di persekolahan. Jika dianalisis berdasarkan teori dari Grunig dan pakar dalam bidang strategi komunikasi dalam konteks strategi manajemen komunikasi, maka berikut adalah salah satu analisis yang cukup mendukung terhadap fenomena hasil pembahasan yang dilakukan berkenaan dengan evaluasi penerapan strategi komunikasi dalam konteks 8 standar nasional pendidikan.

Strategic communication management (SCM), according to the Pretoria School of thought (De Beer, 2010; De Beer, Steyn

& Rensburg, forthcoming 2013), is a scientific worldview or paradigm that conceptualises communication management in the strategic context of the organisation. In this view, 'communication management' is not equated with 'strategic communication management'. Communication management is defined as the management of communication Steyn & De Beer: Conceptualising strategic communication management (SCM) in the context of governance and stakeholder inclusiveness between an organisation (institution) and its internal and external stakeholders, and other societal interest groups, and is performed at the functional level of an organisation. SCM assumes corporate communication to be a strategic management function with a mandate to function at the strategic (macro, societal, or environmental) level (Steyn, in Toth, 2007; in Karakaya Şatir, 2011). Grunig, Grunig, and Dozier (2002: 143, 383) call this the 'full-participation' approach to strategic corporate communication, where the function is 'empowered,' i.e. involved before strategic decisions are made.

Jika melihat pendapat dari sejumlah ahli di atas maka aspek evaluasi hendaknya mampu menyentuh kelembagaan, pemikiran, dan paradigma tentang manajemen komunikasi yang membutuhkan strategi tertentu sehingga mampu merangkul sejumlah pihak yang berkepentingan dan mendukung terhadap pencapaian tujuan organisasi baik secara eksternal maupun internal. Lebih jauh lagi bahwa evaluasi dari strategi komunikasi yang diterapkan hendaknya juga mampu mewujudkan suatu implementasi dari manajemen komunikasi bersama antara sejumlah *stakeholder* yang masing-masing memiliki kemampuan yang sesuai dengan tupoksinya sehingga dalam pelaksanaan tugas masing-masing dapat diwujudkan secara optimal. Dengan

demikian dari hasil temuan pembahasan dan interpretasi data menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan, UPTD, Sekolah dengan melibatkan unsur Dewan Pendidikan dan Komite sekolah merupakan bentuk nyata dari implementasi strategi komunikasi yang mendukung keberhasilan manajemen komunikasi di lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk kajian aspek evaluasi terhadap strategi komunikasi yang dilakukan UPTD mengenai implementasi program 8 standar nasional pendidikan sangat penting dan telah dilaksanakan dengan baik khususnya oleh Dinas Pendidikan, UPTD dan level sekolah. Namun demikian aspek evaluasi ini tidak berhubungan dengan target capaian indikator *outcome* yang dengan cepat bisa dilihat akan tetapi keberhasilannya hanya diukur dari aspek penyampaian informasi, kebijakan, dan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Fenomena pendukung yang diperoleh dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa *outcome* yang diinginkan pada setiap implementasi 8 standar nasional tidak serta-merta dapat dengan cepat diketahui.

Di sisi lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tingkat Kabag di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dilihat progresnya dengan cara mengukur sejumlah program yang disampaikan kepada para kasi, dan para kasi menyampaikannya kepada para kepala UPTD dengan lancar, dari Kepala UPTD diteruskan kepada para Pengawas dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada semua sekolah. Proses evaluasi yang dilakukan dapat dengan mudah semua program, kebijakan dan jadwal pelaksanaan sudah dapat terlihat dengan baik. Proses evaluasi terhadap keberhasilan semua strategi komunikasi yang dilakukan selama ini dilaksanakan sesuai dengan target program kerja yang dilaksanakan dan melibatkan pihak Dewan Pendidikan

sebagaimana yang telah dilakukan pada tahapan pengendalian. Dari fenomena temuan pembahasan dan interpretasi di atas maka kaitannya dengan evaluasi keberhasilan atas penerapan strategi komunikasi yang dilakukan dinas yang mencoba terkolaboratif dengan pihak Dewan Pendidikan, berarti secara praktis telah mampu menciptakan kondisi persaudaraan inklusif, di mana menurut Rakhmat (Editor), 1998:471) dijelaskan bahwa "perpecahan sebagai akibat dari ketertutupan. Masing-masing tidak mau belajar dari pihak lain. Maka diperlukan keterbukaan; menghargai perbedaan pendapat".

Untuk tingkat sekolah penilaian dilakukan dengan mitra Komite Sekolah sebagaimana yang dilaksanakan pada tahap pengendalian. Dari kedua mitra ini maka proses evaluasi sudah dapat dikatakan objektif. Berikut adalah salah satu kutipan dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dalam menggali data empirik terhadap proses evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* Dinas Pendidikan berkenaan dengan 8 standar nasional pendidikan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh penulis tersebut bahwa hasil dari penilaian keberhasilan 8 SNP ini menunjukkan bahwa prosesnya terjadi dimulai dari level sekolah.

Aspek evaluasi ini sangat penting dan secara struktur keorganisasian telah menghasilkan kesinergisan antar lini dan antar organisasi yang berwenang untuk melakukan evaluasi program secara melekat di dalamnya ada bentuk dan dampak dari implementasi strategi komunikasi yang dilaksanakan. Sebagai contoh di tiap sekolah selalu dihadiri oleh Korwas, guna memantau tentang sejauh mana program layanan pembelajaran dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dalam konteks evaluasi terhadap sejumlah strategi komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator yang dalam hal ini adalah Korwas di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten serta para UPTD dengan para

Pengawas Satuan pendidikannya maka dalam implementasinya tidak akan terlepas dari fungsi kontroling dalam tupoksi fungsi-fungsi manajemen. Ketika *stakeholder* ingin menyampaikan pesan mengenai sejumlah kebijakan dan implementasi program 8 standar nasional pendidikan kepada stafnya maka salah satu faktor utama yang harus menjadi sasaran evaluasi terhadap keberhasilan penerapan strategi komunikasi yang dilakukan adalah kondisi kesamaan suasana , tujuan, proses komunikasi yang dilakukan secara filosofis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Frey (1999:519), bahwa faktor ideologi-bersama ikut berperan dalam proses interaksi dari suatu kelompok. Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa ketika korwas melakukan proses interaksi dengan bawahannya mengenai sejumlah pesan yang bersifat instruksi untuk implementasi 8 standar nasional, maka yang harus diperhatikan adalah kondisi filosofis yang harus sama ketika proses strategi komunikasi itu dilakukan oleh dirinya.

Selanjutnya ketika program pembelajaran sebagai salah satu implementasi standar proses dan isi dari 8 standar nasional pendidikan ini ternyata mampu mengantarkan kepada keberhasilan siswa dalam menempuh ujian nasional. Berikut adalah cuplikasi pemberitaan mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat dalam mengantarkan semua Kabid, Kasi, UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru di tiap satuan pendidikan hingga mereka mampu menghasilkan lulusan yang lolos UN cukup banyak jumlahnya.

14. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Perencanaan dan Strategi Komunikasi

Sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi strategi komunikasi dalam mendukung keberhasilan implementasi program 8 standar nasional di lingkungan Dinas Pendidikan dan

level UPTD, sampai kepada level sekolah pada dasarnya sangat banyak. Untuk memberikan analisis lebih jelas maka pada bagian ini dapat dijelaskan dalam kelompok analisa faktor pendukung dan penghambat.

Dari hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat dalam rangka implementasi 8 standar nasional, ternyata cukup variatif. Aspek penting adalah analisis terhadap faktor pendukung yang berhubungan dengan praktik dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator kepada komunikan dalam konteks implementasi sejumlah kebijakan dan keberhasilan implementasi program 8 standar nasional pendidikan.

D. Analisis Faktor Pendukung

1. Kesiapan jumlah SDM di lingkungan dinas pendidikan cukup memenuhi tuntutan implementasi 8 standar nasional pendidikan sehingga strategi komunikasi dapat dengan lancar dilaksanakan;
2. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh semua Kabid, dan Kasi, serta tenaga fungsional yang ada sangat mendukung pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, sehingga proses komunikasi dapat dengan mudah dilaksanakan;
3. Dukungan perangkat manajerial serta SOTK yang dimiliki Dinas Pendidikan cukup mendukung;
4. Filosofis dan struktur organisasi kedinasan cukup memberikan kejelasan siapa melakukan apa berkenaan dengan proses komunikasi yang harus dilaksanakan.
5. Jadwal Implementasi program yang sudah siap dirumuskan menjadi tolak ukur kapan dan oleh siapa proses

mengkomunikasikan kebijakan implementasi program 8 standar nasional dilakukan;

6. Dokumen renstra Dinas Pendidikan yang cukup lengkap dan memberikan arah tujuan yang jelas, dengan demikian strategi mengkomunikasikannya cukup mudah dilakukan selama ini;
7. Pengetahuan dan kompetensi semua penanggung jawab kegiatan telah memenuhi standar rujukan selama ini;
8. Kualifikasi SDM yang dimiliki cukup memberikan kemudahan dalam menyampaikan isi dari pesan-pesan pokok untuk semua program 8 standar nasional pendidikan sampai ke level UPTD;
9. Media elektronik dan media cetak bahkan media digital *online* berupa *website* yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat cukup representatif dalam melaksanakan strategi komunikasi tentang 8 standar nasional pendidikan, mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan report secara digital.
10. Keberadaan juklak dan juknis mengenai implementasi 8 standar nasional pendidikan sudah lengkap dan telah dipelajari dengan baik oleh semua Kabid, Kasi, tenaga fungsional, UPTD, dan bahkan oleh par guru.

Dari sejumlah faktor pendukung ini maka dapat dinyatakan bahwa keberhasilan strategi komunikasi yang dilakukan akan sangat jelas ketika semua faktor pendukung ini mampu secara komprehensif dan situasional memberikan dukungan langsung kepada para komunikator dalam melaksanakan strategi komunikasi yang ia terapkan. Dalam konteks ini maka menurut Goffman dan McGall dan Simmon, dalam Nina W. Syam (2009:154) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi di antaranya adalah faktor tuntutan-tuntutan dan kesempatan-kesempatan situasional yang ada di sekeliling interaksi yang terjadi.

Dari faktor penghambat ini maka analisis terhadap kegagalan yang mungkin banyak dialami selama ini dikarenakan kondisi terhadap faktor internal dan eksternal cenderung banyak juga dipengaruhi oleh faktor penghambat ini. Kondisi yang situasional merupakan gejala yang mungkin dapat dialami dan ditemukan oleh semua *stakeholder* mulai dari tingkat dinas pendidikan sampai tingkat persekolahan. Kekuatan diri dan keyakinan para *stakeholder* dalam melaksanakan proses komunikasi dengan strategi tertentu akan dituntut untuk mampu menerapkannya secara simultan. Dalam konteks ini maka kemampuan komunikator seharusnya mampu menganalisis sejumlah faktor penghambat dan mencoba untuk menekannya sehingga tidak banyak mempengaruhi kredibilitas komunikator serta kualitas penyampaian pesan yang mampu menembus para komunikan atau para implementator kebijakan program standar nasional pendidikan yang dimaksud.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan interpretasi data yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek perencanaan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pemetaan dan implementasi 8 standar nasional pendidikan khususnya pada standar isi dan standar proses yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sangat ditentukan oleh upaya strategi komunikasi yang dilakukan terutama dalam bentuk persuasif. Bentuk dokumen perencanaan untuk tiap level manajemen disesuaikan dengan tingkatan strategi komunikasi, di antaranya adalah dokumen Renstra, Rincian Program Kepala Bidang Rincian program Kepala Seksi Rencana Kerja UPTD untuk tingkat UPTD di wilayah Kecamatan, Program kerja pengawas Rencana Kerja Sekolah untuk tingkat Sekolah, dan Rencana Pembelajaran.
2. Berdasarkan analisis ***internal*** menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, UPTD dalam implementasi Standar isi dan Standar Proses, mencakup: (a) sistem pengendalian melekat; (b) jadwal implementasi standar isi dan proses; (c) Strategi *Top Down*. Adapun secara ***eksternal*** mencakup: (a) Keterlibatan mitra sekolah, masyarakat, komite, dewan pendidikan dan individu tokoh masyarakat, UPTD, dan Dinas Pendidikan; (b) Faktor lainnya mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten hingga level guru; (c) Pembinaan dan program kerja.

3. Proses pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, UPTD dilakukan secara rutin. Biasanya melalui monitoring bersama dengan pihak pengawas, di mana beberapa instrumen tentang pengisian sejumlah data kegiatan yang dilakukan oleh UPTD diisi oleh pengawas, kemudian dilaporkan kepada tiap Seksi di tingkat Dinas Pendidikan sebagai bentuk *pengendalian standar isi* terutama pada sejumlah standar dan proses pengendalian implementasi strategi komunikasi yang secara terintegrasi dengan implementasi program kegiatan di level UPTD dan persekolahan, salah satunya adalah sistem pengendalian dalam bentuk kegiatan Sinkronisasi sejumlah program kerja antara UPTD yang satu dengan UPTD lainnya terhadap program kerja pokok yang dimiliki oleh semua seksi di tingkat kabupaten.
4. Proses evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan selama ini ditujukan sebagai upaya perbaikan ke depan terhadap implementasi program kegiatan dari program 8 standar nasional pendidikan standar isi dan standar proses dilaksanakan dengan baik khususnya oleh Dinas Pendidikan, UPTD dan level sekolah.
5. Faktor pendukung berdasarkan analisis "ALE dari Grunig" mencakup:
    a. Kesiapan jumlah SDM di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten di Jawa Barat;
    b. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh semua Kabid, dan Kasi, serta tenaga fungsional;
    c. Dukungan perangkat manajerial serta SOTK yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat;
    d. Filosofis dan struktur organisasi kedinasan.
    e. Jadwal Implementasi program yang sudah siap
    f. Dokumen renstra Dinas Pendidikan yang cukup lengkap

g. Pengetahuan dan kompetensi semua penanggung jawab kegiatan
h. Kualifikasi SDM yang dimiliki pada semua level
i. Media elektronik dan media cetak dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten di Jawa Barat.
j. Keberadaan juklak dan juknis mengenai implementasi 8 standar nasional pendidikan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat berdasarkan analisis "ALE dari Grunig" mencakup

a. Dukungan kesadaran akan konsistensi dalam melaksanakan program 8 standar nasional yang belum merata;
b. Tingkat penerimaan terhadap perubahan-perubahan dalam melaksanakan program 8 standar nasional masih berbeda-beda antara wilayah binaan di setiap UPTD
c. Overlap dalam melaksanakan tupoksi sehingga kurang optimal, hal ini mengakibatkan strategi komunikasi tidak efektif
d. Masalah kepercayaan dalam penganggaran dan proses penyerapan anggaran yang menimbulkan ketidaknyamanan dari *stakeholder* pengelola keuangan;
e. Jadwal pencarian anggaran dengan jadwal bergulirnya program yang merujuk kepada ketercapaian 8 standar nasional pendidikan selama ini sering tidak berbarengan;
f. Sistem pelaporan yang merepotkan proses pembiasaan dan menuntut strategi komunikasi khusus dalam mensosialisasikannya yang berujung pada upaya pembekalan (*workshop*)
g. Sering banyaknya rotasi yang dilakukan untuk staf yang pertama, malahan menjadi mentah lagi ketika staf

h. Dukungan transportasi yang masih terbatas ketika seorang pengawas harus melakukan pembinaan dengan target 4 sekolah per hari

i. Masih ada *stakeholder* level sekolah yang belum memaknai seutuhnya tentang 8 standar nasional pendidikan ini

j. Media-media elektronik dan dukungan infrastruktur untuk mengirimkan pesan dengan bobot yang besar masih sulit terealisasikan

k. Kekuatan akses internet untuk wilayah tertentu masih menjadi kendala dalam melakukan strategi komunikasi secara *online*.

B. Implikasi

Sejumlah kebijakan yang dilahirkan dari manajemen pendidikan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan berkenaan dengan upaya keberhasilan mengimplementasikan 8 standar nasional pendidikan, ternyata tidak terlepas dari adanya suatu strategi komunikasi yang tepat dan adaptif yang dilakukan oleh para *stakeholder* yang profesional. Berdasarkan pembahasan, serta simpulan-simpulan di atas maka berikut adalah sejumlah implikasi dari penulisan ini yaitu mencakup:

1. Perencanaan strategi komunikasi yang melibatkan semua unsur dan level manajemen organisasi Dinas Pendidikan dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan akan menjadi salah satu pendukung keberhasilan Dinas Pendidikan dalam membangun *outcome* yang diinginkan oleh masyarakat pendidikan di Kabupaten di Jawa Barat;
2. Implementasi strategi komunikasi dengan dukungan kebijakan, dan jadwal kegiatan yang terkontrol melalui sistem supervisi yang dilakukan oleh para penanggung jawab kegiatan selama implementasi 8 standar nasional pendidikan telah menjadikan

karakter khusus dalam mencapai target tujuan setiap standar pembangunan pendidikan;

3. Sistem pengendalian dan pelaksaan supervisi yang dilakukan selama penerapan strategi komunikasi yang diperankan oleh *stakeholder* pendidikan mulai dari tingkat Dinas Kabupaten, UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru di lingkungan kabupaten telah menjadi *inuput* bagi para mitra yang bertugas menjaga dan menjamin kualitas layanan pembangunan pendidikan oleh Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Dewan Guru untuk mencapai hasil yang lebih baik
4. Sistem evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dan terkontrol berdasarkan tingkat capaian tujuan yang ditetapkan untuk tiap standar nasional pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap siklus untuk *input* fase perencanaan selanjutnya yang dapat dirumuskan berdasarkan *report* tiap *stakeholder* penanggung jawab kegiatan yang telah terlaksana selama ini.
5. Ada sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lingkungan dinas Pendidikan dalam rangka implementasi 8 standar nasional pendidikan yang mampu dijadikan sebagai pengontrol terhadap strategi komunikasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan pendidikan mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Gugus, Sekolah, dan level kelas.

C. Rekomendasi

Berdasarkan atas hasil pembahasan, simpulan dan implikasi maka riset mengenai standar isi dan standar proses dari 8 standar nasional pendidikan yang penulis lakukan pada dasarnya masih menyimpan sejumlah informasi yang belum terungkap. Demikian juga dalam aspek keunggulan hasil riset masih jauh dari harapan,

namun demikian ada sejumlah temuan penting yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh semua pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merekomendasikan sejumlah strategi dalam pelaksanaan isi program standar isi dan standar proses. Berikut rekomendasi yang dapat penulis rumuskan, yaitu:

1. Strategi dalam mengkaji makna dan isi dari standar isi dan standar proses sebagai satu kesatuan oleh para *stakeholder* pendidikan sampai dengan level guru dan siswa di wilayah binaan Dinas Pendidikan;
2. Hendaknya semua pihak mampu memahami dan melaksanakan strategi komunikasi yang efisien berkenaan dengan semua penyampaian kebijakan tentang 8 SNP mulai tingkat kabupaten sampai level guru di sekolah;
3. Semua pihak di lingkungan Dinas Pendidikan hendaknya mampu melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari pelaksanaan program sekolah yang mencerminkan standar isi dan standar proses secara berkala.
4. Semua pihak di lingkungan Dinas Pendidikan hendaknya mampu melakukan ekspos atas hasil capaian semua program sekolah yang didampingi oleh para pengawas sebagai pembina strategis selama implementasi program pembangunan pendidikan melalui 8 SNP khususnya standar isi dan standar proses.
5. Pihak-pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan wajib melakukan pendokumentasian atas semua kegiatan strategi komunikasi berkenaan dengan keberhasilan program Dinas Pendidikan, UPTD, Pengawas, Sekolah, guru dan siswa serta mitra Dewan Pendidikan dan Mitra Sekolah serta Dunia Industri secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

_____(2003). Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Penerbit CV. Restu Agung Jakarta.

_____(2002). *Rekontruksi Ilmu Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan dalam Era Globalisasi,* UNPAD,Bandung.

_____. (2010). *Sistem Pemetaan Program Renstra.* Garut: Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Al Hasyimiy, Ahmad. (2005). *Mukhtaar al Ahadits al Nabwiyyat wa al Hikam al Muhammadiyyat.* Al Haramain Jaya, Indonesia

Al Qur'an dan Terjemahannya. (1985). Depag RI, PT.Intermasa, Jakarta

Anderson, Jo Anne. (2005). *Accountability in Education.* Paris : The International Institute for Educational Planning, UNESCO.

Anonim, (1998). Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Penerbit CV. Restu Agung Jakarta.

Ariany, Ria dan Ekha Putera (2013). *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. Bandung: Jurnal Mimbar, Vol, 29, No.1 Edisi Juni, 2013, hal-33-40).

Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introductory to Theory and Methods*. Boston : Allyn and Bacon Inc.

Borg, Walter R, and Gall, Meredith Damien. (1989). *Educational Research*. London : Longman.

Bungin, Burhan (ed). (2003). *Analisis Data an Kualitatif.* Jakarta : PT Raja Garfindo Persada

Darmawan, Deni. (2009), *Biologi Komunikasi.* Bandung: Humaniora

Dwek, Carol C. (2006). *Policy Study and Good Governance.* New York: Mc. Graw-Hill.

Edward, C, George III., (1980). *Implementing Public Policy,* Congressional Quarterly Press.

Frey, L.R. (editor). (1999). *The Handbook of Group Communication Theory and Research,* London: Sage Publication.

Grunig, J.E., Grunig, L.A. & Dozier, D.M. (2002). *Excellent Public Relations and Effective Organisations*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Halligan, J dan J Power. 1992 dalam buku *Political Management in the Nineties*

Kotler, P.,(2000). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perenanaan, Implementasi, dan Kontrol.* Jakarta: Prenhalindo.

Lincoln dan Guba (1995), *Qualitative Research.* New Jersey: Macmilan Company.

Littlejohn, Stephen W.(1996). *Theories of Human Communication.* Edisi ke 5. Wadsworth,Belmont, California.

Meter, D.S Van dan Horn, Carl E. Van., (1975). *The Policy Implementation Process: A conceptual Framewrok",* dalam Administration and Society, Vol.6, No.4.S

Mulyana, Deddy (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar,*Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Nasrudin, Endin (2009). Manajemen Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Keagamaan Di Tengah Kompleksitas Perubahan Sosial Budaya di Kabupaten Sukabumi. Disertasi Uninus, Bandung

Rachkmat, M.F., (1998). *Catatan Kang Jalal Visi Misi, Politik, dan Pendidikan.* Bandung. PT. Remadja Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaluddin (1999). *Psikologi Komunikasi.* Bandung, PT.Remaja Rosdakarya

Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan, 2000).

Rogers, Everetts M. (1983). *Diffusion of Innovation*. New York : The Free Press.

Saefudin, Asep. (2009). *Strategi Komunikadi Publik dalam rangka membangun Citra Indonesia.* Bandung: Pascasarjana Unpad.

Salam, Dharma Setiawan. 2004. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya.* Jakarta : Djambatan, 2004.

Sallis E. (2007). *Total Quality Management in Education*. Jogjakarta: Ircisod.

Shahih Bukhori (Tanpa tahun). Kitab Nomor 6018. Daar El Fikr, Beirut

Shahih Muslim. (Tanpa tahun). Kitab Nomor 47, Daar El Fikr, Beirut

Sofyandi, Agus, K dan Rosiana, Dewi, (2013). *Religious Islami dan Self Regulation Para Pengguna Narkoba.* Bandung: Mimbar, Vol. 29, No.1 Edisi Juni 2013, Hal 77-84.

Sugiyono, (2005). *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfabeta.

Suherman, Ade (2009). *Penelitian tentang Kajian Mutu Pendidikan.* Tasikmalaya: Pascasajrana Universitas Galuh.

Syam, Nina W. (2009). *Sosiologi Komunikasi.* Bandung, Humaniora.

Wahab, S.,A., (1997). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Jakarta: Bumi aksara.

Wahyudin, Dinn (2009). *Pengembangan Model Manajemen Kurikulum Dalam Kerangka otonomi Daerah.* Bandung: LPPM UPI.

Wahyudun, U, Hariri, Ridwan, and Darmawan, D., (2013). *Developing Image of Higer Education performance.* Pitburgh: Delewara, USA: Internationao Journal of Communications, Network and System Scienes. Vol. Sept, 2013,p. 380-413.

Dokumen Non Buku:

Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggara Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PP. No. 25 Tahun 2007, *Tentang Standar Sarana Prasarana Kemdiknas.*

Selanjutnya dalam pasal 14 UU no 32 tahun 2004. Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009--mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan;

Tim Perumus Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Majalegka.

UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemendiknas.

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**;**

UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Sumber Online:

B Steyn, E de Beer., (2013). Conceptualising strategic communication management (SCM) in the context of governance and stakeholder inclusiveness:Sumber:http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/21013/ Steyn_Conceptualising(2012).pdf?sequence=1

Folly Akbar, Blog di download Jumat 06 Februari 2015 jam 21.00 WIB

SANTRI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH
N U
SELAMAT
HARI SANTRI
NASIONA
22 OKTOBER 2023
Made with twibbonize

BIODATA PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs., M.Si., Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Dokterandus (Drs). Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, dan Bimbingan Konseling Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, *workshop*, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Adapun karya yang telah diterbitkan yaitu: Buku pertama, "Komunikasi Politik Teori dan Praktek di terbitkan oleh Mimbar Pustaka Bandung", buku kedua "Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai" di terbitkan oleh Lutfi Gilang Banyumas.

Buku Komunikasi Kebijakan Pendidikan ini merupakan "hutang" yang baru bisa dibayarnya setelah beberapa waktu yang lalu menamatkan strata S-nya. Buku ini merupakan pergumulan panjang saat penelitian dan penulisan disertasinya. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil penelitian disertasinya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di *posting* pada akun Facebook dengan alamat Cecep Suryana Majalengka dan akun Instagram dengan alamat csuryana56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Aspek perencanaan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pemetaan dan implementasi 8 standar nasional pendidikan khususnya pada standar isi dan standar proses yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sangat ditentukan oleh upaya strategi komunikasi yang dilakukan terutama dalam bentuk persuasif. Bentuk dokumen perencanaan untuk tiap level manajemen disesuaikan dengan tingkatan strategi komunikasi, di antaranya adalah dokumen Renstra, Rincian Program Kepala Bidang Rincian program Kepala Seksi Rencana Kerja UPTD untuk tingkat UPTD di wilayah Kecamatan, Program kerja pengawas Rencana Kerja Sekolah untuk tingkat Sekolah, dan Rencana Pembelajaran. Proses pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, UPTD dilakukan secara rutin. Biasanya melalui monitoring bersama dengan pihak pengawas, di mana beberapa instrumen tentang pengisian sejumlah data kegiatan yang dilakukan oleh UPTD diisi oleh pengawas, kemudian dilaporkan kepada tiap Seksi di tingkat Dinas Pendidikan sebagai bentuk pengendalian standar isi terutama pada sejumlah standar dan proses pengendalian implementasi strategi komunikasi yang secara terintegrasi dengan implementasi program kegiatan di level UPTD dan persekolahan, salah satunya adalah sistem pengendalian dalam bentuk kegiatan Sinkronisasi sejumlah program kerja antara UPTD yang satu dengan UPTD lainnya terhadap program kerja pokok yang dimiliki oleh semua seksi di tingkat kabupaten.

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Jakad Publishing
081230444797, 081234408577
http://www.jakad.id
jakadmedia@gmail.com

Jakad.id
Book, Journal and Training

ISBN 978-623-8055-40-6
9 786236 955406